

LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DI SMA NEGERI 1 MLATI
Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
15 Juli – 15 September 2016

Dosen Pembimbing Lapangan
Praktik Pengalaman Lapangan (DPL-PPL)
Setiati Widiastuti, M.Hum



Disusun Oleh :
GISTA CERI APRASNJA PARAMITHA
13401241012

JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAA DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Mlati, Sleman, Yogyakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM : 13401241012
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA N 1 Mlati, Sleman dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Laporan PPL ini telah di setujui dan disahkan pada:

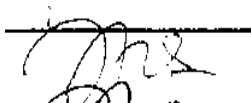
Hari : Jumat

Tanggal : 16 September 2016

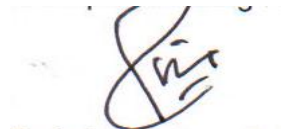
Yogyakarta, 16 September 2016

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru pembimbing PPL



Setiati Widiastuti, M.Hum
NIP. 19600328 198403 2 001



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

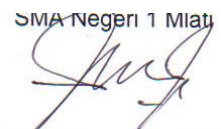
Mengetahui,

Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Mlati

Koordinator PPL
SMA Negeri 1 Mlati



Drs. Aris Sutardi
NIP 19640128 199003 1 003



H. Suparwanto, S.Pd
NIP. 19680312 1997021 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pelaksanaan PPL yang berlangsung dari tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 di SMA Negeri 1 Mlati dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan PPL ini merupakan suatu kegiatan yang berupa praktik mengajar dan penataan bagi calon guru didalam sebuah sekolah/instansi pendidikan.

Adanya kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan sumbangan inovasi dan pemikiran serta pengembangan baik untuk guru maupun sekolah. Kegiatan ini telah memberikan banyak pengalaman bagi praktikan, maka tidak lupa praktikan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Aris Sutardi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mlati yang telah memberi ijin melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di SMA Negeri 1 Mlati
3. Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Pendidikan Kewarganegaraan PPL UNY di SMA Negeri 1 Mlati
4. Bapak Suparwanto S.Pd selaku Koordinator PPL di SMA Negeri 1 Mlati yang telah memberikan bimbingan kepada praktikan.
5. Ibu Dra. Mawanti Widyastuti, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL UNY 2016 yang telah mendampingi, membimbing dan memotivasi praktikan untuk menghasilkan yang terbaik selama proses PPL UNY 2016 di SMA Negeri 1 Mlati
6. Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah *Micro teaching* yang telah membimbing dan melatih praktikan dalam hal mengajar di kelas.
7. Ibu Ervin Iswandayani, S.Pd. selaku guru pembimbing bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan yang selalu membimbing, memberikan pengarahan dalam mengajar selama pelaksanaan PPL.
8. Bapak dan Ibu Guru serta segenap karyawan SMA Negeri 1 Mlati
9. Segenap Staf Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY 2016 yang telah mengarahkan praktikan dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
10. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Mlati yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam program-program PPL UNY.
11. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi praktikan dalam melaksanakan PPL UNY 2016, baik secara moril maupun materil :
 - a) Ayah Heru Sulistyono, SE
 - b) Ibunda Nuning Pujiningsih, SE (Almh)

- c) Simbah Siti Rochimah
- d) dr. Gilang Lies Melati Kripsamaya
- e) dr. Wijanarto
- f) Gusti Risprihatsa Kesuma Haen
- g) Feroniko Trijayadi

12. Rekan-rekan PPL UNY 2016 di SMA Negeri 1 Mlati atas kerjasamanya

13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu baik saran maupun kritik yang membangun sangat praktikan harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Demikian laporan ini disusun, semoga apa yang telah praktikan lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mlati, 16 September 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantariii

Daftar Isi v

Abstrak vi

Daftar Lampiran.....vii

BAB I PENDAHULUAN

 A. Analisis Situasi 1

 B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL..... 7

BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL.....

 A. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan 9

 B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 11

 C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 17

BAB III PENUTUP

 A. Kesimpulan 20

 B. Saran 20

Daftar Pustaka 23

Lampiran 24

**LAPORAN INDIVIDU
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

SMA Negeri 1 Mlati, Tlogoadi, Cebongan, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh:
Gista Ceri Aprasnja Paramitha

ABSTRAK

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk seluruh mahasiswa dengan bidang kependidikan. PPL juga diharapkan dapat member manfaat lebih kepada masyarakat sekolah melalui pelaksanaan praktik mengajar oleh praktikan berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dipelajari di kampus serta *softskill* yang dimiliki oleh mahasiswa. Selain itu PPL juga diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman bagi praktikan untuk dapat mengajar dengan baik serta menjadi bagian dari masyarakat sekolah.

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama dua bulan yakni mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016 setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di SMA Negeri 1 Mlati, Tlogoadi, Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum pelaksanaan PPL ini, praktikan telah melaksanakan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui potensi dan kondisi sekolah SMA Negeri 1 Mlati, sehingga dapat menyesuaikan dalam membuat perangkat administrasi guru dan penggunaan kurikulum di sekolah.

Hasil kegiatan mengajar secara umum terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan rencana. Beberapa pertemuan di dalam kelas kurang efektif karena adanya pengurangan waktu jam pelajaran dan adanya hari libur, tetapi praktikan dapat mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada peserta didik agar tetap belajar di rumah. Seluruh masyarakat sekolah yakni peserta didik, guru-guru dan karyawan sangat membantu dalam pelaksanaan PPL ini. Pendanaan untuk pelaksanaan PPL misalnya *print* RPP, *print* silabus, *print* soal ulangan harian, dan lain-lain bersumber dari praktikan sendiri. Faktor pendukung praktik mengajar oleh praktikan antara lain dari kemauan yang keras dari diri praktikan, antusias peserta didik dan guru pembimbing PPL. Diharapkan bahwa SMA Negeri 1 Mlati agar tetap menggapai prestasi yang cemerlang di kemudian hari dan mempertahankan prestasi yang telah diperoleh.

Kata Kunci: Praktikan, PPL

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Matriks Kegiatan
2. Lampiran 2. Laporan Mingguan
3. Lampiran 3. Laporan Harian
4. Lampiran 4. Laporan Dana
5. Lampiran 5. Kartu Bimbingan PPL
6. Lampiran 6. RPP
7. Lampiran 7. Daftar Hadir Siswa Kelas XI IPA 1
8. Lampiran 8. Daftar Hadir Siswa Kelas XI IPS 1
9. Lampiran 9. Daftar Hadir Siswa Kelas X IIS 1
10. Lampiran 10. Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian 1 Kelas XI IPA 1
11. Lampiran 11. Kisi-kisi Soal Ulangan Harian 1 Kelas X IIS 1
12. Lampiran 12. Lembar Soal Ulangan Harian 1 Kelas XI IPA 1
13. Lampiran 13. Lembar Soal Ulangan Harian 1 Kelas X IIS 1
14. Lampiran 14. Kisi-kisi Soal Remedial 1 Kelas XI IPA 1
15. Lampiran 15. Kisi-kisi Soal Remedial 1 Kelas X IIS 1
16. Lampiran 16. Lembar Soal Remedial 1 Kelas XI IPA 1
17. Lampiran 17. Lembar Soal Remedial 1 Kelas X IIS 1
18. Lampiran 18. Lembar Kuis Kelas XI IPA 1
19. Lampiran 19. Lembar Kuis Kelas XI IPS 1
20. Lampiran 20. Lembar Kuis Kelas X IIS 1
21. Lampiran 21. Daftar dan Analisis Nilai Kelas XI IPA 1
22. Lampiran 22. Daftar dan Analisis Nilai Kelas X IIS 2
23. Lampiran 23. Rekap Nilai Peserta Didik
24. Lampiran 24. Pembagian Minggu Efektif
25. Lampiran 25. Silabus
26. Lampiran 26. Program Tahunan
27. Lampiran 27. Program Semester
28. Lampiran 28. Media Pembelajaran Kelas XI IPA 1
29. Lampiran 29. Media Pembelajaran Kelas XI IPS 1
30. Lampiran 30. Media Pembelajaran Kelas X IIS 1
31. Lampiran 31. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih baik dan lebih profesional. Salah satu model yang dipilih adalah pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan secara terpadu. PPL/Magang III mempunyai misi pembentukan dan peningkatan kemampuan profesional.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang III merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, untuk diterapkan dalam kehidupan nyata khususnya di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal serta masyarakat. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang III diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki dunia pendidikan, serta mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang profesional sebagai seorang tenaga kependidikan.

PPL/Magang III juga merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil jurusan kependidikan. Mata kuliah PPL dilaksanakan dengan tujuan untuk menyiapkan dan menghasilkan guru atau tenaga kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional. Hal ini sejalan dengan kompetensi guru dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

PPL/Magang III secara sederhana dapat dimengerti untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar dapat mempraktikkan beragam teori yang mereka terima di bangku kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa menerima atau menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh karena itu, pada saat PPL/Magang III ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan ilmunya, agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya (*real teaching*)

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PPL/Magang III diharapkan dapat dipakai sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga kependidikan yang profesional. Melihat latar belakang yang ada. Praktikan melaksanakan kegiatan PPL/Magang III di SMA N 1 Mlati. SMP ini berlokasi di Tlogoadi, Cebongan, Mlati, Sleman Yogyakarta. Sebelum kegiatan PPL/Magang

III dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi terlebih dahulu secara garis besar yang berhubungan dengan permasalahan dan potensi pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Hal-hal yang diamati antara lain:

- a. Perangkat pembelajaran berupa perangkat administrasi guru Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI.
- b. Proses pembelajaran, meliputi membuka pelajaran, penyampaian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, teknik penguasaan kelas, penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, serta menutup pelajaran.
- c. Perilaku siswa meliputi perilaku siswa didalam kelas dan diluar kelas.

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara sederhana dapat dimengerti untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa agar dapat mempraktikan beragam teori yang sudah praktikan terima di bangku kuliah. Pada saat kuliah praktikan menerima atau menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh karena itu, pada saat PPL ini praktikan berkesempatan untuk mempraktikkan ilmunya, agar para praktikan tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya.

Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman Lapangan, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mengenal dan mengetahui secara langsung proses pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya di tempat praktik.
- b. Memperdalam pengertian, pemahaman, dan penghayatan dalam pelaksanaan pendidikan.
- c. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan bekal yang telah diperolehnya selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan kependidikan lainnya.
- d. Mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah.

2. Bagi Sekolah

- a. Mendapat inovasi dalam kegiatan pendidikan.
- b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam mengelola pendidikan.

3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

- a. Memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktik pendidikan sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat disesuaikan.
- b. Memperoleh masukan tentang kasus kependidikan yang berharga sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengembangan penelitian.
- c. Memperluas jalinan kerjasama dengan instansi lain.

SMA Negeri 1 Mlati terletak di Tlogoadi, Cebongan, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana cukup kondusif untuk kegiatan belajar mengajar karena terletak di pemukiman warga dan tidak terlalu ramai. Selain itu, terdapat halaman, lapangan upacara dan juga taman sekolah yang membuat pandangan mata menjadi lebih luas dan nyaman untuk proses belajar. SMA Negeri 1 Mlati berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Komunikasi yang terjalin dengan penduduk pun terbilang cukup harmonis.

SMA Negeri 1 Mlati terletak di jantung kota kecamatan Mlati yang merupakan sekolah yang menjadi sasaran bagi pelaksanaan PPL UNY 2016. SMA Negeri 1 Mlati merupakan sekolah dengan akreditasi A.

Lokasi SMA N 1 Mlati cukup strategis, karena berada di jalur yang dilalui oleh angkutan umum serta berada dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional, puskesmas, kantor polisi, ATM, dan pusat perbelanjaan. Meskipun sekolah ini berada dekat dengan jalan raya, tetapi karena tata letak ruang kelas yang cukup jauh dari pintu gerbang sekolah maka kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dengan adanya suara bising kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat terdukung yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan SMA Negeri 1 Mlati. Adapun gambaran kondisi SMA Negeri 1 Mlati adalah sebagai berikut:

Visi Sekolah

Melangkah Maju Meningkatkan Mutu Berlandaskan Akhlak Mulia.

Dengan peningkatan mutu dalam:

1. Rata-rata nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
2. Kedisiplinan.
3. Kreativitas.
4. Karya ilmiah remaja dan penelitian.
5. Persaingan masuk perguruan tinggi yang berkualitas.
6. Olahraga prestasi.
7. Kepedulian sosial.

Semua peningkatan mutu tersebut selalu dilandasi oleh sikap dan akhlak yang mulia.

Misi Sekolah

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Menumbuhkembangkan seluruh warga sekolah untuk selalu meningkatkan mutu secara intensif.
3. Mendorong dan membantu setiap peserta didik mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
4. Menumbuhkan rasa memiliki, mendukung, bangga, dan tanggung jawab terhadap sekolah.
5. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
6. Mengoptimalkan kerja sama dengan orang tua, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melaksanakan bimbingan bahasa Inggris secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis secara sederhana.

Tujuan Sekolah

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan menengah, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan untuk semua peserta didik SMA Negeri 1 Mlati.
2. Meningkatkan dan memenuhi tuntutan program pembelajaran yang berkualitas dan kualifikasi tenaga kependidikan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan program pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) dan hasil belajar peserta didik.
4. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengembangan program pendidikan yang berakar pada budaya bangsa dan mengikuti perkembangan teknologi.
5. Peningkatan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang mengarah pada program pembelajaran berbasis kompetensi.
6. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler unggulan sesuai bakat dan minat peserta didik.
7. Mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa.

SMA Negeri 1 Mlati sudah dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana penunjang KBM. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Mlati diantaranya adalah gedung sekolah yang terdiri dari ruang belajar, ruang kantor, ruang penunjang, dan halaman sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan apel pagi, olahraga (bola basket, bola voli, sepak bola), kegiatan ekstrakurikuler. Adapun situasi sekolah ini selengkapnya adalah:

1. Kondisi Fisik Sekolah

a) Ruang Kantor

SMA Negeri 1 Mlati memiliki 3 ruang kantor yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru, serta ruang Tata Usaha (TU). Ketiga ruangan ini terletak di sebelah timur menghadap ke barat membujur dari utara ke selatan. Ruang guru berada di paling selatan, terdiri dari meja dan kursi guru, almari guru, perangkat mengajar seperti remote, proyektor, dan komputer. Di ruang guru ini juga terdapat Finger Print yang berfungsi sebagai alat presensi bagi para guru dan karyawan.

Di sebelah utara ruang guru adalah ruang kepala sekolah yang terbagi menjadi 2 ruangan utama yaitu ruang kerja kepala sekolah dan ruang tamu. Ruang kepala sekolah tertata dengan rapi dan dilengkapi berbagai fasilitas yang menunjang. Sedangkan ruang tamu terdiri dari meja dan kursi untuk menerima tamu.

Ruang paling utara adalah ruang Tata Usaha, yang memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup memadai seperti meja, kursi, komputer, printer, almari arsip serta peralatan dan perlengkapan administrasi lainnya.

b) Ruang Kelas

- 1) Kelas X sebanyak 4 kelas, yang terdiri atas 2 kelas MIPA dan 2 kelas IIS
- 2) Kelas XI sebanyak 4 kelas, yang terdiri atas 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS
- 3) Kelas XII sebanyak 4 kelas yang terdiri atas 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS

Setiap ruang kelas memiliki kelengkapan belajar mengajar yang cukup memadai antara lain: meja, kursi, white board, penghapus, spidol, LCD Proyektor, almari, kipas angin, dan CCTV di setiap kelasnya. Selain itu juga telah dipasang wifi di setiap jenjang kelas.

c) Laboratorium

SMA Negeri 1 Mlati memiliki empat laboratorium yaitu laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan laboratorium komputer. Laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium fisika terbagi menjadi tiga ruangan yaitu ruangan untuk praktikum yang terdiri dari meja dan kursi serta keran air dan bak yang menempel pada dinding. Ruangan

ini dilengkapi dengan white board, spidol, penghapus, LCD Proyektor. Ruangan selanjutnya adalah ruang pengampu praktikum yang terdiri dari meja, kursi, dan rak untuk meletakkan buku dan jas praktikum. Ruangan terakhir adalah gudang, yang digunakan untuk menyimpan alat dan bahan praktikum.

Laboratorium selanjutnya adalah laboratorium Komputer yang terletak dekat dengan tempat parkir siswa. Laboratorium ini dilengkapi dengan beberapa unit komputer yang digunakan untuk pembelajaran. Laboratorium komputer juga difasilitasi dengan koneksi internet/ wifi.

d) Perpustakaan

Perpustakaan SMA Negeri 1 Mlati terletak di sebelah selatan laboratorium kimia. Perpustakaan sudah menggunakan sistem digital. Dalam perpustakaan ini terdapat 1 pustakawan yang mengelola. Rak-rak sudah tertata rapi sesuai dengan klasifikasi buku dan klasifikasi buku di rak berdasarkan judul mata pelajaran. Didalam perpustakaan juga disediakan komputer dan juga mesin print.

e) Ruang Bimbingan dan Konseling

Ruangan BK terletak di halaman depan SMA Negeri 1 Mlati dan dekat dengan gerbang sekolah. Ukuran sekitar 4x3 meter yang terdiri dari 2 ruangan. Ruangan pertama terdiri dari 2 pasang meja kursi untuk guru BK, dan ruangan kedua terdapat sofa, meja, dan lemari.

Dalam ruang Bimbingan dan Konseling sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai yaitu 2 printer dan sinyal wifi sehingga memudahkan guru Bimbingan dan Konseling dalam menjalankan tugas. Selain itu, di ruang BK juga terdapat kotak masalah dan papan bimbingan yang merupakan media bimbingan bagi para siswa.

f) Sarana Olahraga

Sarana olahraga yang ada di SMA Negeri 1 Mlati antara lain :

- 1) Lapangan Futsal
- 2) Lapangan Basket
- 3) Gudang untuk menyimpan peralatan olahraga

g) Sarana Penunjang

- 1) Masjid
- 2) Ruang OSIS
- 3) Ruang Piket
- 4) Ruang UKS
- 5) Koperasi Sekolah
- 6) Kamar mandi siswa dan guru
- 7) Tempat parkir siswa
- 8) Tempat parkir Guru dan Karyawan

- 9) Kantin
- 10) Pos satpam

2. Permasalahan

Hasil observasi yang telah dilaksanakan secara garis besar adalah baik. Hanya saja dalam metode pembelajaran guru lebih banyak menggunakan metode konvensional atau ceramah.

3. Potensi Pembelajaran

SMA Negeri 1 Mlati beralamat di Tlogoadi, Cebongan, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Sekolah ini berada di wilayah yang cukup strategis dikarenakan SMA N 1 Mlati tidak berada di tengah kota namun juga tidak terlalu jauh dari kota sehingga terdapat akses umum yang cukup mudah. SMA N 1 Mlati merupakan sekolah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dari hasil pengamatan diperoleh beberapa informasi yang relevan tentang potensi yang dimiliki sekolah yang bisa dijadikan referensi dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan.

4. Kondisi Nonfisik Sekolah

Kondisi nonfisik meliputi kurikulum sekolah, potensi guru, potensi siswa, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar sekolah.

a) Kurikulum Sekolah

Kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Mlati saat ini adalah Kurikulum 2013.

b) Potensi Guru

Guru berjumlah 33 orang sebagian besar berkualifikasi S1 dan beberapa guru berkualifikasi S2. Sebagian berstatus PNS dan beberapa nonPNS. Guru telah mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Guru-guru SMA Negeri 1 Mlati tergolong guru-guru yang memiliki disiplin dan kepedulian yang tinggi hal ini terlihat dari ketepatan mereka masuk kelas setelah tanda bel masuk juga pulang setelah ada bel pulang dan masih banyak lagi indikator yang menunjukkan kedisiplinan dan kepedulian yang tinggi.

c) Potensi Karyawan

Jumlah karyawan ada 11 orang yang terdiri dari Tata Usaha sebanyak 7 orang, bagian perpustakaan 1 orang, pembantu umum 1 orang dan penjaga sekolah atau keamanan 1 orang, bagian laboratorium 1 orang.

d) Potensi Siswa

Potensi peserta didik di SMA N 1 Mlati termasuk aktif, baik ketika didalam kelas maupun di luar kelas, di SMA ini juga mengirimkan peserta didiknya untuk mengikuti olimpiade dan dalam kegiatan ekstra minat

peserta didiknya juga sangat baik. Kuantitas 12 kelas dengan masing-masing angkatan berjumlah 4 kelas, kelas X berjumlah 128 peserta didik, kelas XI berjumlah 128 peserta didik, dan kelas XII berjumlah 121 peserta didik. Jumlah siswa SMA N 1 Mlati dari 12 kelas berjumlah 373 siswa.

Potensi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik sudah menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik.

e) **Potensi Akademik Siswa**

Keterlibatan siswa dalam berkarya ilmiah sudah optimal. Hal ini dibuktikan dari prestasi siswa dibidang seni seperti musik, baca puisi, tonti, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang prestasinya ditingkat Kabupaten, Provinsi, Bahkan Nasional.

f) **Potensi Nonakademik Siswa**

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa meliputi: basket, pramuka, rohis, rokakris, kelompok keolahragaan, kelompok penelitian ilmiah, kelompok ilmu pengetahuan, PMR dll. Siswa unggul dalam bidang keolahragaan, terutama basket dan futsal.

g) **Hubungan Sekolah dengan Lingkungan Sekitar Sekolah**

Dukungan masyarakat sekitar sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah untuk menetapkan berbagai kebijaksanaan guna optimalisasi kinerja sekolah dengan pemberdayaan lingkungan sekolah. Lingkungan SMA Negeri 1 Mlati merupakan lingkungan sekolah. Ada beberapa jenjang pendidikan seperti TK, SD dan SMP. Selain itu, sekolah ini juga berdekatan dengan fasilitas umum seperti pasar, puskesmas, kantor polisi. Walaupun letak sekolah dekat dengan jalan raya, namun sekolah ini mempunyai tata letak yang sangat strategis sehingga suara bising tidak mengganggu jalannya pembelajaran.

B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL/Magang III

1. Perumusan Program PPL/Magang III

Dalam merumuskan program PPL/Magang III lokasi SMP Negeri 5 Depok mahasiswa telah melaksanakan yang dimulai pada tanggal 15 Juli hingga 15 September 2016 :

- a. Sosialisasi dan Koordinasi
- b. Observasi KBM dan Menejerial
- c. Observasi Potensi
- d. Identifikasi Permasalahan
- e. Diskusi Guru dan Kepala Sekolah
- f. Rancangan Program

2. Rancangan Kegiatan PPL/Magang III

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015, rangkaian kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan selama satu bulan antara lain:

a. Tahap Persiapan di Kampus

Tahap persiapan di kampus diawali dengan Pembekalan *Micro Teaching* pada hari Senin dan Rabu, pembekalan mikro ini diberikan oleh Koordinator PPL/Magang III Jurusan PKnH Ibu Eny Kusdarini, M.Hum. dan pembekalan oleh pihak UPPL yang dilaksanakan di Ruang Ki Hadjar Dewantara, Fakultas Ilmu Sosial.

b. Observasi Fisik Sekolah

Tahap ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran tentang sekolah terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi serta fasilitas sekolah yang digunakan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar sebagai tempat mahasiswa melaksanakan praktik mengajar, sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dan menyesuaikan rencana praktik mengajar dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah.

c. Observasi Proses Belajar Mengajar di dalam Kelas

Dalam kegiatan observasi terdapat beberapa tujuan yang dapat diperoleh oleh praktikan, yaitu *pertama* mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan tugas guru sebagai pengajar, dengan obyek pengamatannya adalah kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru pembimbing/guru pamong. *Kedua*, memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai proses belajar mengajar yang berlangsung, seperti metode mengajar yang digunakan, pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar, hambatan atau kendala serta pemecahannya. *Ketiga*, mengetahui suasana dan keadaan kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, seperti antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar

g. Persiapan Perangkat Pembelajaran

Sebelum melaksanakan praktik mengajar, praktikan harus mempersiapkan beberapa perangkat pembelajaran sebagai langkah awal dalam praktik mengajar. Dalam kegiatan persiapan ini mahasiswa mendapat arahan dan bimbingan baik dari guru pembimbing maupun DPL PPL/Magang III Ibu Ervin Iswandayani, S.Pd. Adapun perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh praktikan sebelum melaksanakan kegiatan praktik mengajar antara lain Agenda Kegiatan Belajar Mengajar PKn Semester Gasal, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, dan media pembelajaran.

h. Praktik Mengajar

Praktik mengajar merupakan aspek utama dalam kegiatan PPL/Magang III yang dilaksanakan selama dua bulan. Praktik mengajar yang dilakukan oleh praktikan, merupakan praktik mengajar terbimbing yang artinya dalam kegiatan praktik mengajar, guru pembimbing/guru pamong ikut mengikuti jalannya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas sekaligus memberikan evaluasi dan penilaian terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Praktik mengajar ini merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri, mengembangkan empat kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi profesional, paedagogik, sosial, dan kepribadian, serta memberikan pengalaman mengajar bagi mahasiswa untuk kemudian dapat dijadikan pedoman dalam mengajar.

Praktik mengajar merupakan tahap inti dalam pelaksanaan PPL/Magang III. Dalam praktik mengajar ini mahasiswa praktikan dapat berlatih mengajar dan mengelola kelas dengan berbagai metode dan media pembelajaran interaktif yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti *microteaching* selama satu semester sebelum mengikuti pelaksanaan PPL/Magang III. Selama pelaksanaan PPL/Magang III ini mahasiswa wajib memenuhi praktik mengajar minimal empat kali pertemuan dengan rencana pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap pertemuan. Sesuai dengan pembagian jadwal mengajar oleh guru pembimbing/guru pamong yang bersangkutan maka praktikan melaksanakan praktik mengajar di kelas X IIS 1 dengan alokasi setiap pertemuan 2 x 45 menit (2 jam pelajaran) perminggu untuk kelas XI IPA 1 dengan alokasi setiap pertemuan 2x45 menit (2 jam pelajaran) perminggu, kemudian kelas XI IPS 1 dengan alokasi setiap pertemuan 2x45 menit (2 jam pelajaran) perminggu akan tetapi untuk mendampingi kelas ini praktikan bekerja secara tim dengan praktikan lainnya dengan cara pembagian satu bulan pendampingan setiap masing-masing praktikan.

i. Praktik Persekolahan

Kegiatan praktik persekolahan di SMA Negeri 1 Mlati adalah:

- 1) Upacara Bendera Hari Senin
- 2) Tadarus
- 3) Tes Pemahaman
- 4) Pelatihan Pleton Inti
- 5) Upacara HUT RI
- 6) Pemilihan Ketua OSIS dan anggota
- 7) Latihan Upacara Bendera

- 8) Pemilihan ketua dan anggota rohis
- 9) Piket Sekolah
- 10) Piket Perpustakaan
- 11) Memperingati Hari Raya Idul Adha

j. Penyusunan dan Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis pengumpulan data atau informasi untuk memberikan keputusan (*judgement*) tentang pencapaian suatu tujuan atau kualitas (Muchson, 2012: 3). Dalam kegiatan belajar evaluasi digunakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, seperti pemahaman materi dan perilaku peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas berlangsung. Dalam proses praktik mengajar mahasiswa melakukan penilaian atau evaluasi terhadap dua aspek yaitu proses belajar yang berupa pengamatan perilaku dan kehadiran peserta didik serta hasil belajar yaitu pemahaman peserta didik terkait dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian terhadap pemahaman peserta didik mengenai materi pembelajaran, mahasiswa praktikkan melaksanakan *post test* setiap akhir kegiatan belajar mengajar.

k. Penyusunan Laporan PPL/Magang III

Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan PPL/Magang III, yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PPL/Magang III. Laporan ini bersifat individu. Laporan ini disusun secara tertulis yang kemudian diserahkan kepada guru pembimbing, dosen pembimbing PPL/Magang III, dosen pembimbing *micro teaching* Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum, koordinator PPL/Magang III SMA N 1 Mlati Bapak Suparwanto, S.Pd dan Kepala Sekolah SMA N 1 Mlati Bapak Drs. Aris Sutardi sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa praktikkan selama dua bulan melaksanakan PPL/Magang III.

l. Penarikan PPL/Magang III

Kegiatan penarikan PPL/Magang III dilakukan pada tanggal 14 September 2016 yang sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMA N 1 Mlati.

Demikian tahap-tahap dalam program dan rancangan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan di SMA N 1 Mlati.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN & ANALISIS HASIL

A. Persiapan

Praktik pengalaman lapangan (PPL)/Magang III dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, di mana mahasiswa PPL/Magang III harus benar-benar mempersiapkan diri baik mental maupun fisik. Keberhasilan dari kegiatan PPL/Magang III sangat ditentukan oleh kesiapan dan persiapan mahasiswa sebagai praktikan baik secara akademis, mental maupun ketrampilan. Hal tersebut dapat terwujud karena mahasiswa PPL/Magang III (praktikan) telah diberi bekal sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan PPL/Magang III. Program persiapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan observasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh mahasiswa PPL/Magang III sebelum melaksanakan kegiatan PPL/Magang III di lembaga atau sekolah yang bersangkutan. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah baik fisik, non fisik, kegiatan belajar mengajar di kelas, fasilitas sekolah terutama yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar dan perilaku siswa di lembaga atau sekolah yang bersangkutan. Kegiatan observasi dilakukan dengan dua cara yaitu: pengamatan secara langsung, dan wawancara dengan pihak terkait. Sehingga dengan adanya kegiatan observasi ini mahasiswa memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi fisik dan non fisik sekolah, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, fasilitas sekolah terutama yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar dan perilaku siswa di lembaga atau sekolah yang bersangkutan

Observasi ini meliputi dua hal, yaitu:

a. Observasi Pembelajaran di Kelas

Dalam kegiatan observasi pembelajaran di kelas praktikan melakukan pengamatan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru pembimbing. Kegiatan observasi pembelajaran di kelas memberikan beberapa manfaat kepada praktikan sebelum melakukan praktik mengajar. *Pertama*, memberikan pengetahuan dan pemahaman awal tentang kondisi dan karakteristik siswa, baik di dalam maupun di luar kelas secara umum. *Kedua*, mendapatkan gambaran secara umum tentang metode mengajar guru di kelas, media pembelajaran, dan materi pembelajaran. *Ketiga*, mengetahui cara manajemen kelas yaitu sikap guru dalam menghadapi tingkah laku siswa. Observasi pembelajaran di kelas tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Maret 2016 di kelas XII IPS 1 .

Sasaran observasi pembelajaran di kelas adalah:

- 1) Perangkat Pembelajaran
 - a) Satuan Pembelajaran
 - b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- 2) Proses Pembelajaran
 - a) Cara membuka pelajaran
 - b) Penyajian materi
 - c) Metode pembelajaran
 - d) Penggunaan bahasa
 - e) Gerak
 - f) Cara memotivasi siswa
 - g) Teknik bertanya
 - h) Teknik menjawab
 - i) Teknik penguasaan kelas
 - j) Penggunaan media
 - k) Menutup pelajaran
- 3) Perilaku Siswa
 - a) Perilaku siswa di dalam kelas
 - b) Perilaku siswa di luar kelas
- 4) Administrasi Guru
 - a) Silabus
 - b) Program Tahunan
 - c) Program Semester
 - d) Pembagian Minggu Efektif
 - e) Kisi-Kisi Soal
 - f) Pembuatan Soal
 - g) Analisis Butir Soal

b. Observasi Lingkungan Fisik Sekolah

Kegiatan observasi lingkungan fisik sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Obyek yang dijadikan sasaran observasi lingkungan fisik sekolah meliputi:

- 1) Letak dan lokasi gedung sekolah
- 2) Kondisi ruang kelas
- 3) Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan KBM
- 4) Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di sekolah

Observasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan dengan berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang berlaku dilingkungan sekolah tempat PPL/Magang III. Pengenalan lapangan ini dilakukan dengan cara observasi langsung, dan wawancara

dengan pihak sekolah. Observasi lingkungan fisik sekolah antara lain pengamatan pada:

- 1) Administrasi persekolahan
- 2) Fasilitas pembelajaran dan manfaatnya
- 3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah
- 4) Lingkungan fisik disekitar sekolah

2. Pengajaran Mikro (*Micro Teaching*)

Pengajaran mikro (*micro teaching*) merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh praktikan sebelum mengikuti PPL/Magang III. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh praktikan sebelum mengambil mata kuliah *micro teaching* dan lulus dalam beberapa mata kuliah seperti Strategi Belajar Mengajar PKn, Kububuteks, Evaluasi Pembelajaran PKn. Pengajaran mikro adalah kegiatan praktik mengajar secara terbatas dalam bentuk *micro* atau dalam ruang lingkup yang kecil. Pengajaran mikro mencakup kegiatan orientasi dan observasi proses pembelajaran serta praktik mengajar terbatas dengan model *micro teaching* dengan mahasiswa sebagai siswanya. Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal untuk mengaktualisasikan kompetensi dasar mengajar.

Pelaksanaan pengajaran mikro meliputi :

- a. Waktu pelaksanaan pengajaran mikro dimulai tanggal **27 Maret hingga 30 Mei 2016** yang kurang lebih sekitar 15 kali praktek *micro teaching* dan 1 kali ujian *micro teaching* kemudian 1 kali pengulangan ujian *micro teaching*.
- b. Teknik pelaksanaan

Pengajaran mikro dilaksanakan di Laboratorium PKnH yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Setiati Widiastuti, M.Hum dalam bentuk *micro teaching*. Dalam kegiatan *micro teaching* mahasiswa diberi kesempatan untuk dapat praktik secara langsung dan bergantian dihadapan dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa dalam satu kelompok tersebut. Materi yang akan disampaikan merupakan materi kelas X dengan mengacu pada Kurikulum 2013 dan kelas XI mengacu kepada KTSP, hal ini disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pada saat pelaksanaan PPL/Magang III.

Dengan materi:

- 1) Sistem Hukum dan Peradilan Nasional (Kelas X)
KD 1.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional. Dengan menggunakan acuan KTSP, dimana metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan diskusi. Media yang praktikan gunakan saat *micro teaching* adalah berupa hasta karya yaitu yang dinamai "*bola putar*".

- 2) Nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kelas X)

KD 1.2 Menghargai nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menggunakan acuan Kurikulum 2013, dimana metode yang digunakan adalah saintifik dilengkapi dengan media pembelajaran berupa naskah puisi yang kemudian diharapkan siswa (mahasiswa lainnya sebagai siswa) berdiskusi mengenai naskah puisi mengenai Demokrasi yaitu “Demokrasi Kebun Binatang” karya Taufik Ismail dalam bukunya yang berjudul Katastrofi Mendunia Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma, Narkoba, halaman 282-285

- 3) Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan (Kelas X)

KD 1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara dan penduduk, agama dan kepercayaan pertahanan dan keamanan secara adil. Dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi, dimana metode yang digunakan adalah metode Two Stay Two Stray (TSTS) dengan media berupa video mengenai wilayah NKRI dan kekayaan NKRI serta powerpoint sebagai media untuk konfirmasi.

- 4) Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia (Kelas X)

KD 2.2 Peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dengan acuan Kurikulum 2013 Revisi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah berupa games yaitu dimana guru menunjuk salah satu siswa untuk mengambil lipatan kertas kemudian diminta untuk menjawab atau memaparkan pertanyaan yang ada dan kemudian apabila siswa sudah menjawab maka siswa tersebut akan menunjuk temannya untuk melakukan hal yang serupa dan selanjutnya. Dalam materi ini media pembelajaran yang digunakan berupa “*bank soal*”.

- 5) Menganalisis sistem hukum dan peradilan nasional NKRI (Kelas X)

KD 3.3 Memahami bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi. Metode pembelajaran

yang digunakan adalah berupa diskusi kelas dengan media pembelajaran tajuk.

6) Konsep hak dan asasi manusia (Kelas XI)

KD 1.1 menghayati nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan acuan Kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode eksperimen yang didukung dengan media pembelajaran video fakta/riil dan gambar.

7) Nilai-nilai praksis demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kelas XI)

KD 2.2 Mengamalkan nilai-nilai praksis demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan acuan Kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang digunakan adalah problem solving dan media pembelajaran video.

8) Budaya Politik di Indonesia (Kelas XI)

KD 1.1 Mendeskripsikan Pengertian Budaya Politik. Dengan acuan KTSP . Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang dilengkapi dengan media pembelajran powerpoint dan video riil mengenai budaya politik.

c. Jumlah Latihan Pengajaran Mikro (*Micro Teaching*)

Jumlah Latihan Pengajaran Mikro (*Micro Teaching*) setiap mahasiswa yang telah ditentukan universitas minimal 6 (enam) kali atau yang disesuaikan dengan jumlah waktu pengajaran mikro. Untuk kelompok kami, setiap minggu dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, dimana setiap pertemuan terhitung selama 2 jam dan pernah hingga 3 jam.

Untuk mahasiswa yang praktik mengajar bergilir sesuai dengan kesepakatan kelompok mikro yaitu dengan adanya undian nomor secara langsung. Jumlah mahasiswa yang praktik mengajar dalam setiap pertemuannya berbeda-beda tergantung durasi waktu pada setiap pertemuan. Jadi selama pengajaran micro selama satu semester mahasiswa sudah tampil lebih dari enam kali, saya pribadi tampil di hadapan dosen pembimbing sebanyak delapan kali dengan pperincian enam kali persiapan dan satu kali ujian kemudian satu kali pengulangan ujian. Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Mikro

1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam kegiatan ini mahasiswa membuat RPP yang akan digunakan untuk latihan mengajar dalam kegiatan *micro teaching*, dimana sebelumnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

- 2) Pembuatan media atau alat pembelajaran. Dalam kegiatan ini mahasiswa membuat media atau alat pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung jalannya *micro teaching*. Media atau alat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa misalnya *power point*, tangan hias, media portofolio, *rolling ball*, *name table*, dll.
- 3) Praktik *Micro Teaching*. Dalam kegiatan ini mahasiswa melakukan praktik mengajar dalam bentuk mikro sesuai dengan RPP yang telah dipersiapkan sebelumnya.. Praktik mengajar dalam bentuk mikro ini dilaksanakan di ruang kelas atau laboratorium *micro teaching*, dengan rekan mahasiswa yang lain sebagai muridnya.

d. Pelaksanaan Praktik Pengajaran Mikro

Waktu untuk pengajaran mikro berlangsung selama 15-20 menit.

Aspek ketrampilan dasar mencakup :

- 1) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
- 2) Keterampilan bertanya
- 3) Keterampilan menjelaskan
- 4) Variasi interaksi
- 5) Memotivasi siswa
- 6) Ilustrasi dan penggunaan contoh-contoh
- 7) Pengelolaan kelas
- 8) Keterampilan menggunakan alat
- 9) Memberikan penguatan (*reinforcement*)
- 10) Keterampilan menggunakan metode dan media pembelajaran

Setelah melakukan praktik mengajar, dosen pembimbing dan rekan-rekan satu kelompok tersebut akan memberikan komentar atau kritik dan saran yang membangun. Hal ini sangat berguna bagi mahasiswa agar semakin termotivasi untuk selalu memperbaiki cara mengajarnya dan melakukan variasi-variasi dalam pembelajaran sehingga diharapkan dapat mempersiapkan secara dini sebelum praktik mengajar yang sesungguhnya.

3. Pembekalan PPL/Magang III

Sebelum pelaksanaan PPL/Magang III, mahasiswa diharuskan mengikuti pembekalan PPL/Magang III. Pembekalan PPL/Magang III dilaksanakan dalam dua tahap. Pembekalan PPL/Magang III bertujuan agar mahasiswa mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PPL/Magang III yang harus dilakukan di sekolah. Kegiatan pembekalan disampaikan oleh pejabat UPPL dan Ibu Eny Kusdarini, M.Hum selaku koordinator PPL/Magang III di Fakultas Ilmu Sosial. Adapun materi yang disampaikan dalam pembekalan PPL/Magang III adalah mekanisme pelaksanaan *micro teaching*, kegiatan

praktik mengajar selama PPL/Magang III disekolah, teknik pelaksanaan PPL/Magang III dan teknik untuk menghadapi sekaligus mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi selama pelaksanaan PPL/Magang III.

4. Pembuatan Perangkat Pembelajaran

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengoptimalkan proses mengajar adalah menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan teknik penilaian yang akan digunakan untuk melaksanakan praktik mengajar. Dalam penyusunan persiapan mengajar, praktikan berkonsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL/Magang III.

5. Koordinasi

Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan PPL/Magang III dapat berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan PPL/Magang III mahasiswa melakukan koordinasi dengan rekan-rekan mahasiswa PPL/Magang III di SMAN 1 Mlati, koordinator PPL/Magang III di SMAN 1 Mlati, Kepala Sekolah SMAN 1 Mlati, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selain itu mahasiswa juga melakukan konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL PPL/Magang III. Kegiatan ini dilakukan guna menyusun persiapan perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode dan media pembelajaran, jam mengajar, dan teknik penilaian setiap kali akan melakukan praktik mengajar di dalam kelas.

B. Pelaksanaan PPL/Magang III

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau merupakan tahapan utama untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam mengadakan pembelajaran didalam kelas. Dalam kegiatan praktik mengajar, praktikan dibimbing oleh guru pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing. Praktikan mengajar dengan berpedoman kepada silabus dan RPP yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Penyampaian materi dalam proses belajar mengajar diusahakan terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia.

Pelaksanaan kegiatan PPL/Magang III yang didasarkan pada rumusan program dan rancangan kegiatan PPL/Magang III, pada umumnya berjalan lancar dan baik. Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana latihan mengajar sekaligus wadah untuk membentuk kepribadian calon guru atau pendidik. Dalam kegiatan mengajar ini praktikan diharapkan dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan yang telah diterima untuk menyampaikan materi. Kegiatan yang dilakukan dalam praktik mengajar adalah:

1. Kegiatan sebelum mengajar/persiapan

Sebelum mengajar praktikan harus melakukan persiapan awal yaitu:

- a. Mempelajari bahan yang akan disampaikan
 - b. Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang akan disampaikan
 - c. Mempersiapkan media yang sesuai
 - d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, Buku Pegangan Materi yang disampaikan, Referensi buku yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan)
2. Kegiatan selama mengajar
- a. Membuka Pelajaran

Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah:

- 1) Mengucapkan salam
- 2) Menanyakan kondisi kepada peserta didik
- 3) Mengkondisikan kelas
- 4) Mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing
- 5) Mempresensi siswa
- 6) Guru memberi motivasi dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu nasional atau bentuk lain sesuai dengan kondisi sekolah
- 7) Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan
- 8) Menyampaikan tujuan pembelajaran
- 9) Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan disampaikan

- b. Penyajian Materi

Hal-hal yang dilakukan dalam penyajian materi:

- 1) Penguasaan Materi

Materi harus dikuasai oleh mahasiswa praktikan agar dapat menjelaskan dan memberi contoh dengan benar.

- 2) Penggunaan metode dalam mengajar

Metode yang digunakan dalam mengajar adalah:

- a) Metode Ceramah

Metode ceramah adalah suatu metode pembelajaran dimana guru atau instruktur menyajikan materi pelajaran (presentasi) secara lisan mengenai suatu fakta, atau dalil-dalil atau prinsip. Siswa mengikuti pelajaran dengan mendengarkan, dan mencatat. Kegiatan belajar ceramah biasa diikuti dengan tanya jawab atau diskusi sebagai tambahan variasi kegiatan (metode ceramah bervariasi) (Gafur, 2012: 85).

Metode ini praktikan terapkan pada materi pertama yaitu Budaya Politik di Indonesia dengan kombinasi metode lain di kelas XI IPA 1. Pada hari Kamis 21 Juli 2016. Teknik yang digunakan yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa di kelas yang kemudian adanya umpan balik dari siswa mengenai penjelasan materi terkait. Banyak siswa yang antusias mendengarkan mengenai pembahasan budaya politik karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya macam-macam bentuk budaya demokrasi yang berkembang di Indonesia kemudian dapat mengerti pentingnya budaya politik di Indonesia.

b) Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode mengajar yang menghendaki sekelompok siswa (3 orang atau lebih) membahas suatu masalah ditinjau dari berbagai segi atau sudut pandang. Dalam metode diskusi siswa diharapkan tukar menukar pendapat atau pandangan mengenai suatu topik , permasalahan atau problema untuk pada akhirnya diambil suatu keputusan atau kesimpulan (Gafur, 2012: 81-82). Metode ini bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam mengemukakan pendapat dan bekerjasama dengan teman.

Metode ini praktikan terapkan pada materi pertama yaitu Budaya Politik di Indonesia dengan kombinasi metode lain di kelas XI IPA 1. Pada hari Kamis 21 Juli 2016. Teknik yang digunakan yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa di kelas yang kemudian adanya umpan balik dari siswa mengenai penjelasan materi terkait. Banyak siswa yang antusias mendengarkan mengenai pembahasan budaya politik karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya macam-macam bentuk budaya demokrasi yang berkembang di Indonesia kemudian dapat mengerti pentingnya budaya politik di Indonesia.

c) Metode Permainan (*Games*)

Kegiatan belajar yang menghendaki siswa berkompetisi atau berlomba baik secara fisik maupun mental sesuai aturan

permainan yang telah ditetapkan. Dalam permainan ini harus ada unsur menang dan kalah (Gafur, 2012: 84). Metode ini bertujuan untuk melatih siswa berkompetisi secara sehat dan cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan. Dalam praktik mengajar praktikan banyak menggunakan metode gaming ini misalnya permainan *mix n match*, *quiz team*, dan barter ilmu.

Metode ini praktikan terapkan pada materi mengenai sosialisasi politik dan kombinasi metode lain di kelas XI IPA 1. Pada hari Kamis 28 Juli 2016. Teknik yang digunakan yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa di kelas yang kemudian adanya umpan balik dari siswa mengenai penjelasan materi terkait kemudian di lanjutkan dengan permainan game yaitu seperti dibentuk beberapa kelompok kemudian yang paling cepat membunyikan bell (memukulkan tip-ex ke meja agar menimbulkan bunyi). Banyak siswa yang antusias mendengarkan mengenai pembahasan ini karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat menarik dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya macam-macam bentuk sosialisasi politik yang kerap terjadi di masyarakat kemudian dapat mengerti pentingnya budaya politik di Indonesia.

d) Metode Simulasi

Kegiatan belajar dimana siswa ditugasi untuk memerankan atau menirukan perilaku tokoh-tokoh dalam suatu situasi atau kejadian yang senyatanya (Gafur, 2012: 90). Metode ini bertujuan melatih siswa untuk tampil percaya diri.

Metode ini praktikan terapkan pada materi nilai-nilai Pancasila yang terkait dalam tugas-tugas menteri dengan kombinasi metode lain di kelas X IIS 1. Pada hari Senin 8 Agustus 2016. Teknik yang digunakan yaitu guru menampilkan video mengenai materi terkait yang berkembang di Indonesia dan siswa mendiskusikan dengan menggunakan metode TSTS yang kemudian melakukan praktik simulasi yang kemudian adanya umpan balik dari siswa mengenai penjelasan materi terkait. Banyak siswa yang antusias mengenai pembahasan ini karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari kemudian dipelajari pula dengan metode yang belum pernah mereka

dapat pada pelajaran lain dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya nilai-nilai yang banyak terkandung dalam setiap praktik penyelenggaraan negara.

e) Metode Dramatisasi (*Role Playing*)

Metode mengajar dimana sekelompok siswa ditugsi memerankan atau membawakan suatu cerita atau drama baik cerita fiktif maupun cerita sejarah (Gafur, 2012: 82. Metode ini bertujuan untuk melatih siswa tampil percaya diri, bekerja sama, dan responsif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Metode ini praktikan terapkan pada materi Budaya Politik Partisipan di Indonesia dengan kombinasi metode lain di kelas XI IPA 1. Pada hari Kamis 4 Agustus 2016. Teknik yang digunakan yaitu guru menampilkan video mengenai budaya politik partisipan yang berkembang di Indonesia dan siswa mendiskusikan dengan menggunakan metode TSTS yang kemudian melakukan praktik/dramatisasi/role playing yang kemudian adanya umpan balik dari siswa mengenai penjelasan materi terkait. Banyak siswa yang antusias mengenai pembahasan ini karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari kemudian dipelajari pula dengan metode yang belum pernah mereka dapat pada pelajaran lain dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya budaya politik yang sangat ideal apabila diterapkan di Indonesia yang mana akan menjadi suatu masyarakat dan negara yang lebih baik lagi.

f) Metode Eksperimen

Metode ini berarti peserta didik mempraktikkan secara langsung tentang teori yang disampaikan. Metode ini bertujuan untuk melatih keterampilan peserta didik dalam menggunakan alat-alat praktikum, melatih bekerjasama dengan teman, dan melatih kemampuan siswa dalam menyimpulkan kebenaran konsep yang dipelajari.

Metode ini praktikan terapkan pada materi mengenai wilayah dan kekayaan Negara Republik Indonesia dengan kombinasi metode lain di kelas XI IIS 1. Pada hari Senin 22 Agustus 2016. Teknik yang digunakan yaitu guru menampilkan video mengenai budaya politik partisipan yang berkembang di

Indonesia dan siswa mendiskusikan yang kemudian melakukan analisis masing-masing kelompok yang sudah dibuat sebelumnya dengan adanya umpan balik dari siswa lain saat salah satu kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya mengenai materi terkait. Banyak siswa yang antusias mengenai pembahasan ini karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan banyak sekali kasus yang telah terjadi di Indonesia mengenai sengketa wilayah dengan negara lain. Dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Indonesia dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang belum siswa ketahui.

g) Metode Two Stay Two Stray

Metode ini berarti adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Dengan tujuan mengarahkan peserta didik untuk aktif, baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan menyimak materi yang dijelaskan oleh teman.

Metode ini praktikan terapkan pada materi Budaya Politik Partisipan di Indonesia dengan kombinasi metode lain di kelas XI IPA 1. Pada hari Kamis 4 Agustus 2016. Teknik yang digunakan yaitu guru menampilkan video mengenai budaya politik partisipan yang berkembang di Indonesia dan siswa mendiskusikan dengan menggunakan metode TSTS yang kemudian melakukan praktik/dramatisasi/role playing yang kemudian adanya umpan balik dari siswa mengenai penjelasan materi terkait. Banyak siswa yang antusias mengenai pembahasan ini karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari kemudian dipelajari pula dengan metode yang belum pernah mereka dapat pada pelajaran lain dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham adanya budaya politik yang sangat ideal apabila diterapkan di Indonesia yang mana akan menjadi suatu masyarakat dan negara yang lebih baik lagi.

h) Metode Snowball Throwing

Metode ini merupakan metode yang mengacu pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Metode ini membantu siswa dalam memahami materi dalam pelajaran dengan cara belajar sambil bermain, sehingga dengan demikian diharapkan siswa dapat lebih cepat dalam prosesnya memahami sesuatu materi pelajaran tanpa merasa terbebani ataupun merasa kesulitan.

Metode ini praktikan terapkan pada materi mengenai tugas-tugas kementerian dan Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan kombinasi metode lain di kelas XI IIS 1 dan XI IPA 1. Pada hari Senin 1 Agustus 2016 Kamis 1 September 2016. Teknik yang digunakan yaitu guru menampilkan video mengenai materi yang terkait yang kemudian siswa secara mandiri menimbulkan permasalahan atau pertanyaan mengenai materi terkait di tulis diatas kertas dan kemudian diremas hingga membentuk bola dan cara bermainnya yaitu dilempar kepada teman. Cara melempar bola salju tersebut yaitu secara bersamaan dengan aba-aba dari guru. Banyak siswa yang antusias mengenai pembahasan ini karena menurut siswa pembahasan atau materinya sangat riil dan sangat kerap ditemui di kehidupan sehari-hari kemudian dipelajari pula dengan metode yang belum pernah mereka dapat pada pelajaran lain dengan adanya materi ini siswa menjadi lebih mengerti dan paham mengenai materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru.

c. Menutup Materi

Setelah materi disampaikan, praktikan mengakhiri pelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyimpulkan materi yang telah disampaikan
- 2) Tanya jawab mengenai manfaat yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran serta tindakan atau sikap yang akan dilakukan selanjutnya
- 3) Mengadakan evaluasi
- 4) Memberikan penugasan yang terkait dengan materi yang akan diajarkan pada minggu berikutnya.
- 5) Mengucapkan salam.

d. Evaluasi dan Bimbingan

Guru pembimbing sangat berperan bagi praktikan, karena sebagai mahasiswa yang sedang berlatih mengajar dan mendidik, banyak sekali kekurangan dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar

dikelas. Oleh karena itu umpan balik dari guru pembimbing sangat diperlukan oleh praktikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guru pembimbing selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa praktikan. Baik mengenai materi maupun teknik penguasaan kelas dalam proses praktik mengajar.

Selama melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan, mahasiswa mengajar 2 kelas selama dua bulan masa PPL dan 1 kelas selama satu bulan terakhir masa PPL yaitu kelas XI IPA 1, XI IPS 1 dan X IIS 1. Total jam pelajaran sebanyak 16 JP untuk XI IPA 1 (8 pertemuan), 6 JP untuk kelas XI IPS 1 (3 pertemuan) dan 12 JP untuk kelas X IIS 1 (6 pertemuan) dengan jadwal sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Kelas	Materi
1	Kamis, 21 Juli 2016	XI IPA 1	Pengertian Budaya Politik secara Umum dan Menurut Para Ahli, Komponen-Komponen Budaya Politik, Tipe-Tipe Budaya Politik
2	Senin, 25 Juli 2016	X IIS 1	Makna sistem pembagian kekuasaan negara, Macam-macam pembagian kekuasaan negara.
3	Kamis, 28 Juli 2016	XI IPA 1	Pengertian Sosialisasi Politik secara Umum dan Menurut Para Ahli, Proses Sosialisasi Politik, Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang, Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik
4	Senin, 1 Agustus 2016	X IIS 1	Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya, Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi.
5	Kamis, 4 Agustus 2016	XI IPA 1	Pengertian Partisipasi Politik,

			Konsep Partisipasi Politik, Praktik Partisipasi Politik, Tingkatan Partisipasi Politik
6	Senin, 8 Agustus 2016	X IIS 1	Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.
7	Kamis, 11 Agustus 2016	XI IPA 1	Ulangan Harian BAB 1
8	Senin, 15 Agustus 2016	XI IIS 1	Ulangan Harian BAB 1
9	Kamis, 18 Agustus 2016	XI IPA 1	Pengertian Demokrasi, Pemikiran tentang Demokrasi, Ciri-Ciri Demokrasi, Prinsip-Prinsip Demokrasi, Demokratisasi
10	Jumat, 19 Agustus 2016	XI IPS 1	Pengertian Demokrasi, Pemikiran tentang Demokrasi, Ciri-Ciri Demokrasi, Prinsip-Prinsip Demokrasi, Demokratisasi
11	Senin, 22 Agustus 2016	X IIS 1	Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
12	Kamis, 25 Agustus 2016	XI IPA 1	Konsepsi Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>), Karakteristik Masyarakat Madani, Menuju Masyarakat Madani
13	Jumat, 26 Agustus 2016	XI IPS 1	Konsepsi Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>), Karakteristik Masyarakat Madani, Menuju Masyarakat Madani

14	Senin, 29 Agustus 2016	X IIS 1	Status Warga Negara Indonesia, Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia, Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia, Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.
15	Kamis, 1 September 2016	XI IPA 1	Demokrasi Liberal (17-8-1950 s.d 5-7-1959), Demokrasi Terpimpin (5-7-1959 s.d 1965), Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d 1998), Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d Sekarang).
16	Jumat, 2 September 2016	XI IPS 1	Demokrasi Liberal (17-8-1950 s.d 5-7-1959), Demokrasi Terpimpin (5-7-1959 s.d 1965), Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d 1998), Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d Sekarang).

Umpan Balik dari Pembimbing

Dalam kegiatan praktik mengajar ini praktikkan mendapatkan bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam proses praktik mengajar baik dari guru pembimbing yaitu Ibu Ervin Iswandayani, S.Pd maupun dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL/Magang III Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum.

Pertama, dalam kegiatan praktik mengajar guru pembimbing memberikan masukan terkait dengan penyusunan RPP, yaitu penyusunan indikator, penambahan komponen kegiatan pembelajaran yaitu menyayikan lagu wajib nasional, alokasi waktu dalam kegiatan pembelajaran, dan kegiatan EEK (Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi) dalam kegiatan pembelajaran. *Kedua*, dalam manajemen atau mengelola kelas. Guru pembimbing memberikan saran bahwasanya ketika kegiatan presentasi berlangsung hendaknya peserta didik yang lain diberikan tugas untuk mencatat hasil presentasi, sehingga akan meminimalkan suasana ramai, apabila suasana kelas ramai guru hendaknya diam sambil menunggu keadaan menjadi kondusif kembali, dan lebih tegas ketika mengeur atau memperingatkan peserta didik yang ramai di kelas.

Ketiga, dalam menyusun butir-butir soal. Guru pembimbing memberikan masukan terkait penyusunan butir-butir soal ulangan harian yaitu kisi-kisi butir soal ulangan harian, susunan letak pilihan jawaban, dan model butir soal. *Keempat*, guru pembimbing memberikan evaluasi terkait metode mengajar dimana dalam kegiatan diskusi, hendaknya peserta didik tetap diberikan kesempatan untuk mencatat, agar peserta didik tetap memiliki catatan. *Kelima*, dalam kegiatan praktik mengajar, Dosen Pembimbing Lapangan PPL/Magang III memberikan masukan mengenai metode mengajar yang hendaknya lebih kreatif agar peserta didik memiliki tingkat ketertarikan dan antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan memberikan nasihat mengenai berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki oleh calon guru.

Berbagai bentuk masukan, penilaian, evaluasi, dan saran dari Guru pembimbing, dan Dosen Pembimbing Lapangan PPL/Magang III sangat bermanfaat bagi praktikan, hal ini dikarenakan mahasiswa praktikan menyadari bahwa dirinya masih banyak kekurangan dalam praktik mengajar sehingga memerlukan arahan dan bimbingan yang membangun agar di kemudian hari dapat menjadikan mahasiswa praktikan menjadi guru yang profesional dan berkualitas (Untuk lebih lengkap lihat di lampiran kartu bimbingan DPL PPL/Magang III).

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalisis beberapa hal, diantaranya adalah

1. Analisis Hasil Pelaksanaan

a. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PPL/Magang III

Selama pelaksanaan kegiatan PPL/Magang III yang terhitung sejak tanggal 15 Juli hingga 15 September 2016, mahasiswa praktikan telah mengajar sejumlah 17 kali pertemuan. Setelah melaksanakan praktik mengajar selama 17 kali pertemuan, dapat dianalisis bahwasanya terdapat beberapa hal penting yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. *Pertama*, penguasaan materi oleh guru. Penguasaan materi menentukan keberhasilan kegiatan belajar karena dengan menguasai materi secara lebih mendalam maka kegiatan mentransefer ilmu antara guru dengan peserta didik akan lebih mudah dan berjalan lancar, guru pun akan lebih percaya diri dalam mengajar serta mampu berimprovisasi dengan berbagai contoh yang relevan dengan materi pembelajaran. Dalam kegiatan penyampaian materi hendaknya guru tidak hanya menggunakan metode ceramah karena akan menyebabkan anak menjadi jenuh dan bosan.

Kedua, kemampuan guru dalam manajemen atau mengelola kelas.

Kemampuan guru dalam manajemen atau mengelola kelas menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar karena dengan ketrampilan mengelola kelas, maka seorang guru akan mampu mengendalikan keadaan kelas dengan karakteristik perilaku yang berbeda-beda di antara para peserta didik. Dengan ketrampilan mengelola kelas yang baik maka seorang guru akan dapat meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan dapat merencanakan kegiatan mengajar secara matang dan bervariasi.

Ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sebab dengan pemilihan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar maka tujuan pembelajaran yang direncanakan akan dapat tercapai dengan baik. Dalam kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan cakupan materi pembelajaran dan alokasi waktu yang tersedia.

Keempat, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran merupakan aspek penting yang ikut serta menentukan kegiatan belajar mengajar. Mengingat mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang sedikit membosankan di mata para peserta didik, sehingga guru perlu menggunakan berbagai media pembelajaran kreatif guna meningkatkan ketertarikan dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apabila guru menggunakan media pembelajaran dengan berbagai kreasi dan inovasi maka transfer ilmu antara guru dengan peserta didik akan berlangsung secara menyenangkan dan tidak membosankan. Dalam kegiatan praktik mengajar mahasiswa praktikkan berusaha menampilkan berbagai bentuk media pembelajaran yang mampu menarik perhatian para peserta didik, sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung secara interaktif, dan menyenangkan.

Kelima, kemampuan dalam memotivasi peserta didik. Kemampuan dalam memotivasi peserta didik menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar, karena dengan ketrampilan yang baik dalam memotivasi siswa maka akan menstimulasi peserta didik untuk semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. *Keenam*, kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik. Kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik atau bisa disebut dengan kompetensi sosial juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan mengajar. Sebab dengan adanya kedekatan antara guru dengan peserta didik, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akan lebih santai dan akrab. Peserta didik pun akan merasa nyaman

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan guru akan lebih memahami karakter peserta didik secara mendalam.

b. Manfaat PPL Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan PPL/Magang III merupakan sarana bagi praktikan untuk langsung terjun ke lapangan menerapkan berbagai macam ilmu atau strategi yang berkaitan dengan ketrampilan mengajar ke dunia persekolahan. Dalam pelaksanaan PPL/Magang III yang dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan ini, praktikan mendapatkan berbagai bentuk manfaat yang dapat dijadikan pengalaman belajar bagi praktikan untuk kemudian hari, sehingga praktikan mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Beberapa manfaat yang diperoleh praktikan selama pelaksanaan PPL/Magang III antara lain:

- 1) Praktikan dapat berlatih dalam menyusun persiapan perangkat pembelajaran meliputi agenda kegiatan mengajar PKn satu semester, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- 2) Praktikan dapat berlatih memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan silabus dari berbagai sumber terpercaya disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik sehingga tidak terjadi *bias* informasi.
- 3) Praktikan dapat berlatih memilih metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik perilaku peserta didik.
- 4) Praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan materi yang harus diajarkan, dan kondisi kelas (perilaku peserta didik).
- 5) Praktikan dapat berlatih manajemen atau mengelola kelas sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan interaktif.
- 6) Praktikan dapat berlatih mengalokasikan waktu dalam setiap kegiatan belajar mengajar secara efektif
- 7) Praktikan dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang ditinjau dari proses belajar dan pemahaan materi pembelajaran
- 8) Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai tugas-tugas guru selain mengajar, seperti penyusunan administrasi guru dan kegiatan piket sekolah yang dilakukan oleh guru.

c. Faktor Pendukung

Selama pelaksanaan PPL/Magang III terdapat beberapa faktor yang mendukung praktikan dalam melaksanakan praktik mengajar, antara lain:

- 1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL/Magang III yang memiliki kompetensi profesional dalam pendidikan, yang memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada praktikan sehingga praktikan dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas
- 2) Guru pembimbing dengan sejumlah pengalaman mengajar yang memberikan bimbingan dan arahan kepada praktikan sehingga praktikan mampu memiliki kemampuan dalam mengelola kelas dan memberikan penilaian terhadap praktikan saat praktik mengajar dilaksanakan.
- 3) Peserta didik yang kooperatif dan aktif yang mampu menghidupkan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan produktif
- 4) Fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
- 5) Lingkungan yang kondusif yang mendukung jalannya pembelajaran
- 6) Orang tua yang selalu memberikan dukungan terutama berkaitan dengan peningkatan metode dan media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan antusiasme peserta didik.

d. Hambatan dalam Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan, mahasiswa praktikan mengalami beberapa hambatan pada saat praktik mengajar antara lain:

- a) Masih rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga beberapa siswa membuat gaduh kelas. Beberapa siswa masih suka mengobrol sendiri di kelas.
- b) Praktikan masih merasa belum bisa manajemen waktu pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan RPP.
- c) Peserta didik belum memiliki buku pegangan baik LKS maupun buku paket sehingga peserta didik harus mencari materi di Internet.

a. Solusi Mengatasi Hambatan

- a) Untuk mengatasi siswa yang gaduh di kelas, praktikan menunjuk siswa sumber kegaduhan untuk menjawab pertanyaan sehingga siswa lupa tentang pembicaraan mereka dan konsentrasi untuk menjawab pertanyaan. Selain itu, cara lain untuk mengatasi kegaduhan di kelas adalah mendatangi siswa yang gaduh dan

menanyakan pertanyaan tentang materi yang diajarkan agar siswa kembali berkonsentrasi ke pelajaran.

- b) Dalam menangani masalah manajemen waktu yang kurang baik, praktikan berkonsultasi dengan guru dan dosen pembimbing dan diarahkan untuk dapat memilih metode yang tepat dalam pembelajaran sehingga seluruh tujuan yang direncanakan dalam RPP dapat tercapai.
- c) Dalam menangani masalah keterbatasan buku pelajaran, praktikan memberitahukan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya supaya peserta didik menyiapkan materi.

1. Refleksi

Selama pelaksanaan PPL/Magang III dengan kegiatan utama praktik mengajar, maka dari 17 praktik mengajar yang direncanakan dan telah dilaksanakan oleh praktikan, tampak hasil yang dapat dianalisis dan kemudian direfleksikan untuk kemajuan. Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan praktikan, dapat dianalisis beberapa hambatan yang dihadapi praktikan dalam praktik mengajar, antara lain:

- a. Praktikan merasa belum menguasai materi pembelajaran dengan baik sehingga merasa kesulitan ketika akan berimprovisasi dalam pemberian contoh-contoh aktual pada saat kegiatan belajar mengajar.
- b. Praktikan merasa kesulitan ketika melakukan penilaian dalam kegiatan belajar mengajar seperti diskusi, permainan, *role playing* dan kegiatan belajar mengajar lainnya.
- c. Peserta didik tidak memiliki buku pegangan, sehingga dalam kegiatan mengajar guru merasa kesulitan ketika akan memberikan tugas dan peserta didik pun merasa kesulitan dalam mengulang materi yang diajarkan.
- d. Praktikan sulit mengendalikan peserta didik dalam kegiatan diskusi dan presentasi, sehingga suasana menjadi tidak kondusif.
- e. Seringkali peserta didik merasa bosan dan jenuh ketika pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hal ini dikarenakan mata pelajaran PKn dianggap sebagai mata pelajaran yang teoritis dan monoton.
- f. Praktikan sulit mengendalikan beberapa peserta didik yang berperilaku menyimpang pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti melamun, tidak fokus, pasif, bermain *handphone* dan berbicara dengan teman sebangku di kelas-kelas tertentu misalnya XI IPS 1 yang memang sangat gaduh, tetapi di kelas XI IPA 1 dan X IIS 1 praktikan dapat mengendalikan dengan baik.

- g. Rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh mahasiswa praktikan. Hal ini terlihat dari kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi hanya sebagian siswa saja sedangkan yang lainnya tetap memperhatikan.

Ada beberapa usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, antara lain:

- a. Mempelajari materi pembelajaran secara seksama dan membaca materi-materi yang berkaitan dari berbagai sumber/referensi. Hal ini dilakukan guna menambah pengetahuan dan praktikkan, sehingga praktikkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih dan menghadirkan contoh-contoh aktual di masyarakat kepada peserta didik.
- b. Menggunakan lembar penilaian yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pembelajaran, dan mengamati perilaku peserta didik saat kegiatan belajar mengajar dengan seksama untuk menghindari sikap subyektif dalam penilaian.
- c. Memberikan *handout* materi pembelajaran yang telah diajarkan, sehingga peserta didik dapat belajar kembali materi yang diajarkan di luar jam pelajaran.
- d. Mengkondisikan peserta didik dengan cara menegur dan memberikan nasihat apabila ramai pada saat diskusi berlangsung serta memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencatat hasil presentasi kelompok lain,
- e. Memilih metode pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan karakteristik perilaku peserta didik dan memilih media pembelajaran yang kreatif yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan sikap kreatif dan inovatif peserta didik.
- f. Dalam kegiatan belajar mengajar praktikkan mengajar dengan gaya serius dan santai disisipi dengan lelucon dan motivasi. Selain itu guna mengkondisikan peserta didik, seringkali praktikkan menegur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran yang diajarkan. Praktikkan juga memberikan nasihat dengan cara melakukan pendekatan dengan peserta didik di luar jam pelajaran dan mengajak peserta didik berbicara tentang cita-cita, mata pelajaran yang disenangi, kehidupan keluarga dan kegiatan sehari-hari.

Memberikan "*reward*" kepada siswa yang berprestasi, aktif serta yang memperhatikan dan merespon pelajaran PKn dengan baik. *Reward* yang diberikan berupa hadiah atau ucapan seperti *bagus*, *pintar*, *baik*, *tingkatkan dll*. Sebaliknya apabila terdapat siswa yang kurang tepat

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan atau menanggapi suatu permasalahan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, praktikan tidak langsung menyalahkan siswa tetapi memberikan penguatan dengan cara mengkonfirmasi jawaban yang benar.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil PPL ini adalah kegiatan yang sudah dijalankan selama PPL berjalan dengan lancar, baik proses pembelajaran maupun perlengkapan administratif yang lainnya. Kegiatan PPL ini sangat bermanfaat, karena dalam matakuliah ini, mahasiswa benar-benar merasakan bagaimana menjadi guru. Berbagai permasalahan dan kesulitan yang dihadapi akan membuat mahasiswa belajar dan memahami betapa pentingnya posisi guru dalam kehidupan.

Berdasarkan kegiatan PPL yang telah praktikan laksanakan selama dua bulan ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMA N 1 Mlati telah memberikan pengalaman menjadi seorang guru atau tenaga kependidikan dengan segala tuntutan, seperti persiapan administrasi pembelajaran, persiapan materi dan persiapan mental untuk mengajar siswa di kelas.
2. Praktik pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, memupuk kedisiplinan dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan bagi mahasiswa.
3. Kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Mlati masih perlu usaha keras untuk membangkitkan motivasi siswa, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
4. Sarana dan prasarana yang ada telah memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, namun perlu adanya peningkatan.

B. Saran

1. Kepada Universitas Negeri Yogyakarta

- a) Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan PPL untuk masa datang. Oleh karena itu, perlu disempurnakan dan disosialisasikan lagi dengan baik, karena tidak dipungkiri bahwa masih ada hal-hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa dan sering terjadi salah persepsi antar mahasiswa karena kurang sosialisasi dan bimbingan.
- b) Perlunya koordinasi yang baik antara LPPM dan LPPMP dan melakukan supervisi ke lokasi agar mereka juga mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa PPL. Dengan kegiatan supervisi ini pula diharapkan LPPMP dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi kelompok ataupun kritik yang membangun kelompok menjadi lebih baik lagi.
- c) UPPL lebih sering mengadakan acara diskusi bersama dengan ketua kelompok untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan dilapangan dan mencari solusi atau jalan keluarnya. Dengan demikian diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang sedang mengalami permasalahan atau kesulitan cepat teratasi dan kegiatan PPL berjalan dengan lancar.

2. Kepada Pihak SMA N 1 Mlati

- a) SMA Negeri 1 Mlati sebagai tempat belajar bagi siswa hendaknya menjadi tempat belajar yang sesungguhnya, dimana siswa bebas mengekspresikan potensinya selama tidak menyalahi aturan.

Guru juga hendaknya senantiasa memberikan motivasi baik bagi siswa untuk terus berkarya, berprestasi, dan tidak takut bermimpi. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, dan instansi pendidikan adalah salah satu jawabannya.

- b) Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga kredibilitas SMA N 1 Mlati semakin meningkat di masa mendatang.
- c) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar perlu adanya peningkatan agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.

3. Bagi mahasiswa

- a) Selain penguasaan materi yang matang dan pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kelas, juga diperlukan adanya kesiapan fisik dan mental karena sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran.
- b) Apabila terdapat permasalahan-permasalahan dalam hal pelaksanaan program PPL hendaknya langsung berkonsultasi dengan koordinator PPL sekolah, guru pembimbing sekolah, dan DPL PPL sehingga permasalahan atau kesulitan dapat cepat teratasi.
- c) Hendaknya mahasiswa PPL meningkatkan kualitas dirinya dengan selalu belajar dan tak henti-hentinya memperbaiki diri. Senantiasa menjaga nama baik almamater dan mengabdikan dengan rasa cinta serta kerja-kerja kongkrit sesuai dengan bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Gafur, Abdul. 2012. *Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ombak.

Muchson AR. 2012. *Diktat Kuliah Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FIS, UNY.

TIM PP PPL & PKL LPPM UNY. 2015. *Panduan PPL*. Yogyakarta: UNY PRESS.

TIM PP PPL & PKL LPPM UNY. 2015. *Panduan Pengajaran Mikro*. Yogyakarta: UNY PRESS

TIM PP PPL & PKL LPPM UNY. 2015. *Materi Pembekalan Pengajaran Mikro PPL 1*. Yogyakarta: UNY PRESS.

Udin Syaifudi Sa'ud, dkk. 2005. *Perencanaan Pendidikan suatu pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

LAMPIRAN 1

MATRIKS KEGIATAN

NAMA SEKOLAH : SMA Negeri 1 Mlati
ALAMAT SEKOLAH : Tlogoadi, Cebongan, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
GURU PEMBIMBING : Ervin Iswandayani, S.Pd.

No.	NAMA KEGIATAN										Februari					Maret					April					Mei					Juni					Juli					Agustus					September					JUMLAH JAM																							
	MINGGU KE										1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	R	P																																
A.	PROGRAM KELOMPOK																																																																									
	PROGRAM FISIK																																																																									
	1. PERENCANAAN										R		2						2		2				2																10																																	
											P		2						2		2				2																																																	
	2. OBSERVASI										R			10																											10	11																																
											P			10																											10	10																																
	3. PIKET PERPUSTAKAAN										R														2	2	2				2	2	2	2	2	2	2	2			22																																	
											P														2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			22	22																																	
	4. PIKET RUANG PIKET										R														2	2	2				2	2	2	2	2	2	2	2			22																																	
											P														2	2	2				2	2	2	2	2	2	2			22	22																																	
	5. PERAYAAN HUT RI KE-71										R																															3																																
											P																													4	4																																	
	6. PERINGATAN IDUL ADHA										R																															7																																
											P																													5	5																																	
	PROGRAM AKADEMIK																																																																									
	1. UPACARA BENDERA										R																															10																																
											P																															8																																
	2. UPACARA HUT RI KE-71										R																															2																																
											P																															3.5	3.5																															
	PROGRAM KESISWAAN																																																																									
1. PEMILIHAN ROHIS										R																															2																																	
										P																															4	4																																
2. PEMILIHAN KETUA OSIS										R																															2																																	
										P																															4	4																																
INSIDENTAL																																																																										

Keterangan

R : ditulis dengan warna merah

P : ditulis dengan warna hitam

Dosen Pembimbing Lapangan

Ketua Kelompok

Reza Widayaka
NIM 13406244018

LAMPIRAN 2

LAPORAN MINGGUAN



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin Iswandayani, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 22 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none">Penerjunan PPL 2016 dari DPL ke pihak sekolah	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan diikuti oleh seluruh peserta PPL 2016 dari UNY yang berjalan dengan lancar dan kondusif dari awal hingga akhir.		



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
2.	Kamis, 3 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none">• Observasi Kondisi dan Keadaan Kelas serta lingkungan sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan ini dilakukan secara induvidu dari setiap masing-masing anggota PPL. Saat pelaksanaan observasi saya bersama dengan teman satu jurusan saya bersama-sama mengobservasi kegiatan pembelajaran dikelas dan melakukan kegiatan pengenalan lingkungan di sekolah SMA N 1 Mlati.		



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
3.	Senin 18-7-2015	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera• Konsultasi• Bimbingan• Obsevasi• Mencari bahan materi ajar	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan didikuti oleh semua warga sekolah dan mahasiswa PPL berjalan dengan kondusif dari awal sampai akhir• Pembagian jam kerja efektif untuk KBM• Pembagian jam kerja piket harian		



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
4.	Selasa, 19 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Konsultasi RPP• Tugas Piket jam ke 1-3• Piket Perpustakaan 4-5	<ul style="list-style-type: none">• Pada saat konsultasi saya beserta guru pembimbing disekolah saling sharing mengenai silabus dan RPP terlebih pada pembuatan RPP untuk kurikulum 2013 ini banyak terdapat kabar simpang siur, dan disitulah saya dengan guru pembimbing saling bertukar informasi.		



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
5.	Rabu, 20 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Membuat media pembelajaran untuk kelas XI• Membuat RPP kelas X• Tugas Piket jam ke 4-5• Piket Perpustakaan jam ke 6-8	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui sistem kerja para petugas piket dan membantu kinerja para karyawan sehingga memudahkan pekerjaan tepat waktu• Memberi Cap Perpus untuk buku-buku yang baru datang, memberi kode pada masing-masing buku.		



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
6.	Kamis, 21 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas XI IPA 1Mengoreksi pemahaman soal yang telah diberikan di kelas XI	<ul style="list-style-type: none">Menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah kemudian disertai dengan diskusi siswa disertai dengan penayangan video. Materi pelajaran yang disampaikan mengenai budaya politik di Indonesia.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
7.	Jumat, 22 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Mulai menyusun RPP untuk materi atau bab pembahasan selanjutnya untuk kelas XI• Konsultasi dengan Guru Pamong• Membuat media pembelajaran kelas X	<ul style="list-style-type: none">• Sudah mulai menyusun RPP untuk bab selanjutnya pada kelas XI tetapi belum selesai• Konsultasi pembuatan PROTA dan PROSEM	<ul style="list-style-type: none">• Saat pembuatan RPP, listrik disekolahan padam hal tersebut menyebabkan tidak dapat mengakses komputer/laptop dikarenakan battery laptop <i>low</i>	<ul style="list-style-type: none">• Harus lebih memperhatikan kondisi laptop agar tidak terjadi hal serupa lagi.



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
8.	Senin, 25 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara Bendera• Konsultasi/Bimbingan sebelum masuk ke kelas• Masuk kelas/ KBM jam ke 4-5• Mencari materi pembelajaran/video melalui youtube	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera rutin• Sebelum masuk KBM di kelas X IIS 1 dimulai pada jam pelajaran 1 & 2 saya melakukan persiapan terlebih dahulu dengan berkonsultasi pada guru pembimbing.• Pada KBM berlangsung materi pertama yaitu mengenai pembagian kekuasaan negara RI, di dalam kelas saya sedikit menjelaskan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi.	<ul style="list-style-type: none">• Karena belum ada LKS/buku pegangan maka dari itu peserta didik memiliki kesulitan karena belum belajar sebelumnya.	



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin Iswandayani, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
10.	Selasa, 26 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Masuk kelas/ KBM kelas XII IPS 2• Piket perpustakaan jam 4-6• Piket depan jam 7-8	<ul style="list-style-type: none">• Menggantikan guru pembimbing (Ibu Ervin) untuk mengisi KBM di kelas XII IPS 2 kemudian dilanjutkan dengan tugas.• Piket rutin di depan dan perpustakaan	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
11.	Rabu, 27 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan jam ke 4-6• Piket depan jam ke 7-8• Mencari referensi bacaan untuk materi yang akan diajarkan selanjutnya	<ul style="list-style-type: none">• Piket rutin• Mencari materi ini saya lakukan di perpustakaan agar suasana lebih kondusif dengan membaca buku-buku PKN dan dibantu oleh Google untuk pencarian arti kata yang mungkin agak sulit saya pahami	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
12.	Kamis, 28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/ KBM jam ke 5-6Konsultasi pembuatan format kisi-kisi	<ul style="list-style-type: none">Pada pertemuan ke dua ini saya melanjutkan materi selanjutnya mengenai sosialisasi politik dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan game.Konsultasi dengan guru pamong membahas format pembuatan kisi-kisi		



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
13	Jumat, 29 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Mengoreksi pekerjaan siswa/peserta didik• Monitoring bersama guru pamong	<ul style="list-style-type: none">• Mengoreksi hasil tugas baik dari kelas XI maupun kelas X• Monitoring mengenai kinerja saya dalam mengajar guru pamong memberikan kritik dan saran untuk kemajuan proses cara mengajar yang baik dan penguasaan kelas yang baik	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
13	Senin, 1 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera• Masuk kelas/ KBM jam ke 4-5 di kelas X IIS 1	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera rutin• Pada pertemuan ke dua di X IIS 1 saya menyampaikan materi selanjutnya tentang tugas-tugas kementrian kemudian menerapkan metode snowball throwing.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
14.	Selasa, 2 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan jam ke 1 sampai 3• Piket depan jam ke 6 sampai 8	<ul style="list-style-type: none">• Pada jadwal piket perpustakaan saya dengan rekan piket bersama-sama menata buku dan menjaga kelancaran para siswa dalam meminjam dan mengembalikan buku.• Piket depan saya menjaga di ruang piket seperti biasanya.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
15.	Rabu, 3 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket perpustakaan jam ke 4 sampai 5• Piket depan jam ke 6 sampai 8• Mencari bahan referensi untuk materi selanjutnya	<ul style="list-style-type: none">• Saat piket perpustakaan saya hanya menjaga perpustakaan saja.• Seperti biasanya saya dan rekan piket depan menjaga ruang piket dan melayani bagi anak-anak yang akan izin masuk atau keluar kelas.• Mencari referensi di perpustakaan	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
16.	Kamis, 4 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/ KBM jam ke 5 sampai 6 di kelas XIKonsultasi dengan guru pamongPembuatan Soal UH 1 untuk kelas X dan XI	<ul style="list-style-type: none">Pada pertemuan ke tiga dalam mata pelajaran PKn ini menampilkan peran serta budaya politik partisipan dengan metode two stay two stray.Konsultasi mengenai penilaian siswa	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
17.	Jumat, 5 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Bimbingan dengan guru pamongKonsultasi Soal UH 1 kelas X dan XI	<ul style="list-style-type: none">Pada kegiatan ini saya melakukan bimbingan dengan guru pamong dan membicarakan banyak hal mengenai prota, prosem, dan konsultasi serta revisi RPP.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
18.	Senin, 8 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera• Masuk kelas/ KBM jam ke 4 sampai 5 di kelas X IIS 1	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera rutin• Pada pertemuan yang ketiga ini saya menghendaki siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas secara kelompok untuk membahas mengenai praktik kewarganegaraan nilai-nilai pancasila dalam pemerintahan Indonesia	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
19.	Selasa, 9 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan jam ke 1 sampai 3• Piket depan jam ke 6 sampai 8• Pembuatan media pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Ketika piket perpustakaan saya menjaga perpustakaan.• Saat jaga piket depan saya membantu merekap nama-nama anak yang terlambat masuk kelas dan izin keluar.• Menyusun media pembelajaran powerpoint	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
20.	Rabu, 10 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket perpustakaan jam ke 4 sampai 5• Piket depan jam ke 6 sampai 8	<ul style="list-style-type: none">• Piket perpustakaan saya menjaga dan menertibkan siswa yang berada di perpustakaan agar kondisi lebih kondusif.• Piket depan saya menjaga ruang piket.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
21.	Kamis, 11 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/ KBM jam ke 5 sampai 6 di kelas XI IPA 1Mengoreksi sebagian hasil UH I	<ul style="list-style-type: none">Pada kegiatan KBM kali ini diisi dengan ulangan harian I.	<ul style="list-style-type: none">Ada satu meja bagian belakang siswa membuka handphone untuk mencoba mencari jawaban.	<ul style="list-style-type: none">Sebelum memulai ulangan harian seharusnya saya melakukan perjanjian dengan siswa untuk mengantisipasi adanya kegiatan contek-mencontek dengan menawarkan beberapa sanksi.Seluruh alat komunikasi dan buku pelajaran/LKS diletakkan di atas meja atau tas di taruh di depan meja.



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
22.	Jumat, 12 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Mengoreksi hasil ulangan	<ul style="list-style-type: none">Saya mengoreksi hasil ulangan harian I yang belum dikoreksi	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
23.	Senin, 15 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera• Masuk kelas/ KBM jam 4 sampai 5 di kelas X IIS 1	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bnendera rutin• Pada pertemuan keempat digunakan untuk melaksanakan ulangan harian I.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
24.	Selasa, 16 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan jam ke 1 sampai 3• Piket depan jam ke 6 sampai 8	<ul style="list-style-type: none">• Saya dan rekan pada piket perpustakaan menata koleksi buku-buku baru.• Menjaga ruang piket bersama rekan dan memberikan titipan tugas dari guru yang berhalangan hadir.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
25.	Rabu, 17 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none">Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 71	<ul style="list-style-type: none">Upacara dimulai pada pukul 7 hingga selesai. Pada saat upacara HUT RI ke 71 peserta upacara lebih kondusif dari pada upacara hari senin.Tidak ada KBM.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
26.	Kamis, 18 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/ KBM jam ke 5 sampai 6 di kelas XI IPA 1	<ul style="list-style-type: none">Pada pertemuan yang ke lima ini masuk ke materi baru yaitu budaya demokrasi menuju masyarakat madani dilakukan dengan metode diskusi dan presentasi.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
27.	Jumat, 19 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/ KBM jam ke 1 samapi 2 di kelas XI IPS 1	<ul style="list-style-type: none">Pada KBM kali ini saya rolling dengan rekan PPL dari satu jurusan untuk bekerja secara TIM untuk membersamai KBM di kelas ini.Pertemuan kelima bagi siswa dan pertama bagi saya melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani dengan metode diskusi presentasi.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
28.	Senin, 22 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara Bendera• Masuk kelas jam ke 4 sampai 5 di kelas X IIS 1	<ul style="list-style-type: none">• Upacara bendera rutin• Pada pertemuan ke lima ini masuk ke materi baru yaitu mengenai wilayah negara RI dimana dalam pembelajaran saya memutar video terlebih dahulu untuk memunculkan pertanyaan dari siswa kemudian dianalisis oleh siswa dan dipresentasikan	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
29.	Selasa, 23 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan jam ke 1 sampai 3• Piket depan jam ke 6 sampai 8	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga perpustakaan dan merapihkan buku.• Menjaga ruang piket dan merekap data siswa yang terlambat dan izin serta pulang lebih cepat.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
30.	Rabu, 24 Agustsus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket perpustakaan jam ke 4 sampai 5• Piket depan jam ke 6 sampai 8	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga kondisi perpustakaan dan menata buku-buku.• Menjaga ruang piket bersama rekan.	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
31.	Kamis, 25 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas jam ke 5 sampai 6 di kelas XI IPA 1	<ul style="list-style-type: none">Membahas mengenai masyarakat madani dengan metode pembelajaran kooperatif learning.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
32.	Jumat, 26 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas jam ke 5 sampai 6 di kelas XI IPS 1Mengoreksi hasil ulangan dan menganalisis hasil ulangan kelas X IIS 1	<ul style="list-style-type: none">Pada pertemuan ke enam ini membicarakan mengenai masyarakat madani dengan metode pembelajaran kooperatif learning.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
33.	Senin, 29 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">Upacara benderaMasuk kelas/KBM ke kelas X IIS 1	<ul style="list-style-type: none">Upacara bendera rutinPada pertemuan yang ke enam ini melanjutkan menyelesaikan diskusi dan presentasi dari materi minggu lalu.	<ul style="list-style-type: none">Pada hari ini ada pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan setelah upacara bendera selesai hingga sekitar pukul 11. Karena itu jam pada satu jam pelajaran menjadi 25 menit saja.	<ul style="list-style-type: none">Lebih dapat mengatasi apabila terjadi hal-hal yang sifatnya mendadak.



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
34.	Selasa, 30 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan• Piket depan	<ul style="list-style-type: none">• Piket rutin seperti biasanya di ruang piket dan perpustakaan.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
35.	Rabu, 31 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan• Piket depan	<ul style="list-style-type: none">• Piket rutin seperti biasa yang dilakukan di ruang piket dan perpustakaan.• Piket perpustakaan saya membenatu menata buku-buku yang sudah mulai berantakan karena telah dibaca oleh siswa.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
36.	Kamis, 1 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/KBM di kelas XI IPA 1Mengoreksi hasil tes pemahaman siswa.	<ul style="list-style-type: none">KBM dilaksanakan pada jam pelajaran ke 5-6 dengan materi Demokrasi Liberal (17-8-1950 s.d 5-7-1959), Demokrasi Terpimpin (5-7-1959 s.d 1965), Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d 1998), Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d Sekarang).	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
37.	Jumat, 2 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/KBM di kelas XI IPS 1Mengoreksi hasil tes pemahaman siswa.Menarik tugas analisis wacana “masyarakat madani” yang telah di berikan minggu lalu.	<ul style="list-style-type: none">KBM jam 1-2 ini diisi dengan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Demokrasi Liberal (17-8-1950 s.d 5-7-1959), Demokrasi Terpimpin (5-7-1959 s.d 1965), Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d 1998), Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d Sekarang).	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
38.	Senin, 5 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Masuk kelas/KBM di kelas X MIPA 1Mulai menyusun laporan PPL.	<ul style="list-style-type: none">Menggantikan Ibu Ervin untuk mengawasi peserta didik dalam melakukan presentasi.Mulai menyusun draf kasar untuk laporan PPL.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
39.	Selasa, 6 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Piket PerpustakaanPiket depan	<ul style="list-style-type: none">Piket rutin di ruang piket dan perpustakaan.	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
40.	Rabu, 7 September 2015	<ul style="list-style-type: none">• Piket Perpustakaan• Piket depan• Mulai menyusun laporan PPL	<ul style="list-style-type: none">• Piket rutin seperti biasa yang dilakukan di ruang piket dan perpustakaan.• Mulai melanjutkan menyusun laporan PPL.	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
41.	Kamis, 8 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Menyusun RPP yang sudah di buat sebelumnya untuk dijadikan lampiran dalam laporan PPL	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan dilakukan dengan baik dengan bimbingan dari guru pembimbing PPL.	-	-



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
42.	Jumat, 9 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Menyelesaikan dan merapihkan kelengkapan administrasi guru.	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan di damping oleh guru pembimbing PPL.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02

untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
43.	Senin, 12 September	<ul style="list-style-type: none">Monitoring dari pihak LPPM dan pihak sekolah.Menjutkan penyusunan laporan PPL	<ul style="list-style-type: none">Monitoring berjalan dengan baik dimana berlangsung kurang lebih selama 2 jam.Melanjutkan penyusunan laporan PPL.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH : SMA N 1 MLATI
ALAMAT SEKOLAH : CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
GURU PEMBIMBING : Ervin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NO. MAHASISWA : 13401241012
FAK./JUR./PRODI : FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
DOSEN PEMBIMBING : Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
44.	Selasa, 13 September 2016	• Melanjutkan penyusunan laporan PPL	• Dalam melanjutkan penyusunan laporan PPL ini dibantu oleh guru pembimbing PPL agar tidak banyak terjadinya kesalahan dalam penyusunan terutama pada bagian administrasi guru.	-	-



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL

F02untuk
mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA SEKOLAH	:	SMA N 1 MLATI	NAMA MAHASISWA	:	Gista Ceri Aprasnja Paramitha
ALAMAT SEKOLAH	:	CEBONGAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN	NO. MAHASISWA	:	13401241012
GURU PEMBIMBING	:	Ervin, S.Pd	FAK./JUR./PRODI	:	FIS/PEND. KEWARGANEGARAAN
			DOSEN PEMBIMBING	:	Setiati Widiastuti, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
45.	Rabu, 14 September 2016	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan Pembuatan Laporan PPLPenarikan PPL UNY 2016	<ul style="list-style-type: none">Melanjutkan membuat laporan PPL.Penarikan PPL UNY diadakan di ruangan Lab. Fisika dimana dihadiri oleh seluruh praktikan, guru pembimbing, kepala sekolah, koordionator PPL sekolah, dan DPL.	-	-

Mlati, 14 September 2016

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Lapangan

Dra. Mawanti Widyastuti, M.Pd
NIP. 19580520 198603 2 001

Guru Pembimbing

Setiati Widiastuti, M.Hum
NIP. 19600328 198403 2 001

Mahasiswa,

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM 13401241012

LAMPIRAN 3

LAPORAN HARIAN

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM DAN PELAKSANAAN HARIAN

Mata pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Semester : 1 (ganjil)

Tahun Pelajaran : 2016/2017

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kamis, 21 Juli 2016	XI A 1	5-6	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik di Indonesia 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia	1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 2. Mengidentifikasi budaya politik menurut para ahli 3. Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik 4. Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. 5. Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.	Metode: Ceramah dan diskusi	31 Orang		-
Senin,	X S 1	4-5	1.1Mensyukuri	1.1.1 Mensyukuri	Metode:	31	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 Juli 2016			keberadaa n nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyeleng garaan pemerintah an negara sebagai salah satu bentuk pengabdian n kepada Tuhan Yang Maha Esa	adanya praktik penyelenggara an pemerintahan negara tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 1.1.2 Mensyukuri adanya praktik penyelenggar aan pemerintahan Negara tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara	Diskusi.	Orang		

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Republik Indonesia.				
Kamis, 28 Juli 2016	XI A 1	5-6	1.3 Mendeskripsik an pentingnya sosialisasi pengembanga n budaya politik	1. Mendeskripsik an pengertian umum mengenai sosialisasi pengembanga n politik 2. Mendeskripsik an pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembanga n budaya politik 3. Mengidentifika si proses sosialisasi politik 4. Mendeskripsik an sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang 5. Memetakan sosialisasi	Metode Ceramah. Materi PPT, Snowball Throwing.	31 Orang	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				politik dan komunikasi politik				
Senin, 1 Agustus 2016	X S 1	4-5	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	2.1.1 Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 2.1.2 Peserta didik menunjukkan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi	Metode : Diskusi, Snowball Throwing, Materi PPT	30 orang	-	Mulai di beri tugas rumah/ PR.

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian. Negara RI.				
Kamis, 4 Agustus 2016	XI A 1	5-6	1.4Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik. 2. Memetakan konsep partisipasi politik. 3. Mengaplikasikan praktik partisipasi politik. 	Metode diskusi two stray two stay (TSTS) dan penayangan video, materi PPT.	31 orang	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik.				
Senin, 8 Agustus 2016	X S 1	4-5	3.1Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	1. Praktik kewarganegaraan nilai-nilai pancasila dalam pemerintahan Indonesia	Metode diskusi.	Nihil	-	-
Kamis, 11 Agustus 2016	XI A 1	5-6		Ulangan Harian I	-	31	Adanya siswa yang mencontek sehingga mengganggu konsentrasi siswa yang lain.	-
Senin, 15 Agustus 2016	X S 1	4-5		Ulangan Harian I	-	27	-	Ulangan berjalan dengan kondusif, siswa di kelas X S 1 mulai hari Senin 15 Agustus 2016 berubah menjadi 28 anak karena 3

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								anak diantara mereka pindah ke kelas X A.
Kamis, 18 Agustus 2016	XI A 1	5-6	2.1Mendeskr sikan pengertian dan prisnip- prinsip budaya demokrasi.	1. Mendeskripsik an pengertian Demokrasi. 2. Mengidentifika si pemikiran tentang Demokrasi. 3. Menganalisis ciri-ciri Demokrasi. 4. Memahami prinsip-prinsip Demokrasi. 5. Mendeskripsik an Demokratisasi	Metode ceramah, diskusi, presentasi.	31 orang	-	-
Jumat, 19 Agustus	XI S 1	1-2	2.1Mendeskr sikan pengertian dan prisnip- prinsip budaya demokrasi.	1. Mendeskripsik an pengertian Demokrasi. 2. Mengidentifika si pemikiran tentang Demokrasi. 3. Menganalisis ciri-ciri	Metode ceramah dan penayangan video pemetaan wilayah Indonesia, materi PPT, Penugasan	Nihil	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Demokrasi. 4. Memahami prinsip-prinsip Demokrasi. 5. Mendeskripsikan Demokratisasi				
Senin, 22 Agustus 2016	X S 1	4-5	2.2Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan	1. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara 2. Peserta didik menganalisis	Metode : Menampilkan video mengenai pemetaan wilayah negara dan kekayaan negara, menampilkan PPT, Inquiri.	Nihil	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			an, pertahana n dan keamanan	batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia. 3. Peserta didik menganalisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Kamis, 25 Agustus 2016	XI A 1	5-6	2.2Mengidentif ikasi ciri-ciri masyarakat	1. Mendeskripsik an konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>)	Metode : Ceramah, Diskusi.	Nihil	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			madani.	2. Mengidentifika si karakteristik masyarakat madani 3. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani				
Jumat, 26 Agustus 2016	XI S 1	1-2	2.1Mengidentif ikasi ciri- ciri masyaraka t madani.	1. Mendeskripsik an konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>) 2. Mengidentifika si karakteristik masyarakat madani 3. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	Metode : Ceramah, Diskusi.	31 Orang	-	-
Senin, 29 Agustus 2016	X S 1	4-5	2.3Menganalisi s ketentuan Undang- undang	3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis ketentuan	Metode : Presentasi	Nihil		

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara</p> <p>3.1.2 Peserta didik menganalisis batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>3.1.3 Peserta didik menganalisis Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>				

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM						Pelaksanaan		
Hari/ Tanggal	Kelas	Jam Ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Alat/Bahan/ Metode	Absensi	Hambatan/Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kamis, 1 Septemb er 2016	XI A 1	5-6	2.3Menganalisi s pelaksanaa n demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi	1. Mengidentifikasi demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi 2. Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi	Materi PPT, Ceramah, Kuis, Two Stay Two Stray (TSTS)	Nihil	-	-
Jumat, 2 Septemb er 2016	XI S 1	1-2	2.3Menganalisi s pelaksanaa n demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi	.1. Mengidentifikasi demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi 2. Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi	Materi PPT, Ceramah, Kuis, Two Stay Two Stray (TSTS)	Nihil	-	-

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PPH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

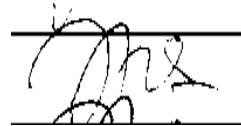
Mlati, 18 Juli 2016

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM 13401241012

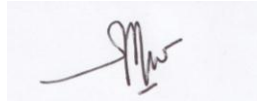
Guru Pembimbing PPL



Setiati Widiastuti, M.Hum
NIP. 19600328 198403 2 001

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Lapangan



Dra. Mawanti Widyastuti, M.Pd
NIP. 19580520 198603 2 001

LAMPIRAN 4

LAPORAN DANA



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016

F01

Untuk Mahasiswa

Nomor Lokasi :

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Alamat Sekolah : Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman

No	Nama Kegiatan	Hasil Kuantitatif/ Kualitatif	Serapan Dana (Dalam Rupiah)				Jumlah
			Swadaya/ Sekolah/ Lembaga	Mahasiswa	Pemda Kabupaten	Sponsor/ Lembaga Lainnya	
1.	Print RPP	Kuantitatif : sebanyak 12 RPP siap untuk digunakan sebagai acuan lebih baik dalam mengajar. Kualitatif : RPP lebih baik daripada sebelumnya setelah direvisi.	-	Rp 27.500,-	-	-	Rp 27.500,-

2.	Print LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Wacana Masyarakat Madani	<p>Kuantitatif : sebanyak 8 LKPD (@5lembar) sudah diprint dan siap digunakan siswa sebagai petunjuk dalam mengerjakan tugas</p> <p>Kualitatif : LKPD sudah tersusun dengan baik</p>	-	Rp 6.800,-	-	-	Rp 6.800,-
3.	Print LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Pembagian Wilayah Negara	<p>Kuantitatif : sebanyak 8 LKPD sudah diprint dan siap digunakan siswa sebagai petunjuk dalam mengerjakan tugas</p> <p>Kualitatif : LKPD sudah tersusun dengan baik</p>	-	Rp 1.200,-	-	-	Rp 1.200,-
4.	Print soal Ulangan Harian “Budaya Politik di Indonesia	<p>Kuantitatif : sebanyak 25 soal (@7lembar) yang akan diberikan untuk evaluasi setelah mengajar siap digunakan.</p> <p>Kualitatif : soal lebih baik</p>	-	Rp 33.600,-	-	-	Rp 33.600,-

		daripada sebelumnya setelah dikonsultasikan dengan guru pembimbing					
5.	Print materi pembelajaran/ bahan ajar	<p>Kuantitatif : sebanyak 67 lembar penilaian afektif (@ 1 lembar) yang akan diisi sudah diprint.</p> <p>Kualitatif : lembar penilaian afektif sudah tersusun dengan benar.</p>	-	Rp 9.200,-	-	-	Rp 9.200,-
6.	Print soal Ulangan Harian “Pembagian Kekuasaan Negara”	<p>Kuantitatif : sebanyak 25 soal (@6lembar) yang akan diberikan untuk evaluasi setelah mengajar siap digunakan.</p> <p>Kualitatif : soal lebih baik daripada sebelumnya setelah dikonsultasikan dengan guru pembimbing</p>	-	Rp 25.200,-	-	-	Rp 25.200,-
7.	Print soal Remidi “Budaya Politik di	Kuantitatif : sebanyak 10 soal	-	Rp 600,-	-	-	Rp 600,-

	Indonesia”	(@1lembar) sudah diprint dan siap digunakan. Kualitatif : soal remidi sudah tersusun dengan baik dan rapih.					
8.	Print soal Remidi “Pembagian Kekuasaan Negara”	Kuantitatif : sebanyak 5 soal (@1lembar) sudah di print dan siap digunakan. Kualitatif : soal remidi sudah tersusun dengan baik dan rapih.	-	Rp 2.400,-	-	-	Rp 2.400,-
9.	Foto copy perangkat pembelajaran dari guru pembimbing	Kuantitatif : sebanyak 2 buku pegangan dan 1 buuku LKS lembar telah dicopy yang digunakan sebagai acuan mahasiswa. Kualitatif : perangkat pembelajaran yang sudah dicopy digunakan sebagai acuan.	-	Rp 55.000,-	-	-	Rp 55.000,-
	Jumlah		-	Rp161.500,-	-	-	Rp 161.500,-

Mlati, 16 September 2016

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Drs. Aris Sutardi

NIP. 19640128 199003 1 003

Setiati Widiastuti, M.Hum

NIP. 19600328 198403 2 001

Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIM. 13401241012

LAMPIRAN 5

KARTU BIMBINGAN

PPL



KARTU BIMBINGAN PPL/MAGANG III DI SEKOLAH/ LEMBAGA

PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY

TAHUN 2016

F04

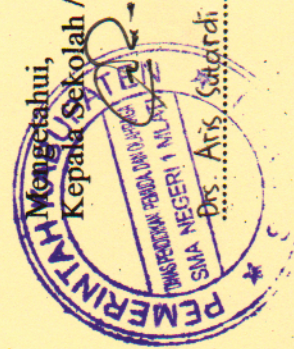
UNTUK MAHASISWA

Nama Sekolah/ Lembaga : SMA Negeri 1 Mlati
Alamat Sekolah/ Lembaga : Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta Fax./ Telp. Sekolah/Lembaga :
Nama DPL PPL/ Magang III : Setiati Widiastuti, M.Hum
Prodi / Fakultas DPL PPL/ Magang III : Pkn/ Fakultas Ilmu Sosial
Jumlah Mahasiswa PPL/ Magang III :

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PPL/ Magang III
1	Selasa, 9/8'16	2	RPP		
2	Senin, 15/8'16	2	Penyusunan soal		
3	Senin, 29/8'16	2	Koordinasi dengan Guru Pamong		
4	Babw, 28/9'16	2	Laporan		

PERHATIAN :

- Kartu bimbingan PPL ini dibawa oleh mhs PPL/ Magang III (1 kartu untuk 1 prodi).
- Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PPL/ Magang III setiap kali bimbingan di lokasi.
- Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PPL/ Magang III untuk keperluan administrasi.



Mlati, 16 September 2016
Mhs PPL/ Magang III Prodi PKN.....
Gisg. Ceri Aprasnia Paramitha

LAMPIRAN 6

RENCANA

PELAKSANAAN

PEMBELAJARAN (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : X/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Negara

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	1.1.1 Mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan negara tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara 1.1.2 Mensyukuri adanya praktik

	sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	penyelenggaraan pemerintahan Negara tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia.
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	<p>2.1.1 Peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara</p> <p>2.1.2 Peserta didik menunjukkan rasa tanggungjawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk sikap mematuhi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian. Negara RI.</p>
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	<p>3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>3.1.2 Peserta didik mampu menganalisis konsep pembagian sistem kekuasaan negara</p> <p>3.1.3 Peserta didik mampu menganalisis Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian.</p> <p>3.1.4 Peserta didik menganalisis klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian.</p>
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan	<p>4.1.1 Peserta didik mengkritisi hasil diskusi tentang macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>4.1.2 Peserta didik mampu mengkritisi konsep pembagian sistem kekuasaan</p>

	pemerintahan negara.	<p>negara.</p> <p>4.1.3 Peserta didik mampu mengkritisi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia</p> <p>4.1.4 Peserta didik mampu mengkritisi tentang klasifikasi kementerian Negara RI dan non kementerian.</p> <p>4.1.5 Menyimpulkan hasil temuan kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.</p>
--	----------------------	--

C. Materi Pembelajaran

1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.
 - a. Makna sistem pembagian kekuasaan negara.
 - b. Macam-macam pembagian kekuasaan negara.
2. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian :
 - a. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya.
 - b. Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi.
3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

D. Media, Alat / Bahan dan SumberBelajar

- Media : Tayangan Video, Power Point
- Alat / Bahan : LCD, Laptop
- Sumber belajar : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

E. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan I

No	Rincian Kegiatan	Waktu
	Pendahuluan	
.1.	1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran,	

	<p>agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat sertabuku yang diperlukan).</p> <ol style="list-style-type: none">2) Guru memberikan motivasi dan bersyukur bahwa Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.3) Apersepsi (menanyakan materi sebelumnya yang terkait dengan materi sekarang)4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.5) Guru menyampaikan topik tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	10 Menit
.2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p><i>Mengamati</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara <p><i>Menanya</i></p> <ol style="list-style-type: none">2) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dariterkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda. <p><i>Mengumpulkan Informasih</i></p> <ol style="list-style-type: none">3) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam mempelajari Sistem Pembagian Kekuasaan Negara <p><i>Mengasosiasikan</i></p> <ol style="list-style-type: none">4) Peserta didik melakukan analisis/diskusi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara <p><i>Mengomunikasikan</i></p> <ol style="list-style-type: none">5) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya.6) Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkanpenilaian dari guru.	65 Menit
.3.	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajarantersebut.2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman : Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas padapertemuan ini.	15 Menit

	4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.	
	5) Guru memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutupkegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karenatelah berjalan baik dan lancar.	

F. Rubrik Penilaian

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menjelaskan macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.	a. Jelaskan pengertian kekuasaan negara! b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kekuasaan negara menurut John Lock dan Monstesque!	a) Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. b) Menurut John Locke : a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undangundang c. Kekuasaan federatif, yaitu	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		<p>kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.</p> <p>Menurut Montesque :</p> <p>a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.</p> <p>b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.</p> <p>c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.</p>	
Menjelaskan konsep pembagian sistem kekuasaan negara	<p>a. Jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal!</p> <p>b. Jelaskan pembagian kekuasaan secara vertical!</p>	<p>a. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga- lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD</p>	<p>Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10</p>

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan padatingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahandaera h. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.</p> <p>b. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatanpemerintah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas</p>	
--	--	---	--

		<p>kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh</p>	
--	--	---	--

		Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
--	--	--	--

G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

- 1. Teknik penilaian
Penilaian sikap sosial dan spriritual
Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- 2. Penilaian kognitif/ tes tertulis
Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana pesreta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.
- 3. Penilaian keterampilan.
Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.
- 4. Instrumen Penilaian
 - a. Rubrik Penilaian Sikap Spriritual, Sosial dan Keterampilan
Petunjuk: jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

[illegible]

5. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

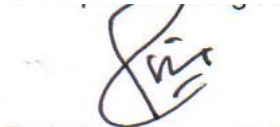
6. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan.

Mlati, 21 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd

NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY



Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERTEMUAN I)

A. Macam-macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan?

Negara tentu saja mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang;

- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang;
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273):

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini dinamakan dengan *Trias Politica*.

B. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi control dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara* (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*divisions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata

lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

1. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

- a) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

- c) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- d) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- f) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan

pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

2. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : X/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Negara

A. Kompetensi Inti

- 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 3.1.2 Peserta didik mampu menganalisis konsep pembagian sistem kekuasaan negara 3.1.3 Peserta didik mampu

		<p>menganalisisKedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian.</p> <p>3.1.4 Peserta didik menganalisisklasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian.</p>
--	--	--

C. Materi Pembelajaran

- Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian:
 - Tugas Kementrian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedudukannya.
 - Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi.

D. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar

- Media : Tayangan Video, PowerPoint
- Alat/Bahan : LCD, Proyektor, Laptop, Spidol
- Sumber belajar : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

E. Kegiatan Pembelajaran

No	Rincian Kegiatan	Waktu
	Pendahuluan	
.1.	<ol style="list-style-type: none"> Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat sertabuku yang diperlukan). Guru memberikan motivasi dan bersyukur bahwa Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apersepsi (menanyakan materi sebelumnya yang terkait dengan materi sekarang) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan topik tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara mengenai Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia 	10 Menit

	dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.	
.2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Mengamati</p> <p>1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Menanya</p> <p>2) Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dariterkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda.</p> <p>Mengumpulkan Informasi</p> <p>3) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam mempelajari mengenai Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Mengasosiasikan</p> <p>1) Peserta didik melakukan analisis/diskusi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.</p> <p>Mengomunikasikan</p> <p>2) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya.</p> <p>3) Hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.</p>	65 Menit
.3.	<p>Penutup</p> <p>1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman.</p> <p>3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas padapertemuan ini.</p> <p>4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.</p> <p>5) Guru memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutupkegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karenatelah berjalan baik dan lancar.</p>	15 Menit

F. Rubrik Penilaian

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman

			Penskoran
Menjelaskan Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non kementerian.	a. Sebutkan tugas Kementerian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara!	<p>a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.</p> <p>c. Perumusan dan penetapan kebijakan</p>	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.	
Menjelaskan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian	a. Sebutkan klasifikasi kementerian negara RI berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara!	a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah	
--	--	---	--

G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik penilaian
- a. Penilaian sikap sosial dan spriritual

Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- b. Penilaian kognitif/ tes tertulis

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana pesreta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.
- c. Penilaian keterampilan.

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.
2. Instrumen Penilaian
- a. Rubrik Penilaian Sikap Spritual, Sosial dan Keterampilan

Petunjuk: jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

Nama	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik besyukur kepada Tuhan YME atas	Peserta didik turut menjaga Menghargai nilai-nilai pengabdian kepada	Peserta didik memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran	Peserta didik senantiasa menumbuhk an rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat	Peserta didik dengan cepat dan tanggap menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi

	segala nikmat yang diberikan dan senantiasa berusaha agar mampu membedakan macam-macam klasifikasi pembagian kekuasaan negara	Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membedakan macam-macam klasifikasi pembagian kekuasaan negara		atau bertanya saat diskusi berlangsung	kelas
(Nama)					
(Nama)					
(Nama)					
(Nama)					
(Nama)					
(Nama)					

3. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Negara. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

4. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Negara. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan

dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Negara.

Sleman, 21 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd

NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY



Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA (PERTEMUAN II)

A. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- a) Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

- c) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara terdiri atas:

- a) Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- c) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

B. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian Negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan di bawah ini. Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- 1) Kementerian Dalam Negeri
- 2) Kementerian Luar Negeri
- 3) Kementerian Pertahanan

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Kementerian Keuangan
- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4) Kementerian Perindustrian
- 5) Kementerian Perdagangan
- 6) Kementerian Pertanian
- 7) Kementerian Kehutanan
- 8) Kementerian Perhubungan
- 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Kementerian Pekerjaan Umum
- 12) Kementerian Kesehatan
- 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 14) Kementerian Sosial
- 15) Kementerian Agama
- 16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

- 1) Kementerian Sekretariat Negara
- 2) Kementerian Riset dan Teknologi
- 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 4) Kementerian Lingkungan Hidup
- 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 10) Kementerian Perumahan Rakyat
- 11) Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

C. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
20. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Badan SAR Nasional (Basarnas);
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
24. Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri
26. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
30. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan;

31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMA N 1 Mlati
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1 (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
Tema :Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

A. KompetensiInti

- 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan IndikatorPencapaianKompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan	1.2.1 Peserta didik mampu memahami ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah Negara.
	1.2.2 Peserta didik mensyukuri keberadaan Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

	Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk , agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil	Indonesia
	2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang	<div>2.2.1 Peserta didik menunjukkan rasa tanggungjawabdalamberdiskusidanpresentasisebagai bentukmengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara.</div> <div>2.2.2 Peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang batas-batas wilayah Negara Indonesia.</div> <div>2.2.3 Peserta didik mampu menunjukkan ras atanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi tentang Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</div>

	wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercaya an, pertahana n dan keamanan	
	3.2 Menganali sis ketentuan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercaya an, pertahana n dan	3.1.1 Pesertadidik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur Wilayah Negara 3.1.2 Peserta didik menganalisis batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia. 3.1.3 Peserta didik menganalisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

	keamanan	
4.2	menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	<p>4.2.1 Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara Indonesia.</p> <p>4.2.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>4.2.3 Peserta didik mampu mengkritisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>

C. Materi Pembelajaran

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Media, Alat / Bahan dan SumberBelajar

- Media : Tayangan Video, Power Point
- Alat / Bahan : LCD, Laptop, *White Board*, Spidol.
- Sumber belajar : -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas X: buku Guru/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.

Kegiatan Inti

No	Rincian Kegiatan	Waktu
.1.	<p>Pendahuluan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat sertabuku yang diperlukan). 2) Guru memberi motivasi dan bersyukur karena siswa dianggap sudah berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya. 3) Apersepsi (menanyakanmaterisebelumnya yang terkaitdenganmaterisekarang) 4) Menyampaikantujuanpembelajaranandanmanfaatnyadalamkehidupansehari-hari. 5) Guru menyampaikan topik Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tentang Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. 	10 Menit
.2.	<p>KegiatanInti</p> <p>Mengamati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siswa mengamati tayangan video/film/gambar, Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab tentang materi Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <p>Menanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Pesertadidik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dariterkait dengan gambar/video. Masing-masing dengan pertanyaan yang berbeda. 3) Guru dapat memberikan bantuan berupa kata tanya, atau potongan pertanyaan yang dilengkapi oleh peserta didik. <p>MengumpulkanInformasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Peserta didik secara berkelompok dianjurkan untuk menggunakan sumber lain dari internet; web, media sosial lainnya dalam Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <p>Mengasosiasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Peserta didik melakukan analisis/diskusi Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <p>Mengomunikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok 	65 Menit

	<p>secara bergantian dan peserta didik lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawabannya.</p> <p>7) Hasilpekerjaankelompokdikumpulkanuntukmendapatkanpe nilaiandari guru.</p>	
.3.	<p>Penutup</p> <p>1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2) Guru memberikan tugas untuk peningkatan pemahaman.</p> <p>3) Guru menyimpulkan materi yang telah di bahas padapertemuan ini.</p> <p>4) Guru memberikan tugas untuk minggu selanjutnya.</p> <p>5) Guru memberikan penanaman kesadaran berkonstitusi dan menutupkegiatan dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME karenatelah berjalan baik dan lancar.</p>	15 Menit

Penilaian

Tugas Kelompok 2.1

Setelah kalian membaca dan memahami uraian di atas kerjakanlah tugas di bawah ini :

1. Coba kalian lakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan di wilayah daratan lautan Indonesia. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menjelaskan batas-batas wilayah negara.	a. Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia	a.	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10
	b. Negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia		Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

Tugas Pemahaman

Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasi permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Presentasikan di depan guru dan teman kalian.

No	Permasalahan	Negara yang terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.	Malaysia	Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia.
2			
3			
4			
5			

E. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1) Teknik penilaian

- Penilaian sikap sosial dan spriritual
Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok. Sedangkan dalam penilaian spriritual dapat dilihat dengan pengamatan seberapa jauh siswa menghargai dan mensyukuri adanya praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
- Penilaian kognitif/ tes tertulis
Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.
- Penilaian keterampilan.
Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

2) Instrumen Penilaian

- a) Rubrik Penilaian Sikap Spiritual, Sosial dan Keterampilan
- Petunjuk: jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik bersyukur kepada Tuhan YME atas segala nikmat yang diberikannya dan senantiasa bersyukur Adanya ketentuan dalam UU yang mengatur perbatasan-perbatasan wilayah negara dan	Peserta didik turut menjaga Menghargai nilai-nilai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memahami batas-batas wilayah Negara dan Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peserta didik memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran	Peserta didik senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya saat diskusi berlangsung	Peserta didik dengan cepat dan tanggap menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas
Nama					

	Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia				

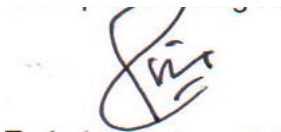
Remidial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.

- Pengayaan
- Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Kedudukan Dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Mlati, 19 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd

NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY



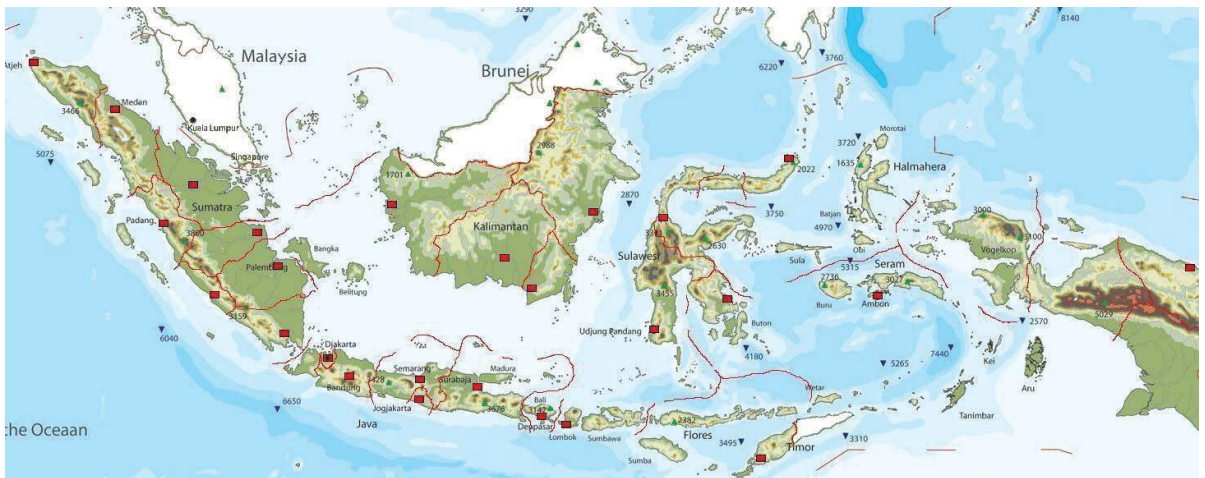
Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Nah sekarang coba kalian amati gambar 2.2.



Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian jadikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan sebagai bahan diskusi.

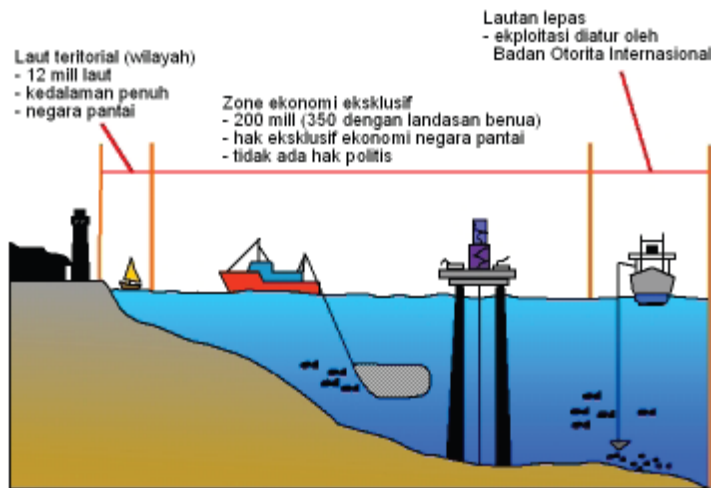
Nah, untuk memperlancar proses diskusi yang akan kalian lakukan, bacalah terlebih dahulu lanjutan pemaparan materi berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirinusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang*. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: *"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang"* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-

Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km², termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km². Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput laut, kerang udang dan sebagainya) ada dan terkandung di dalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional

yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 2.4 Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Tahun 1982

Berdasarkan gambar di atas, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

a. Zona Laut Teritorial

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

b. Zona Landas Kontinen

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologimerupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasankontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasankontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan

alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landaskontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemeritah pusat

maupun daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, terhampar ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Dengan demikian negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan

dan lautan. Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negaranegara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dimana duapertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelahbarat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Di awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati *batas-batas wilayah negara* keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

2. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah Indonesia, terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beranekaragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya didaratan dan lautan di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak

bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

- 1) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 2) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas/Semester : X/1

Materi Pokok : Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit (2 x JP)

I. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

II. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
	1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga	1.2.1 Peserta didik mampu memahami ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang status warga negara Indonesia. 1.2.2 Peserta didik mensyukuri keberadaan Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia

	<p>negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p>	<p>1.2.3 Peserta didik mensyukuri keberadaan adanya Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.</p> <p>1.2.4 Peserta didik mensyukuri keberadaan Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</p>
	<p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	<p>2.2.1 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga negara Indonesia.</p> <p>2.2.2 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia.</p> <p>2.2.3 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>2.2.4 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</p>
	<p>3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan</p>	<p>3.1.1 Peserta didik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur status warga negara Indonesia.</p> <p>3.1.2 Peserta didik menganalisis ketentuan undang-undang dasar yang mengatur asas-asas kewarganegaraan Indonesia</p> <p>3.1.3 Peserta didik menganalisis syarat-</p>

	keamanan	syarat menjadi warga negara Indonesia. 3.1.4 Peserta didik menganalisis pertahanan dan keamanan negara Indonesia Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
	4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2.1 Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang status warga Negara Indonesia. 4.2.2 Peserta didik mampu mengkritisi tentang asas-asas menjadi warga negara Indonesia. 4.2.3 Peserta didik mampu mengkritisi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. 4.2.4 Peserta didik mampu mengkritisi Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.

III. MATERI PEMBELAJARAN

- 1. Status Warga Negara Indonesia.
- 2. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia.
- 3. Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia.
- 4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.

IV. MEDIA PEMBELAJARAN

- 1. Video : Kedudukan Warga Negara dalam UUD 1945

V. PERANGKAT /SUMBER PEMBELAJARAN

- 1. Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. xiv, 158. : illus. ; 25 cm.

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan I

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none">Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)	10 menit

	<ul style="list-style-type: none">• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Sebelum peserta didik memahami kedudukan warga negara serta penduduk Indonesia, guru dapat menunjukkan ilustrasi/video konsep mengenai materi pembelajaran tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengamati<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik mengamati tayangan video.• Menanya<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik diminta untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatannya terhadap tayangan video tersebut. Guru dapat memberikan bantuan berupa kata tanya, atau potongan pertanyaan yang dilengkapi oleh peserta didik.• Mengeksplorasi<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik dibantu guru memfokuskan pada pertanyaan yang hendak dipecahkan.- Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk merancang eksperimen berdasarkan hipotesis yang mereka buat.- Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.- Kelompok melakukan eksperimen berdasarkan rancangan yang telah mereka buat dengan bimbingan guru.• Mengasosiasikan<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik berdiskusi untuk	65 menit

	<p>menganalisis data hasil eksperimennya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengomunikasikan<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik mengomunikasikan proses dan hasil penyelidikannya.- Peserta didik menerima umpan balik dari guru dan/atau teman sekelas.	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik (dengan atau tanpa bantuan guru) membuat rangkuman/simpulan pelajaran;• Kesimpulan<ul style="list-style-type: none">- Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan menerima umpan balik keterlibatannya dalam proses dan hasil pembelajaran.• Motivasi• Salam Penutup	15 menit

VII. PENILAIAN

1. Teknik Penilaian

a. Penilaian sikap

Penilaian sikap dilakukan terhadap peserta didik selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

b. Penilaian pengetahuan tes tertulis

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk dimana peserta didik diminta untuk menjawab/melengkapi pertanyaan.

c. Penilaian keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas.

2. Instrumen Penilaian

a. Rubrik Penilaian Sikap dan Keterampilan

Petunjuk : jika melaksanakan maka beri tanda centang terhadap kolom yang tersedia pada nama peserta didik yang bersangkutan.

Nama	Rubrik Penilaian				
	Peserta didik bersyukur kepada Tuhan YME sebagai warga negara Indonesia	Peserta didik turut menjaga status kependudukan sebagai warga negara Indonesia	Peserta didik memperhatikan dengan baik selama proses pembelajaran	Peserta didik senantiasa menumbuhkan rasa ingin tahu dengan cara memberi pendapat atau bertanya saat diskusi berlangsung	Peserta didik dengan cepat dan tanggap menjawab atas pertanyaan yang diajukan saat diskusi kelas

b. Rubrik Penilaian Pengetahuan atau Tes Tertulis

Indikator Soal	Soal	Rubrik Penilaian	
		Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
Menyebutkan undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia.	Sebutkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia!	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10

		<p>b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan Antara Indonesia dan RRC.</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1968 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946.</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>	
--	--	--	--

Menguraikan bahwa kewarganegaraan dapat di dapat melalui beberapa cara.	Selain melalui naturalisasi, uraikan cara mendapatkan kewarganegaraan!	1. Kelahiran 2. Dikabulkan permohonan 3. Akibat perkawinan 4. Ikut ayah dan ibu 5. Pernyataan	Jawaban sempurna = 50, jawaban kurang sempurna = 30, jawaban salah = 10
---	--	---	---

Soal Kuis :

- Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal?
- Apa perbedaan penduduk dan warga negara?
- Apa yang disebut asas kewarganegaraan?
- Jelaskan bagaimana contoh dari Ius Soli?
- Sebutkan dua syarat menjadi WNI?
- Sebutkan penyebab hilangnya kewarganegaraan?
- Jelaskan yang dimaksud apatride dan bipatride!
- Apa yang dimaksud asas kewarganegaraan ganda terbatas?

Kunci Jawaban :

- Remidial

Remidial dilaksanakan untuk siswa yang mana belum menguasai secara penuh materi mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Guru menjelaskan kembali materi dan melakukan penilaian dengan uji kompetensi. Soal untuk uji kompetensi dapat di sesuaikan dengan kemampuan siswa serta dapat berupa tertulis atau lisan.
- Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Pembelajaran pengayaan dapat dilaksanakan dengan memaknai lebih jauh tentang mengenai Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.

Mlati, 19 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ervin', with a stylized flourish at the end.

Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gista Ceri Aprasnja Paramitha', with a long horizontal flourish at the end.

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

1. Syarat Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian samakah pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara. Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

- a. **Penduduk dan bukan penduduk.** Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
- b. **Warga negara dan bukan warga negara.** Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dari uraian di atas menimbulkan suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah Warga Negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk

Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.

Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak jumlahnya. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, oleh karena itu apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting ? Sebagai contoh: bahwa hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuktidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Padaumumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua,yaitu:

- a. Asas ius sanguinis(asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorangditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya,Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraannegara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini,kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanyatanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- b. Asas ius soli(asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukanberdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negaraB, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalahwarganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidakterpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadipatokan adalah tempat kelahirannya.Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara,baik yang menerapkan

asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

- 1) Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
- 2) Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

- a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
- b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa) Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai:
 - a) Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
 - b) Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Naturalisasi biasa Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:
 - 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
 - 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih;
 - 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
 - 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
 - 8) membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.
- b. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewadiberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesiaatau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jikamenyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

c. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan:
 - 1) telah berusia 18 tahun ;
 - 2) bertempat tinggal di luar negeri;
- d. masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden;
- e.. masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatandalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga NegaraIndonesia;
- f. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing ataubagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri;
- g. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatunegara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau suratyang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlakudari negara lain atas namanya;
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama limatahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadiWarga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir,dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukanpernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilanIndonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi: Menganalisis budaya politik di Indonesia

- A. Standar Kompetensi
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
- B. Kompetensi Dasar
- 1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.
- 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politikyang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	Mendeskripsikan pengertian budaya politik	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab Mandiri
		Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli	
		Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik	

2.	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.	
		Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.	

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami lebih dalam mengenai budaya politik.
2. Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat menyebutkan pengertian budaya politik menurut para ahli.
3. Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat menunjukkan komponen-komponen budaya politik yang ada.
4. Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan agar dapat menunjukkan sikap berdasarkan tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia.
5. Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat membedakan tipe dari masing-masing budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Budaya Politik secara Umum dan Menurut Para Ahli
2. Komponen-Komponen Budaya Politik
3. Tipe-Tipe Budaya Politik

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Diskusi

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

- 1. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video
- 2. Alat Pembelajaran : White board, spidol
- 3. Bahan Pembelajaran : Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)". Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, Buku-Buku Kuliah Cholisn, M.Si. (Profil Budaya Politik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan).

H. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan I

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	<p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	10 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan eksplorasi: menjelaskan pengertian budaya politik.✓ Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli.✓ Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik.✓ Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.✓ Memedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam	60 menit

	<p>kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu (a) pengertian budaya politik; (b) pengertian budaya politik menurut para ahli; (c) komponen-komponen budaya politik; (d) tipe-tipe budaya politik; (e) tipe budaya politik berdasarkan orientasi budaya politik, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi • Kesimpulan • Motivasi • Salam Penutup 	20 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan Jelaskan pengertian budaya politik

			<p>secara umum!</p> <p>b. Sebut dan jelaskan pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman pemahaman teoritis!</p>
<p>2. Mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut para ahli</p>	<p>Tes Tertulis</p>	<p>Pilihan Ganda</p>	<p>a. Budaya politik merupakan suatu sistem kepercayaan empirik, symbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan, tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh...</p> <p>a) Rusadi Sumintapura</p> <p>b) Sidney Verba</p> <p>c) Alan R. Ball</p> <p>d) Austin Ranney</p> <p>e) Gabriel A. Almond</p> <p>b. Manfaat yang diperoleh setelah mengetahui pendapat yang dikemukakan</p>

			<p>para ahli mengenai budaya politik, kecuali...</p> <p>a) Sikap warga negara akan mempengaruhi tuntutan</p> <p>b) Sikap warga negara akan mempengaruhi tanggapan</p> <p>c) Sikap warga negara akan mempengaruhi dukungan</p> <p>d) Hubungan budaya politik dan sistem politik dapat dimengerti dengan baik</p> <p>e) Sikap warga negara akan mempengaruhi kekuatan</p>
3. Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan komponen objek politik yang anda ketahui!
4. Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan.	Tes Tertulis	Uraian	<p>a. Jelaskan tipe budaya politik berdasarkan sikap budaya politik militan!</p> <p>b. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik</p>

			terbagi menjadi dua. Sebut dan jelaskan!
5. Memedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan ciri-ciri tipe budaya politik parochial, kaula, dan partisipan!

Kunci Jawaban

- Sebut dan Jelaskan pengertian budaya politik secara umum!
Bahwa budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsure masyarakat yang berbeda budaya politiknya seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya.
- Sebut dan jelaskan pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman pemahaman teoritis!
 - Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, takhayul dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
 - Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Kemudian menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militant, utopis, terbuka, atau tertutup.
 - Hakikat dan cirri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
 - Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas dan prioritas kebijakan.
- B
- E
- Komponen Objek Politik:
 - Komponen kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.

- b) Komponen afektif, yaitu berupa perasaan sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya.
 - c) Komponen evaluatif, yaitu berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan criteria informasi dan perasaan.
6. Tipe budaya politik berdasarkan sikap budaya politik militan, bahwa tipe budaya politik dengan sikap ini tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya yang mungkin salah.
7. Ciri tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya:
- a. Budaya politik parochial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif. Ciri masyarakatnya masih banyak sekali yang acuh dengan keadaan khususnya budaya politik yang berkembang di masyarakat.
 - b. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Ciri masyarakatnya pikirannya sudah mulai maju tetapi realita sikapnya masih bersifat pasif.
 - c. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Ciri masyarakatnya sudah maju secara pikiran dan sikap terhadap politiknya sudah tinggi.

J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	5	10-15	20	20
2.	5	10-15	20	20
3.	3	5-7	10	10
4.	3	5-7	10	10
5.	4	7-10	15	15
6.	3	5-7	10	10
7.	4	7-10	15	15
Total Skor				100

Mlati, 19 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ervin', on a white background.

Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd

NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gista Ceri Aprasnja Paramitha', on a white background.

Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

BUDAYA POLITIK INDONESIA (PERTEMUAN I)

A. Pendahuluan

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah politik. Keterlibatan manusia dalam politik dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan politik menjadi bagian proses yang dilakukan warga negara. Setiap warga negara memiliki aspirasi dalam bidang politik. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, maupun pemilihan wakil rakyat. Dalam bentuk lain, kegiatan politik warga negara diwadahi dalam sebuah organisasi yang disebut partai politik. Di dalamnya, setiap warga negara memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai peran warga negara sebagai insan politik dan sistem politik. Dari organisasi partai politik diharapkan tercipta kematangan budaya politik.

B. Pengertian Budaya Politik

1. Pengertian Umum Budaya Politik

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga Indonesia menurut **Benedict R. Anderson**, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut, budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.

Berikut ini merupakan beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahaminya secara teoritis.

- a) Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan adat istiadat, takhayul dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
- b) Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme,

demokrasi, atau nasionalisme. Kemudian menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militant, utopis, terbuka, atau tertutup.

- c) Hakikat dan cirri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- d) Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas dan prioritas kebijakan.

2. Pengertian Budaya Politik menurut Para Ahli

Berikut ini merupakan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli ilmu politik.

a. Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

b. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empiric, symbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

c. Alan R. Ball

Budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.

d. Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek- objek politik.

e. Gabriel A. Almond dan Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu.

Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh dua manfaat yakni:

- a. sikap warga negara terhadap sistem politik kan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasinya terhadap sistem politik itu;
- b. hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

3. Komponen-Komponen Budaya Politik

Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga

komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif.

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.

b. Komponen orientasi afektif

Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para aktor, dan penampilannya.

c. Komponen orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik.

C. Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

a. Budaya politik militant

Budaya politik militant tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternative yang terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya mungkin yang salah.

b. Budaya politik toleransi

Budaya politik ini merupakan budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. Budaya politik ini berusaha mencari consensus yang wajar, yaitu selalu membuka pintu untuk kerja sama. Yang dilakukan budaya politi ini adalah sikap netral atau kritis terhadap ide orang, bukan curiga terhadap orang.

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:

a. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolute

Budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi.

b. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, krisis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai tradisi berdasarkan pengembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai sesuatu yang membahayakan. Tiao perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan berbahaya yang harus dikendalikan, perubahan dianggap penyimpangan.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Almond dan Verba mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga budaya politik tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi.

a. Budaya politik parochial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Ciri khas budaya politik parokial yaitu:

- 1) spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas.
- 2) satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

b. Budaya politik subjek

Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari otoritas pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang sebagai posisi yang positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti proses kolonisasi dan kediktatoran.

c. Budaya politik partisipan

Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan kepada sistem politik secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi: Menganalisis budaya politik di Indonesia

- A. Standar Kompetensi
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
- B. Kompetensi Dasar
- 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik
		Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik
		Mengidentifikasi proses sosialisasi politik
		Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang

		Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik
--	--	--

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

1. Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga diharapkan dapat memahami konsep dasar sosialisasi politik.
2. Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik setelah mendengarkan dan memperhatikan guru, sehingga diharapkan dapat mengetahui pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai sosialisasi politik.
3. Mengidentifikasi proses sosialisasi politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga diharapkan dapat memahami proses sosialisasi politik.
4. Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga diharapkan dapat mendiskripsikan sosialisasi politik pada masyarakat berkembang.
5. Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga diharapkan dapat menarik kesimpulan perbedaan, persamaan serta kaitan sosialisasi politik dan komunikasi politik.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Sosialisasi Politik secara Umum dan Menurut Para Ahli
2. Proses Sosialisasi Politik
3. Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang
4. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Snowball Throwing

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : PowerPoint
2. Alat Pembelajaran : White board, spidol
3. Bahan Pembelajaran : Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)". Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, Buku-Buku Kuliah Cholisin, M.Si. (Profil Budaya Politik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan).

H. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan II

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	<p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	10 menit
1.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi:<ul style="list-style-type: none">✓ Siswa menjelaskan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik✓ Siswa mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik.✓ Siswa mengidentifikasi proses sosialisasi politik melalui tayangan video.✓ Siswa mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang.✓ Siswa memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik.✓ Siswa mendeskripsikan pengertian partisipasi politik.✓ Siswa memetakan konsep partisipasi politik.	65 menit

	<ul style="list-style-type: none">✓ Siswa mengaplikasikan praktik partisipasi politik.✓ Siswa mengidentifikasi tingkat partisipasi politik.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.• Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan konfirmasi : guru atau siswa menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.	
2.	Penutup <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi• Kesimpulan• Motivasi• Salam Penutup	15 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan pengertian umum	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan apa yang

mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik			dimaksud sosialisasi pengembangan budaya politik secara umum!
2. Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya politik	Tes Tertulis	Uraian	b. Jelaskan pengertian sosialisasi pengembangan budaya politik yang dikemukakan oleh Alfian!
3. Mengidentifikasi proses sosialisasi politik	Tes Tertulis	Uraian	c. Sebut dan jelaskan tahap proses sosialisasi politik anak menurut Easton dan Dennis! d. Sebutkan sarana dalam sosialisasi politik!
4. Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang	Tes Tertulis	Uraian	e. Sebutkan tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine!
5. Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik	Tes Tertulis	Uraian	f. Jelaskan hubungan antara sosialisasi

			politik dengan komunikasi politik!
--	--	--	---

Kunci Jawaban:

- Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, dictator, maupun sistem politik lainnya. Sosialisasi politik merupakan pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Terlaksananya sosialisasi politik ini sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- Pengertian sosialisasi pengembangan budaya politik menurut Alfian:
Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
- Proses sosialisasi politik anak menurut Easton dan Dennis:
 - Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua dan anak, presiden dan polisi.
 - Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
 - Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
 - Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
- Sarana dalam sosialisasi politik:
 - Keluarga (*family*)
 - Sekolah
 - Partai Politik.
- Tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine:
 - Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.

- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
 - c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.
6. Hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik yaitu, proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

J. Pedoman Penskoran

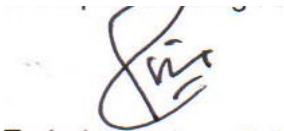
No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	3	5-12	15	15
2.	3	5-12	15	15
3.	5	12-22	25	25
4.	3	5-12	15	15
5.	5	7-17	20	20
6.	3	5-7	10	10
Total Skor				100

Sleman, 19 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

Mahasiswa PPL UNY




Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd

Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIP. 19711217 199702 2 004

NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI
BUDAYA POLITIK INDONESIA (PERTEMUAN II)

A. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

1. Pengertian Umum

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor pendorong untuk memunculkan persepsi.

2. Pengertian menurut Para Ahli

a. Gabriel A. Almond

Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

b. Irvin L. Child

Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu-individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya.

c. Richard E. Dawson, dkk

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka menginjak dewasa.

d. Alfian

Alfian mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
- 2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak definisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu:

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

3. Proses Sosialisai Politik

Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah

mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu:

- a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi.
- b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
- d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

4. Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang

Tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine:

- a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
- c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

5. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifest (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat.

Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan kultur dan struktur mereka sepanjang waktu. Hal ini dilakukan terutama melalui pengaruh struktur-struktur primer dan sekunder yang dilalui oleh anggota muda masyarakat dalam proses pendewasaan mereka.

Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam subsistem masyarakat yang beraneka ragam.

Pada sisi lain sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai, dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya serta peran yang berlaku.

Proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi: Menganalisis budaya politik di Indonesia

- A. Standar Kompetensi
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia
- B. Kompetensi Dasar
- 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1.	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai pendapat, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab.
		Memetakan konsep partisipasi politik	
		Mengaplikasikan praktik partisipasi politik	

		Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik	
--	--	--	--

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

1. Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik setelah mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami pengertian partisipasi politik secara benar.
2. Memetakan konsep partisipasi politik setelah mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami konsep partisipasi politik.
3. Mengaplikasikan praktik partisipasi politik setelah mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat mengaplikasikan partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik setelah mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat menyebutkan tingkatan yang ada dalam partisipasi politik.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Partisipasi Politik
2. Konsep Partisipasi Politik
3. Praktik Partisipasi Politik
4. Tingkatan Partisipasi Politik

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Two Stay Two Stray

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : PowerPoint
2. Alat Pembelajaran : White board, spidol
3. Bahan Pembelajaran : Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMA Kelas XI)". Penerbit Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta, Buku-Buku Kuliah Cholisin, M.Si. (Profil Budaya Politik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan).

H. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan III

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kelas agar kondusif 	10 menit

	<p>(berdoa dan absensi)</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi:<ul style="list-style-type: none">✓ menjelaskan mendeskripsikan pengertian partisipasi politik.✓ Memetakan konsep partisipasi politik.✓ Mengaplikasikan praktik partisipasi politik.✓ Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.• Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.	<p>65 menit</p>
1.	<p>Penutup</p>	<p>15 menit</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi• Kesimpulan• Motivasi• Salam Penutup	
--	--	--

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik.	Tes Tertulis	Uraian	1. Menurut Myron Weiner terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, sebutkan tiga diantaranya!
Memetakan konsep partisipasi politik.	Tes Tertulis	Uraian	2. Sebut dan jelaskan perbedaan konsep partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dengan Miriam Budiardjo!
Mengaplikasikan praktik partisipasi politik.	Tes Tertulis	Uraian	3. Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk tindakan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik dan beri contohnya!
Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik.	Tes Tertulis	Uraian	4. Sebut dan jelaskan tingkat

			partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson!
--	--	--	--

Kunci Jawaban:

- Penyebab timbulnya gerakan kea rah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik menurut Myron Weiner:
 - Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
 - Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
 - Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern.
 - Konflik antar kelompok pemimpin politik .
 - Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial , ekonomi, dan kebudayaan.
- Perbedaan konsep partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo dengan Ramlan Surbakti:

Nama Tokoh	Perbedaan
Miriam Budiardjo	a. Kegiatan seseorang atau sekelompok orang. b. Keikutsertaan secara aktif dalam kehidupan politik. c. Cara memilih pimpinan negara dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. d. Cara pemilihan pemimpin mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Ramlan Surbakti	a. Keikutsertaan warga negara biasa yang dapat menentukan segala keputusan mengenai kehidupannya. b. Keikutsertaan warga negara biasa mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

- Bentuk-bentuk yang berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengaruhi proses-proses politik, yaitu:
 - Kegiatan pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang

- bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Contohnya: pemilu, pemilu OSIS, pemilihan ketua RT/RW/Lurah
- b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contohnya: proses sosialisasi politik & komunikasi politik misalnya kampanye.
 - c. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Contohnya: praktik sosialisasi politik.
 - d. Mencari koneksi (*contacting*), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Contohnya: Lobbying action.
 - e. Tindakan kekerasan (*violence*), sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. ... kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi). Contohnya: pemerintahan yang otoriter.
4. Tingkat partisipasi:
- a. Kategori pengamat
Intensitas partisipasinya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat hubungannya rendah, atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.
 - b. Kategori aktivis
Intensitas partisipasinya tinggi dalam partisipasi politik yaitu meliputi pejabat umum, pejabat partai penuh waktu dan pimpinan kelompok kepentingan.

J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	5	10-22	25	25
2.	5	10-22	25	25
3.	5	10-22	25	25

4.	5	10-22	25	25
Total Skor				100

Mlati, 19 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd

NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY



Gista Ceri Aprasnja Paramitha

NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (PETEMUAN III)

A. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

1. Pengertian Umum

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor pendorong untuk memunculkan persepsi.

2. Pengertian menurut Para Ahli

a. Gabriel A. Almond

Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

b. Irvin L. Child

Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu-individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya.

c. Richard E. Dawson, dkk

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka menginjak dewasa.

d. Alfian

Alfian mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
- 2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak definisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu:

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

3. Proses Sosialisai Politik

Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan

dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu:

- a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi.
- b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
- d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

4. Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang

Tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang menurut Robert Le Vine:

- a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
- c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

5. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifest (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat.

Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan kultur dan struktur mereka sepanjang waktu. Hal ini dilakukan terutama melalui pengaruh struktur-struktur primer dan sekunder yang dilalui oleh anggota muda masyarakat dalam proses pendewasaan mereka.

Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam subsistem masyarakat yang beraneka ragam.

Pada sisi lain sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai, dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya serta peran yang berlaku.

Proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri.

B. Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan

1. Pengertian Partisipasi Politik

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan). Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristocrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

2. Konsep Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukakan tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu:

- a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik?
- b. Siapa saja yang terlibat?
- c. Apa implikasinya?
- d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik?
- e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik?

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik.

Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwijk	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah

	dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat public agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan individu atau kelompok • Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik.
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	<ul style="list-style-type: none"> • Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik • Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi

3. Praktik Partisipasi Politik

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk itu diantaranya:

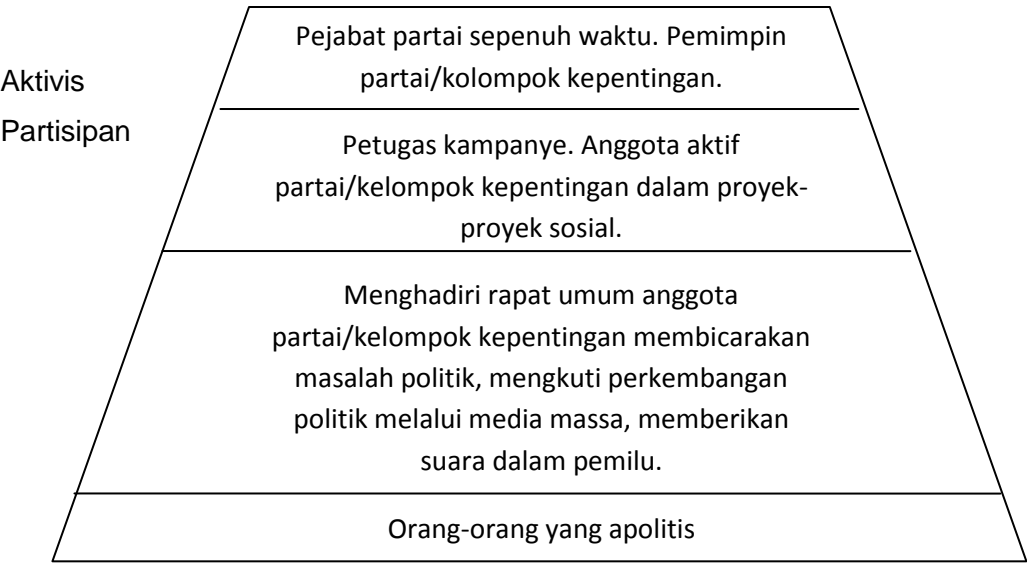
- Kegiatan pemilihan
- Lobbying
- Kegiatan organisasi
- Mencari koneksi (*contacting*)
- Tindakan kekerasan (*violence*)

4. Tingkatan Partisipasi Politik

Pada dasarnya seluruh tingkatan partisipasi politik secara praktis mungkin sekali memiliki perbedaan antara yang demokratis dengan nondemokratis, karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan partisipasi politik rakyat atau perluasan-perluasan partisipasi politik. Selain itu, meskipun suatu sistem politik sama-sama demokratis, bentuk-bentuk partisipasi politik dan tingkatan-tingkatannya sangat mungkin terdapat perbedaan.

Hubungan antara dua criteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”, lingkup partisipasi politik yang beasr biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semaikin tinggi. Contoh, kegiatan aktivis-aktivis partai politik, pejabat partai politik, dan kelompok-kelompok penekan. Jadi, dalam hal ini, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik maka semakin rendah atau kecil intensitasnya, dan sebaliknya semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

Perhatikan bentuk piramida partisipasi politik berikut ini.



Berdasarkan piramida partisipasi politik di atas, kriteria tingkatan partisipan seperti yang dikemukakan **Huntington** dan **Nelson** memiliki kesesuaian.semakin tinggi partisipasi politik, semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin luas cakupannya. Sebaliknya, semakin menuju ke bawah, semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya. Untuk lebih bisa memahaminya, perhatikan penjelasan berikut:

No	Tingkat Partisipasi	Keterangan
1.	Kategori Pengamat	Intensitas Partisipasi Terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat hubungannya rendah, atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.
2.	Kategori Aktivis	Intensitas Partisipasi Mereka memiliki intensitas tinggi dalam partisipasi politik adalah para pejabat umum, pejabat partai penuh waktu, dan pimpinan kelompok kepentingan. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan <i>pribadi</i> dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan public yang dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

- A. Standar Kompetensi**
 - 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
- B. Kompetensi Dasar**
 - 2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi**

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi	Mendeskripsikan pengertian Demokrasi	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai pendapat, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab.
		Mengidentifikasi pemikiran tentang Demokrasi	
		Menganalisis ciri-ciri Demokrasi	

		Memahami prinsip-prinsip Demokrasi	
		Mendeskripsikan Demokratisasi	

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1. Mendeskripsikan pengertian demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami secara benar konsep dasar demokrasi.
2. Mengidentifikasi pemikiran tentang demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat mengerti pemikiran tentang demokrasi.
3. Menganalisis ciri-ciri demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat menyebutkan ciri-ciri demokrasi.
4. Memahami prinsip-prinsip demokrasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat mengerti prinsip-prinsip demokrasi.
5. Mendeskripsikan demokratisasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat mengerti secara benar mengenai demokratisasi.

E. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Demokrasi
2. Pemikiran tentang Demokrasi
3. Ciri-Ciri Demokrasi
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi
5. Demokratisasi

F. Metode Pembelajaran

1. Presentasi
2. Diskusi
3. Ceramah

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video
2. Alat Pembelajaran : LCD Proyektor, Spidol
3. Bahan Pembelajaran :

a. Budiyanto. 2007. "Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI". PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga: Jakarta.

b. Putrianti, Widiarti, Zulaika. 2016. "Pendidikan Kewarganegaraan". MGMP Pendidikan Kewarganegaraan: Sleman.

c. Suyatmi, Henny Hendrastuti. 2011. "Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan V

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi) Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar Apersepsi Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 	10 menit
2.	Kegiatan Inti <ul style="list-style-type: none"> Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Siswa mendeskripsikan pengertian demokrasi. ✓ Siswa memahami pemikiran tentang demokrasi. ✓ Siswa menganalisis ciri-ciri demokrasi. ✓ Siswa memahami prinsip-prinsip demokrasi ✓ Siswa mendeskripsikan demokratisasi. Elaborasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas- 	65 menit

	<p>tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu (a) pengertian demokrasi; (b) pemikiran tentang demokrasi; (c) ciri-ciri demokrasi; (d) prinsip-prinsip demokrasi; (e) demokratisasi, setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi • Kesimpulan • Motivasi • Salam Penutup 	15 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan pengertian demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian demokrasi secara sederhana!

			b. Jelaskan pengertian demokrasi menurut Giovanni Sartori
2. Mengidentifikasi pemikiran tentang demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	<p>a. Jelaskan bahwa istilah demokrasi bertolak dari suatu pola pikir!</p> <p>b. Disamping perumusan <i>rule of the law</i>, muncul rumusan demokrasi politik menurut Henry B. Mayo yang mencakup mengenai nilai-nilai, Sebutkan!</p>
3. Menganalisis ciri-ciri demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebutkan tiga ciri –ciri negara dengan sistem politik demokrasi!
4. Mendeskripsikan prinsip-prinsip demokrasi	Tes Tertulis	Uraian	<p>a. Sebutkan prinsip demokrasi menurut Lyman Tower Sargent!</p> <p>b. Sebut dan Jelaskan lima</p>

			tingkat persamaan demokrasi dalam masyarakat!
5. Mendeskripsikan demokratisasi	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan pengertian demokratisasi secara mendasar menurut pendapat Anda!

Kunci Jawaban :

1. Demokrasi secara sederhana yaitu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Demokrasi menurut Giovanni Satori, yaitu memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorang pun dapat mengidentifikasikan dia dengan kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.
3. Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :
 - a) Manusia diperlukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
 - b) Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
 - c) Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
 - d) Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.
4. Henry B. Mayo, bahwa rule of law mencakup :
 - a) Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya.
 - b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih/memihak.
 - c) Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
 - d) Kebebasan mengemukakan pendapat.

- e) Kebebasan berserikat & berposisi.
 - f) Pendidikan politik.kewarganegaraan (civil education).
5. Ciri-cirinya :
- a) Eksekutif sangat berperan.
 - b) Nampak berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun infrastruktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
 - c) Pelaksanaannya cenderung bersifat paksaan “otoriter”.
6. Prinsip demokrasi menurut Lyman Tower Sargent :
- a) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
 - b) Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.
 - c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
 - d) Suatu sistem perwakilan.
 - e) Suatu sistem pemilihan – kekuasaan mayoritas.
7. Lima tingkat persamaan demokrasi dalam masyarakat :
- a) Persamaan politik.
 - b) Persamaan di depan hukum.
 - c) Persamaan kesempatan.
 - d) Persamaan ekonomi.
 - e) Persamaan sosial.
8. Demokratisasi merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	3	5-7	10	10
2.	3	5-7	10	10
3.	4	6-8	15	15
4.	4	6-8	15	15
5.	4	6-8	15	15
6.	4	6-8	15	15
7.	3	5-7	10	10
8.	3	5-7	10	10
Total Skor				100

Mlati, 19 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ervin', on a white background.

Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gista Ceri Aprasnja Paramitha', on a white background.

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
(PERTEMUAN V)

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakil- wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, sikap dan perilaku masyarakatnya selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu negara yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika. Dalam demokrasi, kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

9. Hakikat Demokrasi

Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata

masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). **Hendry B.**

Mayo mengemukakan tentang nilai-nilai dalam demokrasi, antara lain:

- a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peacefull settlement of conflict),
- b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful changein a changing society),
- c. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian kekerasan/paksaan seminimal mungkin (minim of coercion),
- d. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
- e. menjamin tegaknya keadilan,
- f. memajukan ilmu pengetahuan,
- g. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal.

Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain:

1. kebebasan untuk berpendapat,

2. kebebasan untuk membuat kelompok,
3. kebebasan untuk berpartisipasi,
4. kesetaraan antarwarga,
5. saling percaya,
6. kerja sama.

Akan tetapi, mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dilaksanakan dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal paling penting inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Bila tidak, kesalahpahaman sering kali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat.

Diamond & Lipset, 3 (tiga) syarat pokok demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan :

1. Kompetisi, yang sungguh-sungguh dan meluas untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan;
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan;
3. Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik.

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Gambarnya sebagai berikut :

1. Yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih untuk menyalurkan kehendak rakyat.
2. Cara melaksanakan kekuasaan negara ialah selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat.
3. Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan dukungan.

Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi. Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :

1. Kebebasan, adalah eleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa

batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku.

2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat pendukung agar tidak jatuh kedalam perpecahan.
4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berada dengan pendirian sendiri.
5. Menghormati kejujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan.
6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan member penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab.

10. Pemikiran tentang Demokrasi

Paham demokrasi yang menekankan pada pemerintahan rakyat, karena bertolak dari suatu pola pikir (pemikiran) bahwa :

- a. Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
- b. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
- c. Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
- d. Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.

11. Macam-Macam Demokrasi

No.	Dasar Pemikiran	Macamnya
1.	Atas dasar penyaluran kehendak rakyat	<i>Demokrasi Langsung</i> <i>Demokrasi Tidak Langsung</i>
2.	Atas dasar prinsip ideologi	<i>Demokrasi Konstitusional</i> <i>Demokrasi Rakyat</i>
3.	Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya	<i>Demokrasi Formal (negara-negara liberal)</i> <i>Demokrasi Material (negara-negara komunis)</i> <i>Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)</i>

Bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar :

No.	Bentuk Demokrasi	Uraian/Keterangan
1.	Demokrasi Liberal	Yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh UU & pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2.	Demokrasi Terpimpin	Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menududuki kekuasaan.
3.	Demokrasi Sosial	Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4.	Demokrasi Partisipasi	Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
5.	Demokrasi Konstitusional	Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya & menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Macam-macam demokrasi menurut permasalahannya :

Permasalahan	Demokrasi Liberal	Demokrasi Komunis	Demokrasi Pancasila
Ciri khas	Barat	Timur	Indonesia
Suber ajaran	Paham	Paham Marxisme-	Pancasila

	liberalis	Komunisme	
Dasar pandangan terhadap manusia	Memandang bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan bebas merdeka (sebagai makhluk individu)	Memandang bahwa manusia tidak mempunyai arti sebelum bersama-sama dengan manusia lain (sebagai makhluk sosial)	Memandang bahwa manusia sejak lahir merupakan makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial
Pelaksanaan hak	Hak-hak individu lebih diutamakan daripada hak-hak sosial kebebasan yang sebebaskan (mutlak)	Hak-hak sosial/masyarakat lebih diutamakan dari pada hak individu	Hak manusia rakyat dikembangkan secara seimbang. Atau hak individu dikembangkan seirama dengan hak-hak sosial. Kebebasan yang bertanggung jawab
Asas dalam mengambil keputusan	Ditempuh dengan suara terbanyak (mayoritas menguasai minoritas)	Ditentukan oleh pengurus partai komunis atas nama kaum proletar (minoritas menguasai mayoritas)	Diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah mufakat
Bentuk negara	Sekuler	Atheis	Negara yang berdasar Ketuhanan yang maha Esa.

B. Ciri-Ciri dan Prinsip Demokrasi

1. Ciri-Ciri Demokrasi

Esensi ciri-ciri empiris demokrasi, adalah bahwa demokrasi senantiasa berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (*account ability*), kompetisi, keterlibatan, dan tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar, seperti hak untuk berekspresi, berserikat, berkumpul dan sebagainya.

Demokrasi pada umumnya ditandai dengan ciri-ciri :

- a. Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan.
- b. Perasaan pendapat umum (media massa) yang bebas dan bertanggung jawab.
- c. Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan.

Henry B. Mayo memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai (*values*), yaitu :

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.
- f. Mengakui tegaknya keadilan.

Demokrasi di negara berkembang, masyarakat masih mencari dan menemukan identitas :

- a. Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif)
- b. Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
- c. Pelaksanaannya cenderung bersifat pelaksanaan "otoriter".

Demokrasi Pancasila, bersumber pada ideologinya demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang di dasarkan pada sila-sila Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2. Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara universal, bahwa yang disebut pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintahan harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Lyman Tower Sargent, prinsip-prinsip dalam demokrasi :

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara,
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
- d. Suatu sistem perwakilan, dan
- e. Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Dalam teori dan praktik politik demokrasi, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat persamaan”.

1. Persamaan politik
2. Persamaan di depan hukum
3. Persamaan kesempatan
4. Persamaan ekonomi
5. Persamaan sosial

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, berdasarkan UUD 1945 :

- a. Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditunjukkan untuk rakyat.
- b. Berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta nilai keadilan sosial.
- c. Badan-badan perwakilan rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Perbandingan prinsip demokrasi Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi universal.

Demokrasi Universal	Demokrasi Pancasila
<ul style="list-style-type: none">- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.- Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipaki oleh para warga negara.- Suatu sistem perwakilan.- Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.	<ul style="list-style-type: none">- Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.- Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri dan orang lain.- Mewujudkan rasa keadilan sosial- Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.- Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.- Menjunjung tinggi cita-cita nasional.

C. Demokratisasi

Demokratisasi merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

Demokratisasi merupakan bentuk yang lebih luas dari pada sekedar liberalisasi, karena dalam tahap ini terdapat persaingan yang terbuka, sehingga rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih tetapi juga hak untuk dipilih. Dengan demikian tanggung jawab pejabat public terhadap rakyat yang memilihnya menjadi besar.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi :Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

- A. Standar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
- B. Kompetensi Dasar
- 2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani	Mendeskrripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>)	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai pendapat, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab.
		Mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani	

		Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	
--	--	--	--

D. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1. Mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (*civil society*) setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami secara benar konsep dasar masyarakat madani.
2. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga diharapkan dapat mengerti macam-macam karakteristik masyarakat madani.
3. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, sehingga dapat memahami secara utuh dalam menuju masyarakat madani.

E. Materi Pembelajaran

1. Konsepsi Masyarakat Madani (*Civil Society*)
2. Karakteristik Masyarakat Madani
3. Menuju Masyarakat Madani

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah
2. Diskusi

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video/Gambar
2. Alat Pembelajaran : LCD Proyektor, Spidol
3. Bahan Pembelajaran :
 - a. Budiyanto. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI”. PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga: Jakarta.
 - b. Putrianti, Widiarti, Zulaika. 2016. “Pendidikan Kewarganegaraan”. MGMP Pendidikan Kewarganegaraan: Sleman.
 - c. Suyatmi, Henny Hendrastuti. 2011. “Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan VI

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan	10 menit

	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar• Apersepsi• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi:<ul style="list-style-type: none">✓ Siswa mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>).✓ Siswa mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani.✓ Siswa menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu mengenai materi pada pertemuan ke VI setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.	65 menit

	<ul style="list-style-type: none">• Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan konfirmasi : menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.	
3.	Penutup <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi• Kesimpulan• Motivasi• Salam Penutup	15 menit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>)	Tes Tertulis	Uraian	a. Jelaskan konsepsi mengenai masyarakat madani secara umum! b. Jelaskan konsep masyarakat madani yang diabstraksikan para ahli memiliki indicator sebagai identitas karakter!
2. Mengidentifikasi karakteristik	Tes Tertulis	Uraian	a. Sebut dan jelaskan

masyarakat madani	s		karakteristik masyarakat madani!
3. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani	Tes Tertulis	Uraian	a. Buatlah peta konsep mengenai bentuk masyarakat partisipatif yang harus dikembangkan agar kehidupan yang demokratis ditopang oleh masyarakat madani!

Kunci Jawaban :

1. Konsepsi masyarakat madani di Indonesia sepakat bila digunakan sebagai padanan yang tepat untuk istilah *civil society* yang merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestrabilan masyarakat.
2. Pertama : **Sifat partisipatif**, yaitu masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri.
Kedua : **Otonom**, yaitu selain sebagai masyarakat partisipatif, masyarakat madani juga memiliki karakter mandiri yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan menunggu bantuan negara.
Ketiga : **Tidak bebas nilai**, yaitu seluruh komponen masyarakat madani memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah demokratis (bukan sekedar consensus).

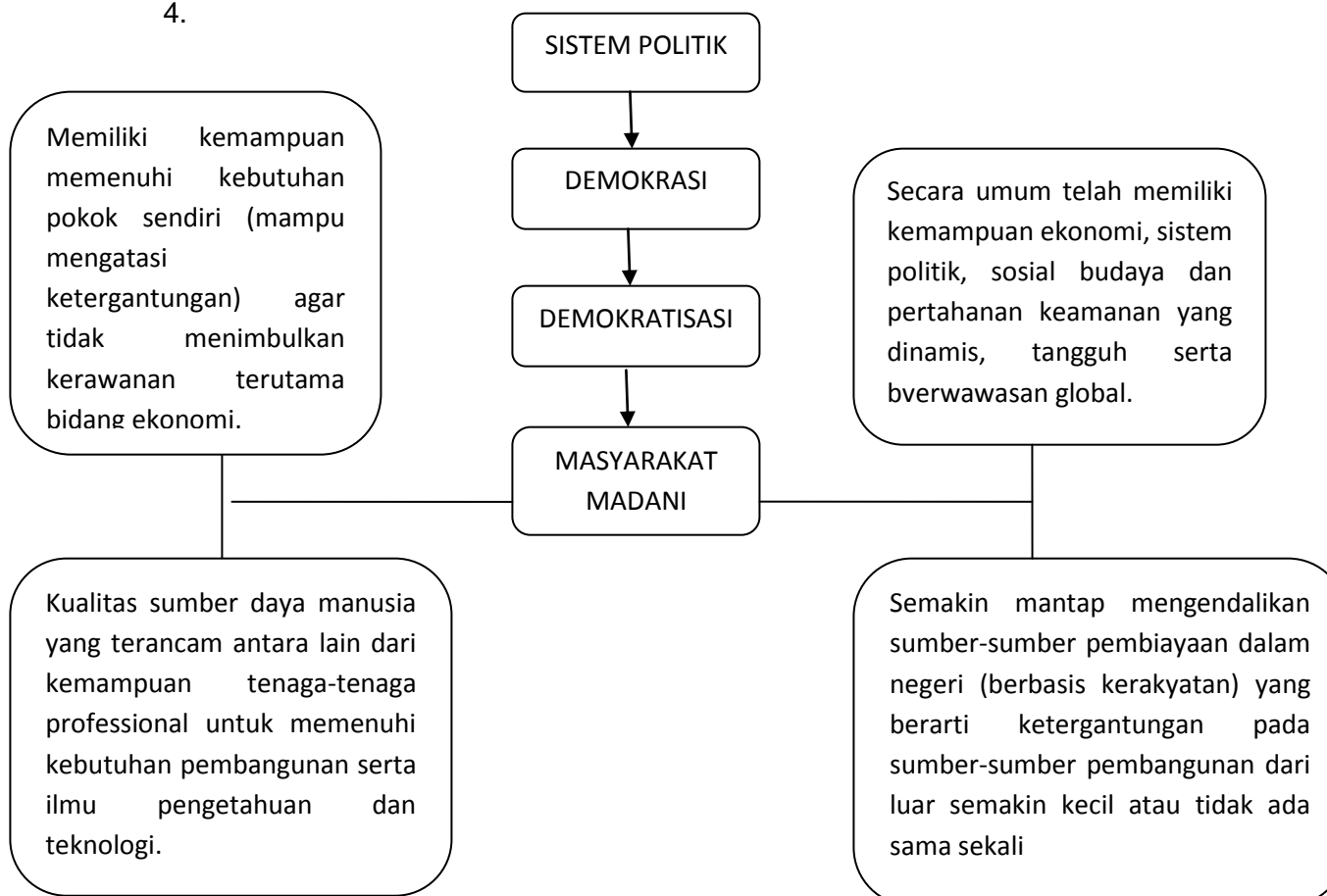
Keempat : merupakan bagian dari sistem dengan struktur **non-dominatif (plural)**, yaitu meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terhadap kekuatan negara, namun masyarakat madani adalah bagian dari komponen-komponen negara.

Kelima : **Termanifestasi dilaam organisasi**, yaitu prinsip-prinsip organisasi depegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material.

3. Karakteristik masyarakat madani :

- a) Free Public Sphere, adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.
- b) Demokratis, merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.
- c) Toleran, suatu sikap yang dikembangkan masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.
- d) Pluralisme, sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani.
- e) Keadilan sosial, untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh spek kehidupan.

4.



J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	5	10-17	20	20
2.	5	12-20	25	25
3.	5	12-25	25	25
4.	5	15-25	30	30
Total Skor				100

K. Soal Pemahaman

Setelah mempelajari mengenai materi “ciri-ciri masyarakat madani (pengertian, ciri-ciri, karakteristik dll), lakukan diskusi kelompok. Langkah-langkah :

- a) Bentuk kelompok 4-5 orang anggota setiap kelompok.
- b) Siswa berdiskusi untuk membuat wacana atau kliping sesuai dengan topik pembelajaran.
- c) Setiap kelompok bekerja sama (berdiskusi untuk menemukan ide pokok serta member tanggapan terhadap wacana atau kliping (ditulis pada bagian belakang wacana/klipin kemudian distaples).
- d) Buatlah kesimpulan bersama (setiap kelompok).
- e) Dikumpulkan!

Mlati, 19 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI

1. Konsep Masyarakati Madani (*Civil Society*)

Istilah masyarakat madani atau dalam bahasa Inggris disebut Civil Society pertama dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah *societies civilis*. Cicero memahaminya identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai/norma hukum dipatuhi masyarakat.

Civil society berasal dari dunia barat yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain:

- a) Diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil. Civil artinya warga negara suatu negara society artinya masyarakat.
- b) Diterjemahkan dengan istilah masyarakat beradab/peradaban. Diterjemahkan dari civilized (beradab) dan society (masyarakat).
- c) Diterjemahkan dengan istilah masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata madinah kota tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata Madaniyah yang artinya peradaban, masyarakat madani juga berarti masyarakat yang beradab.
- d) Berkaitan dengan hal diatas, Civil Society diartikan sebagai masyarakat kota. Karena Madinah adalah sebuah negara kota (city-state) yang mengingatkan kita pada polis di zaman Yunani Kuno. Masyarakat kota sebagai model masyarakat yang beradab.
- e) Diterjemahkan sebagai masyarakat warna/kewargaan. Masyarakat disini adalah pengelompokan masyarakat yang bersifat otonom dari negara.

Jadi masyarakat madani adalah konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi.

Indicator, al: menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan atas dasar prinsip saling menghormati, berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antara warga negara dan negara.

Identifikasi ada-tidaknya perkembangan masyarakat madani:

- a) Sifat partisipatif;
- b) Sifat otonom;

- c) Tidak bebas nilai;
- d) Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural);
- e) Termanifestasi dalam organisasi.

2. Karakteristik Masyarakat Madani

Untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan beberapa persyaratan yang sekaligus menjadi karakteristik masyarakat tersebut. Prasyarat-prasyarat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain itu meliputi :

a) Free public Sphere (ruang public untuk berpendapat)

Adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang public yang bebas setiap warga negara dalam posisi yang setara mampu menyampaikan pendapat, mempublikasi informasi dan menyalurkan aspirasi tanpa tekanan dan kekhawatiran.

b) Demokratis

Merupakan syarat mutlak terwujudnya masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku sopan dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama.

c) Toleransi

Merupakan sikap yang dikembangkan dan dibesarkan pada kesabaran setiap anggota masyarakat (warga negara) untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berbeda.

d) Pluralisme (kemajemukan)

Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

e) Keadilan sosial

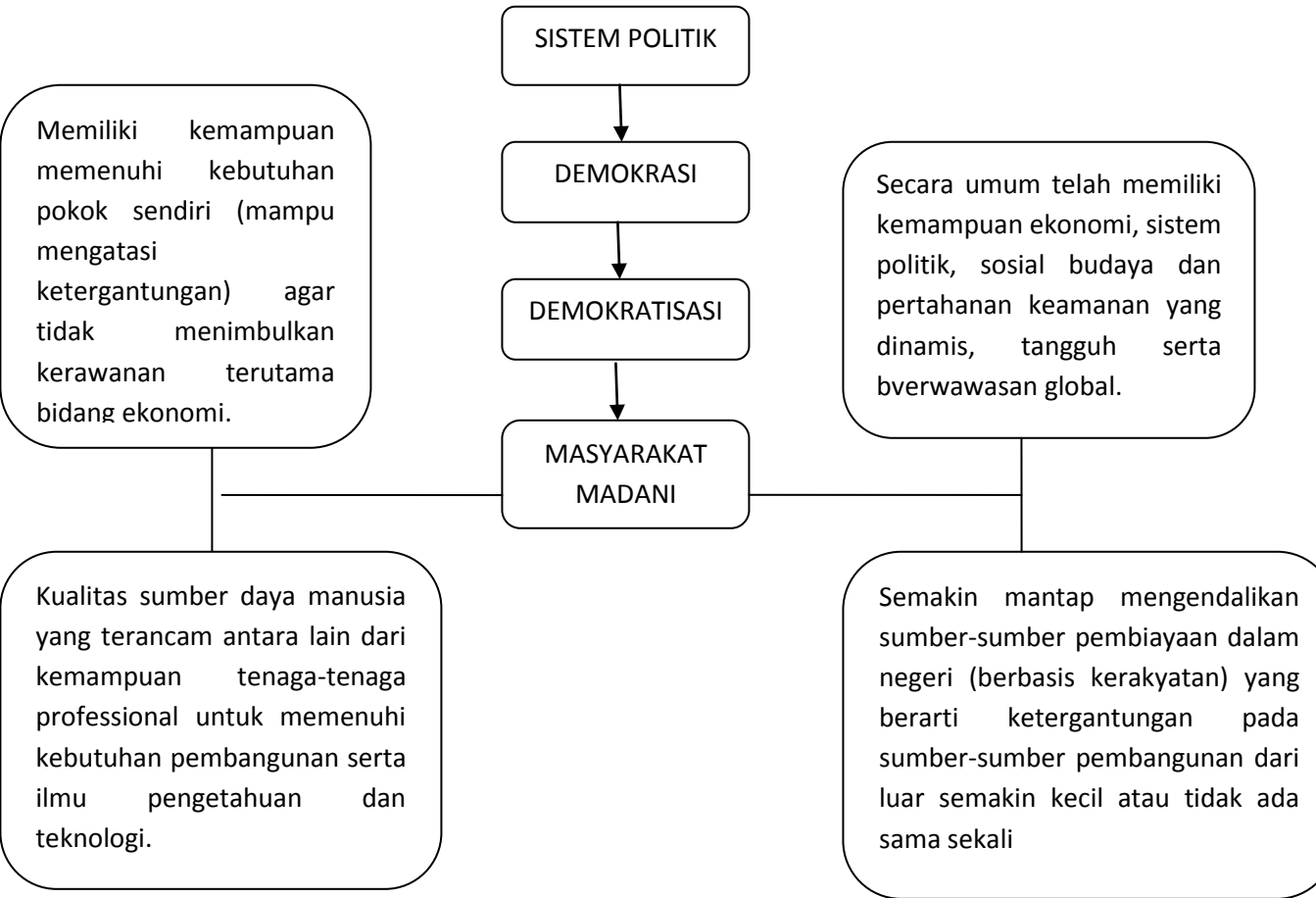
Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

3. Menuju Masyarakat Madani

Masyarakat madani (civil society), merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

Masyarakat telah mampu mengembangkan gotong royong, musyawarah dan toleransi dengan berdasarkan nilai-nilai tradisional. Mereka juga telah mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan dan menghargai keberagaman.

Prasayarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi.



Kendala-kenda yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani :

- a) Tingkat pendidikan
 - b) Pendapatan
 - c) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah
 - d) Adanya budaya/kultur masyarakat yang belum sesuai dengan demokrasi.
- Misal : sikap paternalistic dan sikap belum menerima perbedaan pendapat sebagian masyarakat.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati

Kelas/Semester : XI/ 1 (satu)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1x pertemuan)

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.

- A. Standar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
- B. Kompetensi Dasar
- 2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
- C. Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa
1	2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi	Mengidentifikasi demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi	Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai pendapat, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, tanggung jawab.
		Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi	

- D. Tujuan Pembelajaran
- Siswa mampu :

1. Mengidentifikasi demokrasi liberal, terpimpin , Pancasila dan era reformasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan/mengamati tayangan video dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami secara benar mengenai demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia.
2. Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan/mengamati tayang video dari guru, sehingga diharapkan dapat memahami secara benar mengenai demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia.

E. Materi Pembelajaran

1. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
 - a) Demokrasi Liberal (17-8-1950 s.d 5-7-1959)
 - b) Demokrasi Terpimpin (5-7-1959 s.d 1965)
 - c) Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d 1998)
 - d) Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d Sekarang)

F. Metode Pembelajaran

1. Kuis
2. Ceramah
3. Two Stay Two Stray

G. Media, Alat dan Bahan Pembelajaran

1. Media Pembelajaran : PowerPoint, Video/Gambar
2. Alat Pembelajaran : LCD Proyektor, Spidol
3. Bahan Pembelajaran :
 - a. Budiyanto. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI”. PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga: Jakarta.
 - b. Putrianti, Widiarti, Zulaika. 2016. “Pendidikan Kewarganegaraan”. MGMP Pendidikan Kewarganegaraan: Sleman.
 - c. Suyatmi, Henny Hendrastuti. 2011. “Pendidikan Kewarganegaraan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan VII

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan kelas agar kondusif (berdoa dan absensi)• Mengondisikan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar	15 menit

	<ul style="list-style-type: none">• Apersepsi (Kuis)*• Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">• Eksplorasi Dalam kegiatan eksplorasi:<ul style="list-style-type: none">✓ Siswa mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.✓ Siswa mengidentifikasi demokrasi liberal✓ Siswa mengidentifikasi demokrasi terpimpin.✓ Siswa mengidentifikasi demokrasi Pancasila.✓ Mengidentifikasi demokrasi era reformasi.✓ Menguraikan demokrasi liberal, terpimpin, pancasila dan era reformasi.• Elaborasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan elaborasi: Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil (kelompok kooperatif), guru menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing anggota kelompok yaitu mengenai materi pada pertemuan ke VII setelah selesai berdiskusi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara menyeluruh dalam diskusi kelas dan mengambil kesimpulan.• Konfirmasi<ul style="list-style-type: none">✓ Dalam kegiatan konfirmasi :	60 menit

	menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui, menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.	
3. Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi • Kesimpulan • Motivasi • Salam Penutup 	15 enit

I. Penilaian dan Tindak Lanjut

Indikator Pencapaian Kompetensi	Penilaian		
	Teknik	Bentuk Instrumen	Instrumen Soal
1. Menganalisis pelaksanaan demokras di Indonesia	Tes Tertulis	Uraian	<p>a. Jelaskan langkah awal yang dilalui Indonesia dalam melakukan demokratisasi !</p> <p>b. Sebut dan Jelaskan cara kerja pada kabinet demokrasi liberal!</p> <p>c. Sebutkan minimal 3 hal positif pada masa demokrasi liberal!</p> <p>d. Sebutkan ketentuan pokok dekrit presiden 5 Juli 1959!</p>

			<p>e. Jelaskan mengenai demokrasi Pancasila Orde Baru!</p> <p>f. Sebut dan jelaskan agenda utama reformasi!</p>
<p>2. Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal, dipimpin, Pancasila dan era reformasi</p>	<p>Tes Tertulis</p>	<p>Uraian</p>	<p>a. Jelaskan perbedaan demokrasi liberal, dipimpin, pancasila dan era reformasi dan mana yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia!</p>

***SOAL KUIS :**

1. Apa ciri-ciri demokrasi Liberal?
2. Sebutkanketentuan pokok dekrit Presiden 5 Juli 1959!
3. Sebutkan hal positif yang terjadi di masa demokrasi Parlementer!
4. Sebutkan cabinet apa saja yang ada saat demokrasi liberal!
5. Sebutkan agenda utama pada demokrasi reformasi!
6. Apa fungsi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?
7. Demokrasi Pancasila dilaksanakan pada tahun?
8. Apa saja ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dengan sistem politik Indonesia?

Kunci Jawaban :

1. Langkah awal demokratisasi di Indonesia, dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden No. X tgl 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik KNIP (Sebagai salah satu alat kelengkapan negara), semua berfungsi sebagai pembantu presiden selanjutnya beralih menjadi DPR/MPR.

2. Cara kerja demokrasi liberal :
 - a) Kekuasaan legislative dijalankan oleh DPR, partai politik yang menguasai suara mayoritas di DPR membentuk kabinet.
 - b) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh cabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen.
 - c) Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri.
 - d) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
 - e) Jika DPR atau parlemen menilai kerja menteri kurang baik maka parlemen mengajukan mosi tidak percaya, maka menteri harus meletakkan jabatannya.
 - f) Jika cabinet bubar maka presiden menunjuk formatur cabinet untuk menyusun cabinet baru.
 - g) Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada cabinet yang baru maka DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.
3. Hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer :
 - a) Badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya.
 - b) Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar.
 - c) Jumlah sekolah bertambah.
 - d) Cabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan RMS, DI/TII.
4. Ketentuan pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
 - a) Menetapkan pembubaran konstituante.
 - b) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali lagi segenap bangsa Indonesia.
 - c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
5. Demokrasi Pancasila Orde Baru, awalnya bercita-cita menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu ORBA menampilkan sistem politik baru dengan nama “demokrasi konstitusional” atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Agenda utama reformasi :
 - a) Pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
 - b) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa).
 - c) Penegakan hukum.
 - d) Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

7. Perbedaan antara demokrasi liberal, terpimpin, pancasila dan era reformasi :

a) Demokrasi Liberal

Kunci Jawaban Kuis :

1. Ciri-ciri demokrasi liberal :

- a) Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan;
- b) Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional;
- c) Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol;
- d) Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.

2. Ketentuan pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

- a) Menetapkan pembubaran konstituante.
- b) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali lagi segenap bangsa Indonesia.
- c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.

3. Hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer :

- a) Badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya.
- b) Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar.
- c) Jumlah sekolah bertambah.
- d) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan RMS, DI/TII.

4. Kabinet yang ada saat demokrasi liberal :

- a) Kabinet Natsir;
- b) Kabinet Soekiman-Soewiryo;
- c) Kabinet Wilopo;
- d) Kabinet Ali Sastrowijoyo;
- e) Kabinet Bahanudin Harahap dan Masyumi;
- f) Kabinet Ali II;
- g) Kabinet Juanda.

5. Agenda utama reformasi :

- e) Pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
- f) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa).
- g) Penegakan hukum.
- h) Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

6. Fungsi KNIP :

- a) Awalnya sebagai pembantu Presiden yang selanjutnya beralih pada DPR/MPR, jadi KNIP merupakan cikal bakal adanya DPR/MPR sekarang ini.

- b) Sehingga memiliki kewenangan legislatif untuk membentuk UU dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- 7. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1966 sampai 1998.
- 8. Ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dengan sistem politik Indonesia :
 - a) Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.
 - b) Tidak ada partai yang dominan (kepala negara sikapnya mengambang diantara kepentingan banyak partai).
 - c) Dalam sistem multi partai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif.

J. Pedoman Penskoran

No	Skor Jawaban			Skor Maksimal
	Salah	Cukup Baik	Baik/Sempurna	
1.	5	7-10	15	15
2.	5	7-10	15	15
3.	3	5-7	10	10
4.	5	7-10	15	15
5.	5	7-10	15	15
6.	5	7-10	15	15
7.	5	7-10	15	15
Total Skor				100

Mlati, 19 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd . M.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN MATERI

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Langkah awal demokratisasi di Indonesia, dilakukan melalui penerbitan Maklumat Wakil Presiden No. X, tgl 3 November 1945 tentang anjuran untuk membentuk partai politik KNIP (sebagai salah satu alat kelengkapan negara), semula berfungsi sebagai pembantu presiden, selanjutnya beralih menjadi DPR/MPR.

Pada November 1945, kabinet presidensial diganti menjadi kabinet parlementer dengan perdana menteri Sultan Syahrir. Pasca agresi militer Belanda II (19 Des 1945), negara Indonesia terpecah dan terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal.

1. Demokrasi Liberal (17-8-1950 s.d 5-7-1959)

Demokrasi parlementer/liberal (RIS dan UUDS 1950), pada masa ini Indonesia memakai sistem demokrasi parlementer. Cara kerja:

- a) Kekuasaan legislative dijalankan oleh DPR, partai politik yang menguasai suara mayoritas di DPR membentuk kabinet.
- b) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/Dewan menteri dibawah pimpinan Perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen.
- c) Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri.
- d) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
- e) Jika DPR atau parlemen menilai kinerja menteri kurang baik maka parlemen mengajukan mosi tak percaya, maka menteri harus meletakkan jabatannya.
- f) Jika kabinet bubar maka presiden menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru.
- g) Jika DPR atau parlemen mengajukan mosi tak percaya pada kabinet yang baru, maka DPR atau parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Tentang peristiwa jatuh banggunya kabinet, adalah berikut ini:

- a) Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951), merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal.
- b) Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April 1951-3 April 1952), dipimpin oleh Soekiman-Soewiryo (koalisi Masyumi-PNI).
- c) Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953), kabinet ini merintis sistem zanken kabinet (terdiri dari para ahli dibidangnya).

- d) Kabinet Ali Sastrowijoyo I (31 Juli 1953- 12 Agustus 1955), merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI-NU (Masyumi menjadi oposisi).
- e) Kabinet Bahanudin Harahap dari masyumi (12 Agustus 1955-3 Maret 1959).
- f) Kabinet Ali II (20 Maret 1955- 14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi dan NU.
- g) Kabinet Juanda (9 April 1957) merupakan kabinet.

Hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer:

- a) Usia atau masa kerja kabinet rata-rata pendek, selama kurun waktu 1950-1959 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet.
- b) Ketidak serasian hubungan antara dalam tubuh angkatan bersenjata. Sebagian concong ke kabinet Wilopo sebagian condong ke Presiden Soekarno.
- c) Masa kampanye jadi panjang (1953-1955), sehingga meningkatnya ketegangan di masyarakat.
- d) Kebijakan beberapa perdana menteri cenderung menguntungkan partainya.
- e) Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah seperti pemberontakan Permesta dan PRRI.

Hal-hal positif terjadi dimasa demokrasi parlementer:

- a) Badan peradilan menikmati kebebasannya dalam menjalankan fungsinya.
- b) Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar.
- c) Jumlah sekolah bertambah.
- d) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan RMS, DI/TII.
- e) Sedikit ketegangan diantara umat beragama.
- f) Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dan pemerintahan.
- g) Nama baik Indonesia di internasional dan berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung April 1955.

2. Demokrasi terpimpin (5-7-1959 s.d 1965)

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali dan berakhirilah UUDS 1950. Dekrit presiden diterima oleh rakyat dan didukung oleh TNI D, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, kedudukan DPR dan presiden berada di bawah MPR. Dekrit presiden memuat ketentuan pokok yang meliputi:

- a) Menetapkan pembubaran konstituante.
- b) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia.
- c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.

Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem demokrasi terpimpin. Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan dalam

implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara yang justru bertentangan dengan UUD 1945, presiden banyak menentukan yang bukan kewenangannya.

Sidang umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakom. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi tahun 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin.

3. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 s.d 1998)

Awal kebangkitan orde baru, bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara umum dan konsekuen. Atas dukungan mahasiswa, TNI, dan rakyat ketika itu, orba baru menampilkan sistem politik baru dengan nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila. Perjalanan kurun waktu orde baru:

- a) Sampai dengan tahun 1970-an, masih dalam koridor.
- b) Era 1980 dan 1990-an proses pembangunan ekonomi dipegang panglima (ABRI), sehingga timbul kesenjangan dan banyak praktik KKN.
- c) Akhir 1997, muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Tanggal 21 Mei 1998 berhasil menurunkan Presiden Soeharto.

4. Demokrasi Era Reformasi (1998 s.d Sekarang)

Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden Dr. Ir. B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto sebagai presiden, karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan. Pelaksanaan pemilu pada 7 Juni 1999, dianggap paling jujur dan adil dibandingkan pemilu sebelumnya.

Pemilu telah melahirkan banyak partai politik, antara lain: PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan (sebanyak 48 parpol). Dalam perkembangannya demokrasi di era reformasi, peran mahasiswa, kelompok kepentingan dan komponen rakyat Indonesia ingin agar dilaksanakan reformasi total disegala bidang.

Agenda utama reformasi:

- a) Pemberantasan terhadap KKN.
- b) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa).
- c) Penegakan hukum dan
- d) Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

LAMPIRAN 7
DAFTAR HADIR SISWA
KELAS XI IPA 1

Absen														
Hadir														
Tanggal Tatap Muka														

Laki-laki	10
Perempuan	22
Jumlah	32

Mlati,
Guru Mata Pela



Ervin Iswandaya
NIP 19711217 1

865856

Doc. No.	:	FW/Waka-Kur/DH
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

r : 1/2
elajaran : 2016/2017

[illegible]

jaran



ani, S.Pd

199702 2 004

LAMPIRAN 8
DAFTAR HADIR SISWA
KELAS XI IPS 1

[illegible]

LAMPIRAN 9
DAFTAR HADIR SISWA
KELAS X IIS 1



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
SMA NEGERI 1 MLATI

Alamat : Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 55286. Telp (0274)86581

DAFTAR HADIR SISWA

Kelas : X IIS 1
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Semester
Tahun Pelajaran

Nomor		Nama Siswa	L/P	Tatap Muka Ke-													
Urut	Induk			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2547	Adisya Adriana	P
2	2548	Ana Wulan Suci	P
3	2549	Aninda Faradila Sari	P
4	2550	Arindra Widi Pratama	P
5	2551	Atarika Dinda Pramesti	P
6	2552	David Herjuanto	L
7	2553	Delvila Dewi Cornelia	P
8	2554	Dian Risnani Widyantari	P
9	2555	Fatma Kumalasari	P
10	2556	Fauzan Margi Wijayanto	L
11	2557	Fauzan Noviatmoko	L
12	2558	Husni Mulia Arkhab	P
13	2559	Indriani Ayuningtyas	P
14	2560	Laili Khamidah	P
15	256	Luluk Nur Fadhilah	P
16	2562	Mentari Anggari Satria W.	P	i
17	2563	Muhamad Krisna Andi Hakim	L
18	2564	Nadia Zulva Pratiwi	P
19	2565	Noor Farida Juliana	P
20	2566	Novalia Herawati	P
21	2567	Nur Istinavi Muzarkisyah	P
22	2568	Ratna Noviana	P
23	2569	Ridwan Gigih Nur Hisyam	L
24	2570	Rivalda Rachma Lianty	L
25	2571	Salsabila Tarisa Putri	P
26	2572	Sekar Indriyani	P	.	.	.	s
27	2573	Taskiya Hanif Fadhilanisa	P
28	2574	Tiara Sonya Pitaloka	P
		Absen															
		Hadir															
		Tanggal Tatap Muka															

Perempuan	19
Jumlah	28

Guru Mata Pelajaran



Ervin Iswandayani, S.P
NIP 19711217 199702

[illegible]



'd
2 004

LAMPIRAN 10
KISI-KISI SOAL UH 1
KELAS XI IPA 1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		sosialisasi pengembangan budaya politik. - proses sosialisasi politik. - sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang - Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik		budaya politik. • Mengidentifikasi proses sosialisasi politik. • Mendeskripsikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang • Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik	Essay	
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	- pengertian partisipasi politik. - konsep partisipasi politik - praktik partisipasi politik. - tingkat partisipasi politik - debat politik	X/1	• Mendeskripsikan pengertian partisipasi politik. • Memetakan konsep partisipasi politik. • Mengaplikasikan praktik partisipasi politik. • Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik • Mendeskripsikan tentang debat politik	Pilihan Ganda Uraian Singkat Essay	11, 12, 13, 14, 15 6, 7 1,2,3

Mlati, 1 Agustus 2016
Guru Mata Pelajaran

Lisa Ristyaningsih
NIM 13401244017

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL ULANGAN HARIAN 1
TAHUN AJARAN 2016/2017**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Alokasi Waktu : 90 menit
Bentuk Soal & Jumlah : 1. Pilihan Ganda : 20 butir
2. Uraian : 5 butir

Program : IIS
Kurikulum : Kurikulum 2013

Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan kementerian negara Indonesia.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam tugas dan fungsi kedudukan kementerian negara Indonesia Mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara. 	Pilihan ganda	1,
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	Macam-macam sistem kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan macam-macam sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. 	Pilihan ganda	2,3,4,5,6,7 ,
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Tugas dan fungsi lembaga kemeterian Indonesia dan lembaga non kemeterian. Dan	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. 	Pilihan ganda	8,9,10,11, 11,12, 13, 14,15, 17, 18, 19, 20.

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		klasifikasi kementerian negara Indonesia.		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tugas dan fungsi kementerian negara. • Mampu mendeskripsikan tugas dari kementerian-kementerian negara. • Mengetahui klasifikasi lembaga kementerian Negara Indonesia dan Non Kementerian Indonesia. 	Uraian	1,3
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Bentuk praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengkritisi nilai-nilai pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. • Mampu memberikan keputusan bersama tentang praktik penyelenggaraan negara. • Mampu memberikan contoh praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 	Pilihan Ganda Uraian	16, 2,4,5

Mlati, 1 Agustus 2016
Mahasiswa PPL UNY 2016

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM 13401241012

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286
Telepon (0274) 865856, Faksimile (0274) 865856
Website: www.sman1mlati.sch.id, E-mail: smasatumlati@yahoo.co.id

NASKAH SOAL
ULANGAN HARIAN 1
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI/IPA
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2016
Waktu : 2 JP

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum Anda mengerjakan.
2. Bacalah dengan teliti petunjuk cara mengerjakan soal sebelum Anda menjawab.
3. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat tulisan yang kurang jelas.
4. Jumlah soal sebanyak 25 butir: 15 pilihan ganda, 7 uraian singkat dan 3 essay.

SELAMAT BEKERJA

PETUNJUK KHUSUS

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda Silang (X) huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawaban yang telah tersedia !

1. Setiap warga negara merupakan insan politik dari suatu sistem politik suatu negara. Kebudayaan masyarakat dengan cirri-ciri yang lebih khas disebut
 - a. Perilaku Politik
 - b. Budaya Politik
 - c. Sistem Politik
 - d. Kepentingan Politik
 - e. Organisasi Politik
2. Budaya politik berdasarkan taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Ranah yang berhubungan dengan pengetahuan
 - a. Evaluatif
 - b. Afektif
 - c. Psikomotorik
 - d. Kognitif
 - e. Atraktif
3. Komponen objek politik yang berupa keputusan dan pendapat obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan disebut komponen yang berorientasi
 - a. Kognitif
 - b. Afektif
 - c. Kinestika
 - d. Psikomotorik
 - e. Evaluatif
4. Perhatikan cirri-ciri budaya politik di bawah ini!
 - 1) Masyarakat mempunyai karakter yang efektif

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

- 2) Keikutsertaan masyarakat dikarenakan solidaritas, mobilisasi
- 3) Masyarakat merasa tidak mampu mengubah sistem politik yang ada
- 4) Masyarakat menyadari otoritas pemerintah
- 5) Masyarakat mampu memberi evaluasi terhadap proses politik

Dari pernyataan diatas yang merupakan ciri budaya politik subjek ditunjukkan nomor

- a. 3,4,5
 - b. 1,3,5
 - c. 1,3,4
 - d. 1,2,3
 - e. 2,3,4
5. Dilihat dari gaya kepemimpinannya perkembangan budaya politik pada masa orde baru adalah
- a. Demokratik
 - b. Ideologi primordial
 - c. Otokratik
 - d. Kharismatik, Ideologi
 - e. Pragmatik Patrimonial
6. Budaya politik dengan sikap mental yang mutlak memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap sempurna dan tidak dapat di ubah lagi merupakan cirri budaya politik
- a. Militan
 - b. Toleransi
 - c. Sikap mental absolut
 - d. Sikap mental akomodatif
 - e. Parokial
7. Dibawah ini yang merupakan fungsi output politik adalah
- a. Pembuatan kebijakan, tujuan sosialisasi politik
 - b. Penerapan kebijakan, fungsi sosialisasi politik
 - c. Sifat sosialisasi politik, hakikat sosialisasi politik
 - d. Ajudikasi kebijakan, peranan sosialisasi politik
 - e. Penerapan kebijakan, ajudikasi kebijakan, pembuatan kebijakan
8. Sekolah menjadi salah satu sarana sosialisasi politik yang penting karena
- a. Sekolah merupakan tempat penanaman nilai-nilai politik yang actual
 - b. Sekolahh merupakan faktor penentu dalam sosialisasi politik
 - c. Sekolah merupakan tempat yang akan menghasilkan masyarakat aktif dalam berpolitik
 - d. Siswa akan memperoleh pengetahuan awal tentang politik yang benar dari sudut akademis
 - e. Siswa dapat mengetahui perkembangan politik secara efisien
9. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik disebut

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

- a. Rekrutmen politik
 - b. Artikulasi politik
 - c. Sosialisasi politik
 - d. Partisipasi politik
 - e. Kepentingan politik
10. Proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik secara *emotional learning* maupun indoktrinasi politik yang manifes dan dimediasi, Pengertian tersebut di kemukakan oleh
- a. Robert Le Vine
 - b. Hyman
 - c. Myron Weiner
 - d. Irvin L. Child
 - e. Sidney Verba
11. Berikut merupakan fungsi dari partai politik, *kecuali*
- a. Represi
 - b. Rekrutmen politik
 - c. Artikulasi kepentingan
 - d. Persuasi
 - e. Reshuffle
12. Hal yang harus dihindari oleh masyarakat ketika pesta demokrasi diselenggarakan adalah
- a. Melaksanakan pemilu dengan tertib
 - b. Menjadi golput dalam pemilu
 - c. Member kebebasan menentukan pilihan
 - d. Melaksanakan pemilu dengan asas *luberjurdil*
 - e. Tidak menekan masyarakat untuk memilih
13. Perhatikan uraian dasar hukum berikut!
- 1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998
 - 4) Undang-Undang No 39 Tahun 2008
 - 5) Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945
- Dari uraian diatas yang merupakan dasar hukum debat politik, *kecuali*
- a. 1 & 2
 - b. 1 & 3
 - c. 2 & 3
 - d. 3 & 4
 - e. 4 & 5
14. Perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan berseedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan terlebih perubahan yang serba cepat merupakan cirri perilaku politik
- a. Radikal
 - b. Moderat
 - c. Status Quo
 - d. Konservatif
 - e. Liberal
15. Yang tidak termasuk wujud partisipasi positif masyarakat sebagai insan politik antara lain sebagai berikut

- a. Membentuk organisasi sosial politik
- b. Aktif dalam partai politik
- c. Memprovokasi masa untuk menentang kebijakan politik secara anarki
- d. Memperjuangkan hak politik
- e. Tidak menjadi golongan putih saat pemilu

A. Uraian Singkat. Isilah titik-titik dibawah ini! (skor 25)

Budaya politik di Indonesia memiliki tiga tipe budaya politik, yang diantaranya adalah _____, _____, _____. Selain itu budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan yang salah satunya adalah budaya politik _____ dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternative yang baik. Di sadari ataupun tidak pada dasarnya setiap warga negara merupakan insan politik dari suatu sistem politik di suatu negara yang mana ada seorang tokoh ahli bernama _____ yang mengemukakan pendapatnya mengenai budaya politik yaitu sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik di lakukan.

_____ merupakan salah satu fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, dictator maupun sistem politik lainnya. Dalam proses sosialisasi politik Rush dan Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi politik yang terbagi menjadi dua yaitu _____ dan _____.

Dalam perkembangannya adanya konsep partisipasi politik semakin dianggap penting karena member gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dengan demikian salah satu ahli bernama _____ mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Adanya macam-macam politik yaitu radikal, moderat, _____, _____, dan _____ yang merupakan wujud dari tingkah laku para aktor politik, warga negara atau interaksi antar pemerintah dan masyarakat.

B. Essay (skor 60)

Lengkapilah bagian kosong di dalam tabel!

No.	Nama Sistem	Kelebihan Sistem	Kekurangan
1.	a. Rakyat mengenal dengan baik orang	a. Suara dari peserta pemilu yang kalah

		<p>yang mewakili daerahnya.</p> <p>b. Wakil setiap daerah sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	<p>akan hilang, tidak dapat digabungkan.</p> <p>b.</p> <p>c. Wakil rakyat yang menang dalam satu wilayah lebih memperhatikan wilayahnya sendiri, terkadang mengabaikan kepentingan nasional.</p> <p>d.</p>
2.	Proporsional	<p>a.</p> <p>b.</p>	<p>a. Peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam penetapan daftar calon Badan Perwakilan Rakyat.</p> <p>b. Calon-calon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang atau tidak dikenal oleh</p>

		c.	<p>pemilih.</p> <p>c.</p>
3.	Gabungan	<p>a. Sistem pemilihan presiden langsung lebih demokratis karena langsung melibatkan partisipasi rakyat.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	<p>a. Sistem memberikan peluang untuk menguntungkan kandidat dari partai besar dengan dana besar.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

===== Selamat Mengerjakan & Semoga Sukses =====

LAMPIRAN 13
LEMBAR SOAL UH 1
KELAS X IIS 1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286
Telepon (0274) 865856, Faksimile (0274) 865856
Website: www.sman1mlati.sch.id, E-mail: smasatumlati@yahoo.co.id

NASKAH SOAL
ULANGAN HARIAN 1
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X/IIS
Hari, Tanggal : Senin, 15 Agustus 2016
Waktu : 2 JP

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum Anda mengerjakan.
2. Bacalah dengan teliti petunjuk cara mengerjakan soal sebelum Anda menjawab.
3. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat tulisan yang kurang jelas.
4. Jumlah soal sebanyak 25 butir: 20 pilihan ganda dan 5 uraian.

SELAMAT BEKERJA

PETUNJUK KHUSUS

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda Silang (X) huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawaban yang telah tersedia !

1. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya disebut
 - a. Kekuasaan
 - b. Kekuasaan Negara
 - c. Kekuasaan Pemerintah
 - d. Kekuasaan Aktor Politik
 - e. Kekuasaan Eksekutif
2. Secara berurutan macam-macam kekuasaan menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* adalah
 - a. Kekuasaan yudikatif, legislatif, federatif
 - b. Kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif
 - c. Kekuasaan federatif, eksekutif, legislatif
 - d. Kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif
 - e. Kekuasaan eksekutif, legislative, federatif
3. Kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai organnya maupun fungsinya merupakan pengertian
 - a. Kekuasaan
 - b. Pembagian Kekuasaan
 - c. Pemisahan Kekuasaan
 - d. Pemusatan Kekuasaan
 - e. Pelaksanaan Kekuasaan
4. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal
 - a. Pasal 2 ayat (1)
 - b. Pasal 2 ayat (2)
 - c. Pasal 3 ayat (1)
 - d. Pasal 23E ayat (2)
 - e. Pasal 23 ayat (1)

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

5. Dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri merupakan wujud kekuasaan
 - a. Kekuasaan Konstitutif
 - b. Kekuasaan Eksekutif
 - c. Kekuasaan Moneter
 - d. Kekuasaan Inspektif
 - e. Kekuasaan Legislatif
6. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD, Gubernur/wakil Gubernur dan DPRD provinsi merupakan tingkatan pemerintahan melalui sistem pembagian kekuasaan secara
 - a. Vertikal
 - b. Horizontal
 - c. Vertikal dan Horizontal
 - d. Bertingkat
 - e. Berjenjang
7. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi asas
 - a. Demokrasi
 - b. Kepastian Hukum
 - c. Kepentingan Umum
 - d. Proporsionalitas
 - e. Desentralisasi
8. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal diatur dalam UUD 1945 pasal
 - a. Pasal 28 A
 - b. Pasal 18 ayat (2)
 - c. Pasal 28 C
 - d. Pasal 18 ayat (5)
 - e. Pasal 8 ayat (1)
9. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah merupakan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada
 - a. Pemerintahan Daerah
 - b. Pemerintahan Pusat
 - c. Kementrian Negara
 - d. Aparatur Negara
 - e. Presiden
10. Perhatikan kementrian di bawah ini!
 - 1) Kementrian Dalam Negeri
 - 2) Kementerian Pekerjaan Umum
 - 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 4) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


Dari pernyataan diatas yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 ditunjukkan nomor

 - a. 1,2,3
 - d. 2,3,4

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

- e. Tahun 104 Tahun 2013
16. Dalam Pancasila yang menunjukkan mencakup tugas dari Kementrian termasuk dalam sila ke
- 1 dan 2
 - 1, 2 dan 3
 - 1, 2, 3 dan 4
 - 1,3,4 dan 5
 - 1,2,3,4 dan 5
17. Setelah di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo Menteri Perhubungan diduduki oleh
- Sri Mulyani
 - Eko Putro Sanjoyo
 - Budi Karya Sumadi
 - Airlangga Hartarto
 - Enggartiaso Lukita
18. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
- memilih Presiden dan wakil presiden
 - mengubah dan menetapkan UUD
 - melantik presiden dan wakil presiden
 - memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.
- Yang merupakan tugas dan wewenang MPR adalah
- 1,2,3
 - 1,3,5
 - 2,3,4
 - 1,3,4
 - 1,2,3,4
19. Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali
- memutus pembubaran partai politik
 - memutus perselisihan tentang hasil pemilu
 - memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum
 - menguji UUD terhadap Undang-Undang
 - memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
20. Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan kemauan Negara, merupakan tugas dari lembaga
- eksekutif
 - legislative
 - yudikatif
 - DPR
 - MPR

A. URAIAN (Skor 80)
Isilah kolom yang kosong!

No.	Gambar	Nama	Jabatan
1.		Archandra Tahar
2.	
3.		Menteri PAN dan RB
4.	
5.	

===== Selamat Mengerjakan & Semoga Sukses =====
 BERANI JUJUR HEBAT!!!!

LAMPIRAN 14
KISI-KISI SOAL
REMIDIAL 1 KELAS XI
IPA 1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL REMIDIAL
TAHUN AJARAN 2015/2016**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Program : IPA
Kurikulum : KTSP

Alokasi Waktu : 60 menit
Bentuk Soal & Jumlah : 1. Uraian : 5 butir
Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian budaya politik secara umum - Pengertian budaya politik menurut para ahli. 	XI/1	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan budaya politik. - Menganalisis budaya politik yang ada di Indonesia maupun negara lain. 	Uraian	1
2.	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - komponen-komponen budaya politik di Indonesia. - tipe-tipe budaya politik. 	XI/1	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur budaya politik yang muncul di Indonesia. - Tipe-tipe budaya politik. 	Uraian	2, 3, 4
3.	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian sosialisasi. - Proses sosialisasi politik. - Sosialisasi politik dalam 	XI/1	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi politik. - Komunikasi politik. 		5

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
		masyarakat berkembang. - Sosialisasi politik dan komunikasi politik.				

Mlati 15 September 2016
Mahasiswa KKN UNY 2016

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN 15
KISI-KISI SOAL
REMIDIAL KELAS X IIS

1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

**KISI-KISI PENULISAN SOAL REMIDIAL
TAHUN AJARAN 2015/2016**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Program : IIS
Kurikulum : Kurikulum 2013

Alokasi Waktu : 60 menit
Bentuk Soal & Jumlah : 1. Uraian : 5 butir
Jenis Soal : Tertulis

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1.	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Nilai-Nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan kementerian negara Indonesia.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara. Mensyukuri keberadaan nilai-nilai pancasila dalam tugas dan fungsi kedudukan kementerian negara Indonesia Mampu menjelaskan pengertian kekuasaan negara. 	Uraian	1
2.	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	Macam-macam sistem kekuasaan negara dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan macam-macam sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. 	Uraian	2, 3
3.	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan	Tugas dan fungsi lembaga kementerian Indonesia dan lembaga non kementerian. Dan	X/1	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menyebutkan pasal-pasal yang mengatur sistem pembagian kekuasaan. Mampu menjelaskan tugas dan fungsi 	Uraian	4

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/KS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

No. Urut	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Sem.	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
	pemerintahan negara.	klasifikasi kementerian negara Indonesia.		kementerian negara.		
4.	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	Bentuk praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.	X/1	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengkritisi nilai-nilai pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. • Mampu memberikan keputusan bersama tentang praktik penyelenggaraan negara. • Mampu memberikan contoh praktik penyelenggaraan pemerintah negara yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 	Uraian	5

Mlati, 15 September 2016
Mahasiswa PPL UNY 2016

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN 16
LEMBAR SOAL
REMIDIAL KELAS XI
IPA 1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286
Telepon (0274) 865856, Faksimile (0274) 865856
Website: www.sman1mlati.sch.id, E-mail: smasatumlati@yahoo.co.id

NASKAH SOAL
REMIDI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI/IPA
Hari, Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016
Waktu : 14:00 WIB – selesai

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum Anda mengerjakan.
2. Bacalah dengan teliti petunjuk cara mengerjakan soal sebelum Anda menjawab.
3. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat tulisan yang kurang jelas.
4. Jumlah soal sebanyak 5 butir uraian.

SELAMAT BEKERJA

PETUNJUK KHUSUS

A. URAIAN.

Kerjakan dengan baik, singkat, padat, dan jelas!

1. Berikan tanggapan penjelasan apa yang dimaksud dengan budaya politik dan mengapa budaya politik antara suatu negara dengan negara lain memiliki perbedaan!
2. Tuliskan unsur-unsur budaya politik yang menonjol dalam sistem politik di Indonesia!
3. Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi, berikan contoh dari perbedaan tersebut!
4. Jelaskan bagaimanakah penggolongan budaya politik ditinjau dari sikap, nilai-nilai, informasi, dan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya!
5. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa jika pertanyaan umum dari salah satu pimpinan partai politik/tokoh masyarakat yang bernada militan dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik dalam suatu masyarakat luas!

LAMPIRAN 17
LEMBAR SOAL
REMIDIAL KELAS X IIS

1

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/NS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55286
Telepon (0274) 865856, Faksimile (0274) 865856
Website: www.sman1mlati.sch.id, E-mail: smasatumlati@yahoo.co.id

NASKAH SOAL
REMIDI
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X/IIS
Hari, Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016
Waktu : 14:00 WIB – selesai

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum Anda mengerjakan.
2. Bacalah dengan teliti petunjuk cara mengerjakan soal sebelum Anda menjawab.
3. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat tulisan yang kurang jelas.
4. Jumlah soal sebanyak 5 butir uraian.

SELAMAT BEKERJA

PETUNJUK KHUSUS

A. URAIAN

Jawablah dengan baik, singkat, padat dan jelas!

1. Sebut dan jelaskan menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273), bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga macam kekuasaan!
2. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, jelaskan!
3. Sebut dan jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal!
4. Jelaskan isi dari Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan keberadaan menteri secara tegas!
5. Sebutkan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

LAMPIRAN 18
LEMBAR KUIS KELAS
XI IPA 1

KUIS KELAS XI IPA 1

1. Apa ciri-ciri demokrasi Liberal?
2. Sebutkan ketentuan pokok dekrit Presiden 5 Juli 1959!
3. Sebutkan hal positif yang terjadi di masa demokrasi Parlementer!
4. Sebutkan cabinet apa saja yang ada saat demokrasi liberal!
5. Sebutkan agenda utama pada demokrasi reformasi!
6. Apa fungsi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?
7. Demokrasi Pancasila dilaksanakan pada tahun?
8. Apa saja ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dengan sistem politik Indonesia?

Kunci Jawaban :

1. Ciri-ciri demokrasi liberal :
 - a) Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan;
 - b) Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional;
 - c) Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol;
 - d) Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.
2. Ketentuan pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
 - a) Menetapkan pembubaran konstituante.
 - b) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali lagi segenap bangsa Indonesia.
 - c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
3. Hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer :
 - a) Badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya.
 - b) Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar.
 - c) Jumlah sekolah bertambah.
 - d) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan RMS, DI/TII.
4. Kabinet yang ada saat demokrasi liberal :
 - a) Kabinet Natsir;
 - b) Kabinet Soekiman-Soewiryo;
 - c) Kabinet Wilopo;
 - d) Kabinet Ali Sastrowijoyo;
 - e) Kabinet Bahanudin Harahap dan Masyumi;
 - f) Kabinet Ali II;
 - g) Kabinet Juanda.
5. Agenda utama reformasi :

- a) Pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
 - b) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa).
 - c) Penegakan hukum.
 - d) Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.
6. Fungsi KNIP :
- a) Awalnya sebagai pembantu Presiden yang selanjutnya beralih pada DPR/MPR, jadi KNIP merupakan cikal bakal adanya DPR/MPR sekarang ini.
 - b) Sehingga memiliki kewenangan legislatif untuk membentuk UU dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
7. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1966 sampai 1998.
8. Ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dengan sistem politik Indonesia :
- a) Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.
 - b) Tidak ada partai yang dominan (kepala negara sikapnya mengambang diantara kepentingan banyak partai).
 - c) Dalam sistem multi partai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif.

LAMPIRAN 19
LEMBAR KUIS KELAS
XI IPS 1

KUIS KELAS XI IPS 1

1. Apa ciri-ciri demokrasi Liberal?
2. Sebutkan ketentuan pokok dekrit Presiden 5 Juli 1959!
3. Sebutkan hal positif yang terjadi di masa demokrasi Parlementer!
4. Sebutkan cabinet apa saja yang ada saat demokrasi liberal!
5. Sebutkan agenda utama pada demokrasi reformasi!
6. Apa fungsi dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?
7. Demokrasi Pancasila dilaksanakan pada tahun?
8. Apa saja ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dengan sistem politik Indonesia?

Kunci Jawaban :

1. Ciri-ciri demokrasi liberal :
 - a) Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan;
 - b) Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional;
 - c) Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol;
 - d) Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.
2. Ketentuan pokok Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
 - a) Menetapkan pembubaran konstituante.
 - b) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali lagi segenap bangsa Indonesia.
 - c) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
3. Hal positif yang terjadi dimasa demokrasi parlementer :
 - a) Badan peradilan menikmati kebebasan dalam menjalankan fungsinya.
 - b) Pers bebas dan banyak kritik di surat kabar.
 - c) Jumlah sekolah bertambah.
 - d) Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan RMS, DI/TII.
4. Kabinet yang ada saat demokrasi liberal :
 - a) Kabinet Natsir;
 - b) Kabinet Soekiman-Soewiryo;
 - c) Kabinet Wilopo;
 - d) Kabinet Ali Sastrowijoyo;
 - e) Kabinet Bahanudin Harahap dan Masyumi;
 - f) Kabinet Ali II;
 - g) Kabinet Juanda.
5. Agenda utama reformasi :

- a) Pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
 - b) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat (unjuk rasa).
 - c) Penegakan hukum.
 - d) Jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.
6. Fungsi KNIP :
- a) Awalnya sebagai pembantu Presiden yang selanjutnya beralih pada DPR/MPR, jadi KNIP merupakan cikal bakal adanya DPR/MPR sekarang ini.
 - b) Sehingga memiliki kewenangan legislatif untuk membentuk UU dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
7. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1966 sampai 1998.
8. Ketidakcocokan sistem demokrasi liberal dengan sistem politik Indonesia :
- a) Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti.
 - b) Tidak ada partai yang dominan (kepala negara sikapnya mengambang diantara kepentingan banyak partai).
 - c) Dalam sistem multi partai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif.

LAMPIRAN 20
LEMBAR KUIS KELAS
X IIS 1

SOAL KUIS

1. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal?
2. Apa perbedaan penduduk dan warga negara?
3. Apa yang disebut asas kewarganegaraan?
4. Jelaskan bagaimana contoh dari *Ius Soli*?
5. Sebutkan dua syarat menjadi WNI?
6. Sebutkan penyebab hilangnya kewarganegaraan?
7. Jelaskan yang dimaksud *apatride* dan *bipatride*!
8. Apa yang dimaksud asas kewarganegaraan ganda terbatas?

Kunci Jawaban :

1. Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.
3. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuktidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu.
4. Contohnya seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalahwarganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidakterpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadipatokan adalah tempat kelahirannya.
5. Dua syarat menjadi WNI: telah berusia 18 tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
6. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain; dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri.
7. *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyaikewarganegaraan; *bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).
8. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

LAMPIRAN 21

DAFTAR DAN

ANALISIS NILAI

KELAS XI IPA 1

HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA

Satuan : SMA NEGERI 1 MLATI
Pendidikan
Nama Tes : ULANGAN HARIAN 1
Mata : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pelajaran
Kelas/Progra : XI/IPA1
m
Tanggal Tes : 11 AGUSTUS 2016
Pokok : BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Bahasan/Sub

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0.169	Tidak Baik	0.968	Mudah	CDE	Tidak Baik
2	0.351	Baik	0.710	Mudah	CE	Revisi Pengecoh
3	0.535	Baik	0.839	Mudah	BCD	Revisi Pengecoh
4	-0.627	Tidak Baik	0.065	Sulit	D	Tidak Baik
5	0.411	Baik	0.290	Sulit	-	Cukup Baik
6	0.193	Tidak Baik	0.839	Mudah	BE	Tidak Baik
7	0.620	Baik	0.839	Mudah	CD	Revisi Pengecoh
8	0.732	Baik	0.871	Mudah	CE	Revisi Pengecoh
9	0.728	Baik	0.903	Mudah	ABE	Revisi Pengecoh
10	0.511	Baik	0.742	Mudah	D	Revisi Pengecoh
11	0.336	Baik	0.548	Sedang	B	Revisi Pengecoh
12	0.436	Baik	0.968	Mudah	ACE	Revisi Pengecoh
13	0.618	Baik	0.742	Mudah	-	Cukup Baik
14	0.278	Cukup Baik	0.581	Sedang	-	Baik
15	0.000	Tidak Baik	1.000	Mudah	ABDE	Tidak Baik
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-

26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala SMA NEGERI 1 MLATI

Yogyakarta, 25 AGUSTUS 2016
Guru Mata Pelajaran



Drs. ARIS SUTARDI
NIP 19640128 19903 1 003

ERVIN ISWANDAYANI
NIP 19711217 199702 2 004

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan : SMA NEGERI 1 MLATI
Pendidikan
Nama Tes : ULANGAN HARIAN 1
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/Program : XI/IPA1
Tanggal Tes : 11 AGUSTUS 2016
Pokok : BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Bahasan/Sub

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3.2	96.8*	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2	9.7	19.4	0.0	71*	0.0	0.0	100.0
3	16.1	0.0	0.0	0.0	83.9*	0.0	100.0
4	6.5*	6.5	71.0	0.0	16.1	0.0	100.0
5	16.1	45.2	29*	6.5	3.2	0.0	100.0
6	6.5	0.0	83.9*	9.7	0.0	0.0	100.0
7	9.7	6.5	0.0	0.0	83.9*	0.0	100.0
8	9.7	3.2	0.0	87.1*	0.0	0.0	100.0
9	0.0	0.0	90.3*	9.7	0.0	0.0	100.0
10	12.9	74.2*	6.5	0.0	6.5	0.0	100.0
11	9.7	0.0	25.8	9.7	54.8*	0.0	100.0
12	0.0	96.8*	0.0	3.2	0.0	0.0	100.0
13	6.5	6.5	6.5	6.5	74.2*	0.0	100.0
14	9.7	58.1*	6.5	22.6	3.2	0.0	100.0
15	0.0	0.0	100*	0.0	0.0	0.0	100.0
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-

28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala SMA NEGERI 1 MLATI



Drs. ARIS SUTARDI
NIP 19640128 19903 1 003

Yogyakarta, 25 AGUSTUS 2016
Guru Mata Pelajaran

ERVIN ISWANDAYANI
NIP 19711217 199702 2 004

HASIL ANALISIS SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 MLATI
Nama Tes : ULANGAN HARIAN 1
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/Program : XI/IPA1
Tanggal Tes : 11 AGUSTUS 2016
Pokok Bahasan/Sub : BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0.321	Baik	0.976	Mudah	Cukup Baik
2	0.610	Baik	0.933	Mudah	Cukup Baik
3	0.332	Baik	0.914	Mudah	Cukup Baik
4	0.091	Tidak Baik	0.710	Mudah	Tidak Baik
5	0.831	Baik	0.787	Mudah	Cukup Baik
6	0.628	Baik	0.763	Mudah	Cukup Baik
7	-	-	1.000	Mudah	Cukup Baik
8	0.521	Baik	0.942	Mudah	Cukup Baik
9	0.615	Baik	0.979	Mudah	Cukup Baik
10	0.808	Baik	0.934	Mudah	Cukup Baik

Mengetahui :
 Kepala SMA NEGERI 1 MLATI

2016

Yogyakarta, 25 AGUSTUS

Guru Mata Pelajaran



Drs. ARIS SUTARDI
 NIP 19640128 19903 1 003

ERVIN ISWANDAYANI
 NIP 19711217 199702 2 004

LAMPIRAN 22

DAFTAR DAN

ANALISIS NILAI

KELAS X IIS 1

ANALISIS BUTIR SOAL PILIHAN GANDA

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 MLATI
Nama Tes : ULANGAN HARIAN 1
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/Program : X/IIS1
Tanggal Tes : 15 AGUSTUS 2016
SK/KD : 1.1

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
1	0.000	Tidak Baik	1.000	Mudah	BCDE	Tidak Baik
2	0.329	Baik	0.857	Mudah	AD	Cukup Baik
3	0.256	Cukup Baik	0.321	Sedang	ADE	Revisi Pengecoh
4	0.350	Baik	0.786	Mudah	BE	Cukup Baik
5	0.324	Baik	0.607	Sedang	E	Revisi Pengecoh
6	0.042	Tidak Baik	0.286	Sulit	CDE	Tidak Baik
7	0.317	Baik	0.464	Sedang	-	Baik
8	0.042	Tidak Baik	0.286	Sulit	-	Tidak Baik
9	0.256	Cukup Baik	0.321	Sedang	-	Baik
10	0.212	Cukup Baik	0.286	Sulit	C	Cukup Baik
11	0.284	Cukup Baik	0.964	Mudah	BCD	Cukup Baik
12	-0.023	Tidak Baik	0.214	Sulit	D	Tidak Baik
13	0.000	Tidak Baik	1.000	Mudah	ABCE	Tidak Baik
14	0.424	Baik	0.714	Mudah	D	Cukup Baik
15	0.000	Tidak Baik	1.000	Mudah	BCDE	Tidak Baik
16	0.055	Tidak Baik	0.750	Mudah	-	Tidak Baik
17	0.232	Cukup Baik	0.571	Sedang	-	Baik
18	0.493	Baik	0.857	Mudah	B	Cukup Baik
19	0.340	Baik	0.643	Sedang	-	Baik
20	0.538	Baik	0.821	Mudah	C	Cukup Baik
21	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-

37	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala SMA NEGERI 1 MLATI

SMA NEGERI 1 MLATI, 25 AGUSTUS 2016
Guru Mata Pelajaran



Drs. ARIS SUTARDI
NIP 19640128 19903 1 003

ERVIN ISWANDAYANI, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

Satuan : SMA NEGERI 1 MLATI
Pendidikan
Nama Tes : ULANGAN HARIAN 1
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/Program : X/IIS1
Tanggal Tes : 15 AGUSTUS
 2016
SK/KD : 1.1

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
1	100*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2	0.0	85.7*	3.6	0.0	10.7	0.0	100.0
3	0.0	67.9	32.1*	0.0	0.0	0.0	100.0
4	14.3	0.0	78.6*	7.1	0.0	0.0	100.0
5	3.6	3.6	32.1	60.7*	0.0	0.0	100.0
6	71.4	28.6*	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
7	10.7	17.9	3.6	21.4	46.4*	0.0	100.0
8	17.9	32.1	14.3	28.6*	7.1	0.0	100.0
9	3.6	28.6	32.1*	17.9	17.9	0.0	100.0
10	25.0	21.4	0.0	28.6*	25.0	0.0	100.0
11	3.6	0.0	0.0	0.0	96.4*	0.0	100.0
12	32.1	17.9	21.4*	0.0	28.6	0.0	100.0
13	0.0	0.0	0.0	100*	0.0	0.0	100.0
14	21.4	71.4*	3.6	0.0	3.6	0.0	100.0
15	100*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
16	3.6	10.7	3.6	7.1	75*	0.0	100.0
17	3.6	14.3	57.1*	14.3	10.7	0.0	100.0
18	3.6	0.0	85.7*	3.6	7.1	0.0	100.0
19	3.6	10.7	14.3	64.3*	7.1	0.0	100.0
20	82.1*	3.6	0.0	7.1	7.1	0.0	100.0
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-

35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala SMA NEGERI 1 MLATI

SMA NEGERI 1 MLATI, 25 AGUSTUS 2016
Guru Mata Pelajaran



Drs.ARISSUTARDI
NIP 19640128 19903 1 003

ERVIN ISWANDAYANI, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

ANALISIS BUTIR SOAL ESSAY

Satuan Pendidikan	: SMA NEGERI 1 MLATI
Nama Tes	: ULANGAN HARIAN 1
Mata Pelajaran	: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/Program	: X/IIS1
Tanggal Tes	: 15 AGUSTUS 2016
SK/KD	: 1.1

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
1	0.071	Tidak Baik	0.839	Mudah	Tidak Baik
2	0.876	Baik	0.620	Sedang	Baik
3	0.067	Tidak Baik	0.375	Sedang	Cukup Baik
4	-	-	1.000	Mudah	Cukup Baik
5	0.829	Baik	0.725	Mudah	Cukup Baik
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Mengetahui :
Kepala SMA NEGERI 1 MLATI

SMA NEGERI 1 MLATI, 25 AGUSTUS 2016
Guru Mata Pelajaran



Drs. ARIS SUTARDI
NIP 19640128 19903 1 003

ERVIN ISWANDAYANI, S.Pd
NIP 19711217 199702 2 004

LAMPIRAN 23
REKAP NILAI
PESERTA DIDIK

DAFTAR NILAI KOGNITIF

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
 Mata Pelajaran : PKn
 Kelas : X IIS 1
 Semester : 1
 Tahun Pelajaran : 2016/2017
 KKM : 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Ulangan			Nilai Rapor	Ketercapain Komptensi		
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						Rrt NH	TS	AS/ KK				
																	Terstruktur			Mandiri									
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	60	20	20					
1	2547	Adisya Adriana	69													91	100				84				86			52	
2	2548	Ana Wulan Suci	85													60	80				81				77			46	
3	2549	Aninda Faradila Sari	81													91	100				95				92			55	
4	2550	Arindra Widi Pratama	78													82	100				65				81			49	
5	2551	Atarika Dinda Pramesti	73													75	75				55				70			42	
6	2552	David Herjuanto	93													72	90				100				89			53	
7	2553	Delvila Dewi Cornelia	55													70	85				67				69			42	
8	2554	Dian Risnani Widyantari	86													60	60				85				73			44	
9	2555	Fatma Kumalasari	71													80	95				95				85			51	
10	2556	Fauzan Margi Wijayanto	82													82	75				95				84			50	
11	2557	Fauzan Noviatmoko	83													85	75				90				83			50	
12	2558	Husni Mulia Arkhab	56													75	50				83				66			40	
13	2559	Indriani Ayuningtyas	67													79	85				80				78			47	
14	2560	Laili Khamidah	88													80	60				83				78			47	
15	256	Luluk Nur Fadhilah	61													80	80				67				72			43	
16	2562	Mentari Anggari Satria W.	57													82	100				96				84			50	
17	2563	Muhamad Krisna Andi Hakim	84													60	70				70				71			43	
18	2564	Nadia Zulva Pratiwi	63													75	80				96				79			47	
19	2565	Noor Farida Juliana	62													60	100				89				78			47	
20	2566	Novalia Herawati	88													82	100				86				89			53	
21	2567	Nur Istinavi Muzarkisyah	72													80	95				91				85			51	
22	2568	Ratna Noviana	67													80	90				78				79			47	
23	2569	Ridwan Gigih Nur Hisyam	78													72	75				80				76			46	
24	2570	Rivalda Rachma Lianty	53													70	85				87				74			44	
25	2571	Salsabila Tarisa Putri	56													79	90				73				75			45	
26	2572	Sekar Indriyani	62													82	85				80				77			46	
27	2573	Taskiya Hanif Fadhilanisa	58													60	75				75				67			40	
28	2574	Tiara Sonya Pitaloka	58													60	100				77				74			44	

Kode	Narasi Ketercapaian Kompetensi	
Keterangan		

Nama Sekolah	: SMA Negeri 1 Mlati	Semester	: 1
Mata Pelajaran	: PKn	Tahun Pelajaran	: 2016/2017
Kelas	: XI IPA 1	KKM	: 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rt	Ulangan		Nilai Rapor					
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas					NH	TS	AS						
																		Terstruktur					Mandiri								
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	60	20	20	
1	2479	Aan Kurni Nuryanto	88													75	77	85			76									46	
2	2446	Ageng Nawang Puspa	96													80	89	85			85									51	
3	2417	Ahsan Firdaus	98													75	78	85			77									46	
4	2450	Alfan Rianjana	94													50	77	85			64									38	
5	2452	Ananda Aprilia	89													80	88	85			84									50	
6	2453	Anisa Damayanti	88													80	87	80			84									50	
7	2455	Arifah Asriyanti	87													80	88	85			84									50	
8	2384	Ayu Rina Damaryanti	91													100	86	85			93									56	
9	2424	Della Febriyanti	97													85	89	50			87									52	
10	2355	Denisia Reta Falah Rizka	97													85	90	85			88									53	
11	2388	Diah Ambarwati	80													100	85	85			93									56	
12	2389	Dinda Galuh Anindhita	71													87	89	85			88									53	
13	2357	Dwi Setyawati	95													87	85	85			86									52	
14	2391	Elviana Uswatun Khasanah	96													85	74	85			80									48	
15	2361	Hielda Hanifah	95													100	50	85			75									45	
16	2463	Maghfira Renanda Atiq	96													50	50	85			50									30	
17	2368	Mirza Rasyid Arifin	96													50	50	85			50									30	
18	2396	Muhamad Khoiru Ihsan	96													50	50	85			50									30	
19	2435	Muhammad Rafi	68													75	79	85			77									46	
20	2399	Muhammad Rifki Haikal	72													50	88	85			69									41	
21	2401	Mutia Utami	96													85	98	85			92									55	
22	2466	Nurul Aeni	96													50	89	85			70									42	
23	2374	Pramesti Cicilia	75													87	86	85			87									52	
24	2404	Pratiwi Sudirman	98													85	89	50			87									52	
25	2406	Rizki Dyna Febriastuti	91													75	82	85			79									47	
26	2471	Rurin Nurmitha Suryani	88													100	85	80			93									56	
27	2375	Rusepta Wurya Nugraha	90													87	80	85			84									50	
28	2407	Septiana Arvina	90													87	84	85			86									51	
29	2408	Silvi Ananda Putri Devi	80													75	50	85			63									38	
30	2475	Umniyah Salma Fathin	79													50	88	85			69									41	
31	2476	Vira Yudha Tama	89													75	50	85			89									0	
32	2443	Wahyu Cahya Nugraha	0													50	88	85			50									0	

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas : X C

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas : X D

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas/Program : XI / IPA-1

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor					
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas										NH	TS	AS	
																		Terstruktur										Mandiri			
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	60	20	20	
1	2349	Adelia Wulandari																								###			#####		
2	2292	Aldiansyah Rimart Caestya																								###			#####		
3	2293	Amanda Pandansari																								###			#####		
4	2227	Anggita Usfhah Nurjanah Putri																								###			#####		
5	2228	Annisa Wanna Kuksuma																								###			#####		
6	2298	Aulia Intan Febia																								###			#####		
7	2299	Aunora Sukma Choirunisa																								###			#####		
8	2231	Awanis Madarina																								###			#####		
9	2235	Dewi Masita																								###			#####		
10	2236	Dewi Muyassaroh Fachrizka																								###			#####		
11	2239	Endah Paramita Pratiwi																								###			#####		
12	2240	Erdin Vernanda Sutrisna																								###			#####		
13	2241	Fatkhah Zami Rizki																								###			#####		
14	2244	Fresni Wira																								###			#####		
15	2245	Hana Karista Lokiswari																								###			#####		
16	2248	Himawan Akbar Mahedra																								###			#####		
17	2320	Ilham Sepdyantoro																								###			#####		
18	2252	Lara Vivi Rachmawati																								###			#####		
19	2254	Listiawan Anggit Pradiana																								###			#####		
20	2324	Muhammad Khairunna'im																								###			#####		
21	2325	Muhammad Syahrul Kresna M.																								###			#####		
22	2265	Putri Sundariningsih																								###			#####		
23	2336	Rekhanna Zahra Jelang Safitri																								###			#####		
24	2270	Rina Fitriani																								###			#####		
25	2342	Tanti																								###			#####		
26	2279	Tika Aprillia Hendrawati																								###			#####		
27	2280	Veny Popilia Sari																								###			#####		
28	2281	Vica Yusihana																								###			#####		
29	2282	Vicky Dita Ambarwati																								###			#####		
30	2284	Yastia Fitri Hardanti																								###			#####		
31	2285	Yessy Widiastuti																								###			#####		
32	2478	Ahmad Faizal Ridho																								###			#####		

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Program : XI / IPA-2

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM : 75

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																								Rrt	Ulangan		Nilai Rapor
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas										NH	TS	AS	
																	Terstruktur					Mandiri					60	20	20	
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	60	20	20	
1	2289	Affan Fathurrachman Prasetyo																								###			#####	
2	2223	Alvinia Eka Putri																								###			#####	
3	2224	Amara Rahma Andini																								###			#####	
4	2229	Arum Mia Dwi Astuti																								###			#####	
5	2230	Aulia Nurfinarsanti																								###			#####	
6	2233	Christopher Hendito Febriyan P.																								###			#####	
7	2305	Dinar Prastiwi Mutyah																								###			#####	
8	2242	Fidelis Saka Sigmaringa Da C.																								###			#####	
9	2243	Firda Cahya Amalia																								###			#####	
10	2246	Helena Sekar Kinanti																								###			#####	
11	2247	Heraspati Winarto Putra																								###			#####	
12	2249	Intan Ernawati																								###			#####	
13	2251	Iztnaini Ayu Permatasari																								###			#####	
14	2321	Karunia Widhiyanti																								###			#####	
15	2257	Muhammad Hafidhuddin Maarif																								###			#####	
16	2259	Nabila Cris Auditri																								###			#####	
17	2326	Nabila Nurushifa Latiefiana																								###			#####	
18	2261	Nandika Nur Choirunisa																								###			#####	
19	2262	Nur Rahmawati																								###			#####	
20	2264	Putri Nur Cahyani																								###			#####	
21	2266	Rachel Silva Arba																								###			#####	
22	2267	Raden Roro Sylvia Fanny Ardhia																								###			#####	
23	2268	Rashika Dyah Nareswhari																								###			#####	
24	2271	Rio Andhi Pratama																								###			#####	
25	2272	Robert Parlindungan Tampubolon																								###			#####	
26	2273	Sabella Ayu Ningrum																								###			#####	
27	2274	Salsabila Zahidati Abdillah																								###			#####	
28	2275	Satria Yoga Aditama																								###			#####	
29	2276	Siska Indriyanti																								###			#####	
30	2277	Siti Nur Khayati																								###			#####	
31	2278	Teofila Pramesthi Ningrum																								###			#####	
32	2286	Yulius Satya Putra Wijaya																								###			#####	

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor				
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						NH	TS	AS					
																	Terstruktur					Mandiri					60	20	20	
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5			
1	2288	Afanin Nisrina Fathin																								###			#####	
2	2290	Afrida Muarifa																									###			#####
3	2291	Ahmad Husain Haikal																									###			#####
4	2225	Amirul Azis																									###			#####
5	2226	Angeline Priscilia Christie K.																									###			#####
6	2295	Anita Trihardiyati Purnaningsih																									###			#####
7	2296	Ardian Enggar Haryo Dwi P.																									###			#####
8	2297	Aufana Luthfi Irsyadani																									###			#####
9	2300	Awan Rahadiyan																									###			#####
10	2301	Bayhaqi Iqbal Faturrohim																									###			#####
11	2304	Diki Ari Setiawan																									###			#####
12	2306	Dinda Agnaresta Aminiasari																									###			#####
13	2308	Dyah Puji Lestari																									###			#####
14	2238	Endah Isnainy Kusuma Putri																									###			#####
15	2310	Fatikha Silastuti Sujarwa																									###			#####
16	2313	Felinda Nurmalitasari																									###			#####
17	2314	Frida Dwi Hapsari																									###			#####
18	2318	Halimatussa'diyah																									###			#####
19	2319	Harlisa Dinda Lestari																									###			#####
20	2322	Kiska Alfiania																									###			#####
21	2323	Mafaza Ahsanutaqwim																									###			#####
22	2256	Muhammad Abi Lukito																									###			#####
23	2258	Mutiara Diah Noviana																									###			#####
24	2327	Nabila Ramadhina Zahir																									###			#####
25	2328	Nur Hakiki																									###			#####
26	2329	Nurma Fiqi Arida																									###			#####
27	2330	Nurul Anif Khusna Chanda																									###			#####
28	2337	Repo Nursaputra																									###			#####
29	2340	Suciana Nur Aulia																									###			#####
30	2344	Vika Aprilia Nurfadila																									###			#####
31	2345	Wahyuni Rachmawati																									###			#####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas/Program : XI / IPS-2

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor			
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						NH	TS	AS				
																	Terstruktur				Mandiri				60		20	20	
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	60	20
1	2287	Ade Fitri Arwidya Dewi																								###			#####
2	2294	Angela Maharani																								###			#####
3	2302	Celica Nissa Tita Altezza																								###			#####
4	2303	Diah Putri Puspita Sari																								###			#####
5	2307	Dita Fauzia																								###			#####
6	2237	Emilly Resta Alam																								###			#####
7	2309	Fathureza Muhammad Haqi																								###			#####
8	2311	Fatkhul Isnaini																								###			#####
9	2312	Febri Yoga Ananta																								###			#####
10	2315	Gabriel Ranifatdama																								###			#####
11	2316	Gabriella Yovita Marlasari																								###			#####
12	2317	Glorizka Srinda Nurchasanah																								###			#####
13	2250	Ivan Sayyid Adimukti																								###			#####
14	2260	Nabila Nur Izzah																								###			#####
15	2263	Nur Uswatun Khasanah																								###			#####
16	2331	Oxsintya Nugraheni																								###			#####
17	2332	Panji Saputro Hadi																								###			#####
18	2333	Pratista Anindya Siwi																								###			#####
19	2334	Prihantina Anggit Setyaningrum																								###			#####
20	2335	Raphael Ardhana Krismahera																								###			#####
21	2338	Saka Adjie Cakrawala Timur																								###			#####
22	2339	Shafiy Puspa Wahyu Naufal																								###			#####
23	2341	Syaefuddin Zuhri																								###			#####
24	2343	Tri Arafat Wicaksono																								###			#####
25	2283	Vincensia Kartika Cahyaningsih																								###			#####
26	2346	Yasminda Nurkumala																								###			#####

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati Semester : 1 / 2
Mata Pelajaran : Tahun Pelajaran : 2015/2016
Kelas/Program : XII / IPA-1 KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

####	#REF!	#REF!																											###			####
####	#REF!	#REF!																											###			####
####	#REF!	#REF!																											###			####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran :

Kelas/Program : XII / IPA-2

Semester : 1 / 2

Tahun Pelajaran : 2015/2016

KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																									Rrt	Ulangan		Nilai Rapor
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas										NH	TS	AS	
																		Terstruktur										Mandiri			
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	60	20	20		
1	2479	Aan Kurni Nuryanto																								###			#####		
2	2446	Ageng Nawang Puspa																								###			#####		
3	2417	Ahsan Firdaus																								###			#####		
4	2450	Alfan Rianjana																								###			#####		
5	2452	Ananda Aprilia																								###			#####		
6	2453	Anisa Damayanti																								###			#####		
7	2455	Arifah Asriyanti																								###			#####		
8	2384	Ayu Rina Damaryanti																								###			#####		
9	2424	Della Febriyanti																								###			#####		
10	2355	Denisia Reta Falah Rizka																								###			#####		
11	2388	Diah Ambarwati																								###			#####		
12	2389	Dinda Galuh Anindhita																								###			#####		
13	2357	Dwi Setyawati																								###			#####		
14	2391	Elviana Uswatun Khasanah																								###			#####		
15	2361	Hielda Hanifah																								###			#####		
16	2463	Maghfira Renanda Atiq																								###			#####		
17	2368	Mirza Rasyid Arifin																								###			#####		
18	2396	Muhamad Khoiru Ihsan																								###			#####		
19	2435	Muhammad Rafi																								###			#####		
20	2399	Muhammad Rifki Haikal																								###			#####		
21	2401	Mutia Utami																								###			#####		
22	2466	Nurul Aeni																								###			#####		
23	2374	Pramesti Cicilia																								###			#####		
24	2404	Pratiwi Sudirman																								###			#####		
25	2406	Rizki Dyna Febriastuti																								###			#####		
26	2471	Rurin Nurmitha Suryani																								###			#####		
27	2375	Rusepta Wurya Nugraha																								###			#####		
28	2407	Septiana Arvina																								###			#####		

29	2408	Silvi Ananda Putri Devi																									###			#####
30	2475	Umniyah Salma Fathin																									###			#####
31	2476	Vira Yudha Tama																									###			#####
32	2443	Wahyu Cahya Nugraha																									###			#####
####	#REF!	#REF!																									###			#####
####	#REF!	#REF!																									###			#####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran :

Kelas/Program : XII / IPS-1

Semester : 1 / 2

Tahun Pelajaran : 2015/2016

KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor					
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas					NH	TS	AS						
																		Terstruktur					Mandiri					60	20	20	
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	60	20	20	
1	2100	Ahmad Nur Vikron Pranata																									###			#####	
2	2104	Ananda Mutiara																										###			#####
3	2107	Andre Okto Kurniawan																										###			#####
4	2112	Anita Wahyu Nur Safitri																										###			#####
5	2113	Annis Hanifah																										###			#####
6	2114	Annisa Rizky Fadilla																										###			#####
7	2116	Antika Ririn Heriyanti																										###			#####
8	2126	Dandy Yoga Utama																										###			#####
9	2129	Deya Leony Putri Nugraheni																										###			#####
10	2133	Dimas Mahardhika Satriawan																										###			#####
11	2134	Dita Putri Ramadhanti																										###			#####
12	2137	Eri Dwi Nugraha																										###			#####
13	2139	Fajar Rastra Aditama																										###			#####
14	2142	Fatmala Nur Ariska																										###			#####
15	2144	Fietro Faizin Kesowosidi																										###			#####
16	2150	Hangga Cahyanto																										###			#####
17	2167	Maiza Dea Nuraini																										###			#####
18	2173	Muhammad Bagus Kuncoro																										###			#####
19	2176	Muliana																										###			#####
20	2177	Nabilla Putri Wijaya																										###			#####
21	2179	Nadiyah Syntia Lestari																										###			#####
22	2181	Novi Sabilla Nurhidayati																										###			#####
23	2182	Novita Wiga Putri																										###			#####
24	2195	Renacha Chairani Bustami Salim																										###			#####
25	2202	Rizka Nur Anisa																										###			#####
26	2205	Satria Budi Nugroho																										###			#####
27	2206	Saumi Anggit Musofi																										###			#####

28	2220	Zhafran Mughofar Alalimi																									###			#####
----	------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran :

Kelas/Program : XII / IPS-2

Semester : 1 / 2

Tahun Pelajaran : 2015/2016

KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor				
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						NH	TS	AS					
																	Terstruktur					Mandiri					60	20	20	
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5			
1	2095	Abdul Rohim																									###			#####
2	2096	Adinda Wahyu Sri Saraswati																									###			#####
3	2099	Afita Kurnia Dewi																									###			#####
4	2103	Alfiyyah Nur Hidayah																									###			#####
5	2106	Andita Dwi Oktaviani																									###			#####
6	2111	Anisatun Chasanah																									###			#####
7	2115	Annisa Syafarina Sari																									###			#####
8	2120	Benidiktus Jati Krisnanto																									###			#####
9	2121	Celo Guntarto Bianeta																									###			#####
10	2123	Chinddhy Lakchita Herawati																									###			#####
11	2127	Desi Nanda Pertiwi																									###			#####
12	2131	Dheta Rangga Ray																									###			#####
13	2140	Farhan Budi Prasetiyo																									###			#####
14	2141	Fatimah Eva Wicitra																									###			#####
15	2149	Fransisca Eka Pratiwi																									###			#####
16	2156	Irfan Fadhila																									###			#####
17	2158	Irma Puspitasari																									###			#####
18	2162	Istiqomah Shinta Philadhelpia																									###			#####
19	2166	Ludhgerus Hervin Etby Saputra																									###			#####

20	2168	Martina Listiani																									###			#####
21	2170	Maulia Rahma Milasari																									###			#####
22	2178	Nada Fatin Febriana																									###			#####
23	2184	Nur Rohmah Kurniawati																									###			#####
24	2186	Paskatikha Kurnia Panandita																									###			#####
25	2187	Prayudha Okta Anan Ardiyansah																									###			#####
26	2199	Rita Iswanti																									###			#####
27	2210	Subekti Nur Widyastiwi																									###			#####
28	2213	Vivi Harnita																									###			#####
29	2214	Wening Krisda Monica																									###			#####
30	2215	Winda Riana Agustina																									###			#####
31	2348	Juroijatu Majuria Umtsa																									###			#####
32	2349	Arrum Nurmalitasari																									###			#####

DAFTAR NILAI KOGNITIF

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
 Mata Pelajaran : PKn
 Kelas : X IIS 1
 Semester : 1
 Tahun Pelajaran : 2016/2017
 KKM : 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Ulangan			Nilai Rapor	Ketercapain Komptensi				
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas											Rrt NH	TS	AS/ KK	
																	Terstruktur					Mandiri									
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4			5	60	20	20
1	2547	Adisya Adriana	69													91	100				84					86			52		
2	2548	Ana Wulan Suci	85													60	80				81					77			46		
3	2549	Aninda Faradila Sari	81													91	100				95					92			55		
4	2550	Arindra Widi Pratama	78													82	100				65					81			49		
5	2551	Atarika Dinda Pramesti	73													75	75				55					70			42		
6	2552	David Herjuanto	93													72	90				100					89			53		
7	2553	Delvila Dewi Cornelia	55													70	85				67					69			42		
8	2554	Dian Risnani Widyantari	86													60	60				85					73			44		
9	2555	Fatma Kumalasari	71													80	95				95					85			51		
10	2556	Fauzan Margi Wijayanto	82													82	75				95					84			50		
11	2557	Fauzan Noviatmoko	83													85	75				90					83			50		
12	2558	Husni Mulia Arkhab	56													75	50				83					66			40		
13	2559	Indriani Ayuningtyas	67													79	85				80					78			47		
14	2560	Laili Khamidah	88													80	60				83					78			47		
15	256	Luluk Nur Fadhilah	61													80	80				67					72			43		
16	2562	Mentari Anggari Satria W.	57													82	100				96					84			50		
17	2563	Muhamad Krisna Andi Hakim	84													60	70				70					71			43		
18	2564	Nadia Zulva Pratiwi	63													75	80				96					79			47		
19	2565	Noor Farida Juliana	62													60	100				89					78			47		
20	2566	Novalia Herawati	88													82	100				86					89			53		
21	2567	Nur Istinavi Muzarkisyah	72													80	95				91					85			51		
22	2568	Ratna Noviana	67													80	90				78					79			47		
23	2569	Ridwan Gigih Nur Hisyam	78													72	75				80					76			46		
24	2570	Rivalda Rachma Lianty	53													70	85				87					74			44		
25	2571	Salsabila Tarisa Putri	56													79	90				73					75			45		
26	2572	Sekar Indriyani	62													82	85				80					77			46		
27	2573	Taskiya Hanif Fadhilanisa	58													60	75				75					67			40		
28	2574	Tiara Sonya Pitaloka	58													60	100				77					74			44		

Kode	Narasi Ketercapaian Kompetensi	
Keterangan		

Nama Sekolah	: SMA Negeri 1 Mlati	Semester	: 1
Mata Pelajaran	: PKn	Tahun Pelajaran	: 2016/2017
Kelas	: XI IPA 1	KKM	: 78

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rt	Ulangan			Nilai Rapor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas					NH	TS	AS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																							60	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1					2					3					4					5					6					7					8					9					10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	8	P	9	P	10	P	11	P	12	P		13	P	14	P	15	P	16	P	17	P	18	P	19	P	20	P	21	P	22	P	23	P	24	P	25	P	26	P	27	P	28	P	29	P	30	P	31	P	32	P	33	P	34	P	35	P	36	P	37	P	38	P	39	P	40	P	41	P	42	P	43	P	44	P	45	P	46	P	47	P	48	P	49	P	50	P	51	P	52	P	53	P	54	P	55	P	56	P	57	P	58	P	59	P	60	P	61	P	62	P	63	P	64	P	65	P	66	P	67	P	68	P	69	P	70	P	71	P	72	P	73	P	74	P	75	P	76	P	77	P	78	P	79	P	80	P	81	P	82	P	83	P	84	P	85	P	86	P	87	P	88	P	89	P	90	P	91	P	92	P	93	P	94	P	95	P	96	P	97	P	98	P	99	P	100	P	101	P	102	P	103	P	104	P	105	P	106	P	107	P	108	P	109	P	110	P	111	P	112	P	113	P	114	P	115	P	116	P	117	P	118	P	119	P	120	P	121	P	122	P	123	P	124	P	125	P	126	P	127	P	128	P	129	P	130	P	131	P	132	P	133	P	134	P	135	P	136	P	137	P	138	P	139	P	140	P	141	P	142	P	143	P	144	P	145	P	146	P	147	P	148	P	149	P	150	P	151	P	152	P	153	P	154	P	155	P	156	P	157	P	158	P	159	P	160	P	161	P	162	P	163	P	164	P	165	P	166	P	167	P	168	P	169	P	170	P	171	P	172	P	173	P	174	P	175	P	176	P	177	P	178	P	179	P	180	P	181	P	182	P	183	P	184	P	185	P	186	P	187	P	188	P	189	P	190	P	191	P	192	P	193	P	194	P	195	P	196	P	197	P	198	P	199	P	200	P	201	P	202	P	203	P	204	P	205	P	206	P	207	P	208	P	209	P	210	P	211	P	212	P	213	P	214	P	215	P	216	P	217	P	218	P	219	P	220	P	221	P	222	P	223	P	224	P	225	P	226	P	227	P	228	P	229	P	230	P	231	P	232	P	233	P	234	P	235	P	236	P	237	P	238	P	239	P	240	P	241	P	242	P	243	P	244	P	245	P	246	P	247	P	248	P	249	P	250	P	251	P	252	P	253	P	254	P	255	P	256	P	257	P	258	P	259	P	260	P	261	P	262	P	263	P	264	P	265	P	266	P	267	P	268	P	269	P	270	P	271	P	272	P	273	P	274	P	275	P	276	P	277	P	278	P	279	P	280	P	281	P	282	P	283	P	284	P	285	P	286	P	287	P	288	P	289	P	290	P	291	P	292	P	293	P	294	P	295	P	296	P	297	P	298	P	299	P	300	P	301	P	302	P	303	P	304	P	305	P	306	P	307	P	308	P	309	P	310	P	311	P	312	P	313	P	314	P	315	P	316	P	317	P	318	P	319	P	320	P	321	P	322	P	323	P	324	P	325	P	326	P	327	P	328	P	329	P	330	P	331	P	332	P	333	P	334	P	335	P	336	P	337	P	338	P	339	P	340	P	341	P	342	P	343	P	344	P	345	P	346	P	347	P	348	P	349	P	350	P	351	P	352	P	353	P	354	P	355	P	356	P	357	P	358	P	359	P	360	P	361	P	362	P	363	P	364	P	365	P	366	P	367	P	368	P	369	P	370	P	371	P	372	P	373	P	374	P	375	P	376	P	377	P	378	P	379	P	380	P	381	P	382	P	383	P	384	P	385	P	386	P	387	P	388	P	389	P	390	P	391	P	392	P	393	P	394	P	395	P	396	P	397	P	398	P	399	P	400	P	401	P	402	P	403	P	404	P	405	P	406	P	407	P	408	P	409	P	410	P	411	P	412	P	413	P	414	P	415	P	416	P	417	P	418	P	419	P	420	P	421	P	422	P	423	P	424	P	425	P	426	P	427	P	428	P	429	P	430	P	431	P	432	P	433	P	434	P	435	P	436	P	437	P	438	P	439	P	440	P	441	P	442	P	443	P	444	P	445	P	446	P	447	P	448	P	449	P	450	P	451	P	452	P	453	P	454	P	455	P	456	P	457	P	458	P	459	P	460	P	461	P	462	P	463	P	464	P	465	P	466	P	467	P	468	P	469	P	470	P	471	P	472	P	473	P	474	P	475	P	476	P	477	P	478	P	479	P	480	P	481	P	482	P	483	P	484	P	485	P	486	P	487	P	488	P	489	P	490	P	491	P	492	P	493	P	494	P	495	P	496	P	497	P	498	P	499	P	500	P	501	P	502	P	503	P	504	P	505	P	506	P	507	P	508	P	509	P	510	P	511	P	512	P	513	P	514	P	515	P	516	P	517	P	518	P	519	P	520	P	521	P	522	P	523	P	524	P	525	P	526	P	527	P	528	P	529	P	530	P	531	P	532	P	533	P	534	P	535	P	536	P	537	P	538	P	539	P	540	P	541	P	542	P	543	P	544	P	545	P	546	P	547	P	548	P	549	P	550	P	551	P	552	P	553	P	554	P	555	P	556	P	557	P	558	P	559	P	560	P	561	P	562	P	563	P	564	P	565	P	566	P	567	P	568	P	569	P	570	P	571	P	572	P	573	P	574	P	575	P	576	P	577	P	578	P	579	P	580	P	581	P	582	P	583	P	584	P	585	P	586	P	587	P	588	P	589	P	590	P	591	P	592	P	593	P	594	P	595	P	596	P	597	P	598	P	599	P	600	P	601	P	602	P	603	P	604	P	605	P	606	P	607	P	608	P	609	P	610	P	611	P	612	P	613	P	614	P	615	P	616	P	617	P	618	P	619	P	620	P	621	P	622	P	623	P	624	P	625	P	626	P	627	P	628	P	629	P	630	P	631	P	632	P	633	P	634	P	635	P	636	P	637	P	638	P	639	P	640	P	641	P	642	P	643	P	644	P	645	P	646	P	647	P	648	P	649	P	650	P	651	P	652	P	653	P	654	P	655	P	656	P	657	P	658	P	659	P	660	P	661	P	662	P	663	P	664	P	665	P	666	P	667	P	668	P	669	P	670	P	671	P	672	P	673	P	674	P	675	P	676	P	677	P	678	P	679	P	680	P	681	P	682	P	683	P	684	P	685	P	686	P	687	P	688	P	689	P	690	P	691	P	692	P	693	P	694	P	695	P	696	P	697	P	698	P	699	P	700	P	701	P	702	P	703	P	704	P	705	P	706	P	707	P	708	P	709	P	710	P	711	P	712	P	713	P	714	P	715	P	716	P	717	P	718	P	719	P	720	P	721	P	722	P	723	P	724	P	725	P	726	P	727	P	728	P	729	P	730	P	731	P	732	P	733	P	734	P	735	P	736	P	737	P	738	P	739	P	740	P	741	P	742	P	743	P	744	P	745	P	746	P	747	P	748	P	749	P	750	P	751	P	752	P	753	P	754	P	755	P	756	P	757	P	758	P	759	P	760	P	761	P	762	P	763	P	764	P	765	P	766	P	767	P	768	P	769	P	770	P	771	P	772	P	773	P	774	P	775	P	776	P	777	P	778	P	779	P	780	P	781	P	782	P	783	P	784	P	785	P	786	P	787	P	788	P	789	P	790	P	791	P	792	P	793	P	794	P	795	P	796	P	797	P	798	P	799	P	800	P	801	P	802	P	803	P	804	P	805	P	806	P	807	P	808	P	809	P	810	P	811	P	812	P	813	P	814	P	815	P	816	P	817	P	818	P	819	P	820	P	821	P	822	P	823	P	824	P	825	P	826	P	827	P	828	P	829	P	830	P	831	P	832	P	833	P	834	P	835	P	836	P	837	P	838	P	839	P	840	P	841	P	842	P	843	P	844	P	845	P	846	P	847	P	848	P	849	P	850	P	851	P	852	P	853	P	854	P	855	P	856	P	857	P	858	P	859	P	860	P	861	P	862	P	863	P	864	P	865	P	866	P	867	P	868	P	869	P	870	P	871	P	872	P	873	P	874	P	875	P	876	P	877	P	878	P	879	P	880	P	881	P	882	P	883	P	884	P	885	P	886	P	887	P	888	P	889	P	890	P	891	P	892	P	893	P	894	P	895	P	896	P	897	P	898	P	899	P	900	P	901	P	902	P	903	P	904	P	905	P	906	P	907	P	908	P	909	P	910	P	911	P	912	P	913	P	914	P	915	P	916	P	917	P	918	P	919	P	920	P	921	P	922	P	923	P	924	P	925	P	926	P	927	P	928	P	929	P	930	P	931	P	932	P	933	P	934	P	935	P	936	P	937	P	938	P	939

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas : X C

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas : X D

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas/Program : XI / IPA-1

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor				
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						NH	TS	AS					
																	Terstruktur					Mandiri					60	20	20	
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	60	20	20
1	2349	Adelia Wulandari																								###			#####	
2	2292	Aldiansyah Rimart Caestya																									###			#####
3	2293	Amanda Pandansari																									###			#####
4	2227	Anggita Usfhah Nurjanah Putri																									###			#####
5	2228	Annisa Wanna Kuksuma																									###			#####
6	2298	Aulia Intan Febia																									###			#####
7	2299	Aunora Sukma Choirunisa																									###			#####
8	2231	Awanis Madarina																									###			#####
9	2235	Dewi Masita																									###			#####
10	2236	Dewi Muyassaroh Fachrizka																									###			#####
11	2239	Endah Paramita Pratiwi																									###			#####
12	2240	Erdin Vernanda Sutrisna																									###			#####
13	2241	Fatkhah Zami Rizki																									###			#####
14	2244	Fresni Wira																									###			#####
15	2245	Hana Karista Lokiswari																									###			#####
16	2248	Himawan Akbar Mahedra																									###			#####
17	2320	Ilham Sepdyantoro																									###			#####
18	2252	Lara Vivi Rachmawati																									###			#####
19	2254	Listiawan Anggit Pradiana																									###			#####
20	2324	Muhammad Khairunna'im																									###			#####
21	2325	Muhammad Syahrul Kresna M.																									###			#####
22	2265	Putri Sundariningsih																									###			#####
23	2336	Rekhanna Zahra Jelang Safitri																									###			#####
24	2270	Rina Fitriani																									###			#####
25	2342	Tanti																									###			#####
26	2279	Tika Aprillia Hendrawati																									###			#####
27	2280	Veny Popilia Sari																									###			#####
28	2281	Vica Yusihana																									###			#####
29	2282	Vicky Dita Ambarwati																									###			#####
30	2284	Yastia Fitri Hardanti																									###			#####
31	2285	Yessy Widiastuti																									###			#####
32	2478	Ahmad Faizal Ridho																									###			#####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Program : XI / IPA-2

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM : 75

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																							Rrt	Ulangan		Nilai Rapor	
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas										NH	TS		AS
																	Terstruktur					Mandiri					60	20		20
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	2289	Affan Fathurrachman Prasetyo																									###			#####
2	2223	Alvinia Eka Putri																									###			#####
3	2224	Amara Rahma Andini																									###			#####
4	2229	Arum Mia Dwi Astuti																									###			#####
5	2230	Aulia Nurfinarsanti																									###			#####
6	2233	Christopher Hendito Febriyan P.																									###			#####
7	2305	Dinar Prastiwi Mutyah																									###			#####
8	2242	Fidelis Saka Sigmaringa Da C.																									###			#####
9	2243	Firda Cahya Amalia																									###			#####
10	2246	Helena Sekar Kinanti																									###			#####
11	2247	Heraspati Winarto Putra																									###			#####
12	2249	Intan Ernawati																									###			#####
13	2251	Iztnaini Ayu Permatasari																									###			#####
14	2321	Karunia Widhiyanti																									###			#####
15	2257	Muhammad Hafidhuddin Maarif																									###			#####
16	2259	Nabila Cris Auditri																									###			#####
17	2326	Nabila Nurushifa Latiefiana																									###			#####
18	2261	Nandika Nur Choirunisa																									###			#####
19	2262	Nur Rahmawati																									###			#####
20	2264	Putri Nur Cahyani																									###			#####
21	2266	Rachel Silva Arba																									###			#####
22	2267	Raden Roro Sylvia Fanny Ardhia																									###			#####
23	2268	Rashika Dyah Nareswhari																									###			#####
24	2271	Rio Andhi Pratama																									###			#####
25	2272	Robert Parlindungan Tampubolon																									###			#####
26	2273	Sabella Ayu Ningrum																									###			#####
27	2274	Salsabila Zahidati Abdillah																									###			#####
28	2275	Satria Yoga Aditama																									###			#####
29	2276	Siska Indriyanti																									###			#####
30	2277	Siti Nur Khayati																									###			#####
31	2278	Teofila Pramesthi Ningrum																									###			#####
32	2286	Yulius Satya Putra Wijaya																									###			#####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor					
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						NH	TS	AS						
																	Terstruktur					Mandiri					60	20	20		
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5				
1	2288	Afanin Nisrina Fathin																									###				#####
2	2290	Afrida Muarifa																									###				#####
3	2291	Ahmad Husain Haikal																									###				#####
4	2225	Amirul Azis																									###				#####
5	2226	Angeline Priscilia Christie K.																									###				#####
6	2295	Anita Trihardiyati Purnaningsih																									###				#####
7	2296	Ardian Enggar Haryo Dwi P.																									###				#####
8	2297	Aufana Luthfi Irsyadani																									###				#####
9	2300	Awan Rahadiyan																									###				#####
10	2301	Bayhaqi Iqbal Faturrohim																									###				#####
11	2304	Diki Ari Setiawan																									###				#####
12	2306	Dinda Agnaresta Aminiasari																									###				#####
13	2308	Dyah Puji Lestari																									###				#####
14	2238	Endah Isnainy Kusuma Putri																									###				#####
15	2310	Fatikha Silastuti Sujarwa																									###				#####
16	2313	Felinda Nurmalitasari																									###				#####
17	2314	Frida Dwi Hapsari																									###				#####
18	2318	Halimatussa'diyah																									###				#####
19	2319	Harlisa Dinda Lestari																									###				#####
20	2322	Kiska Alfiania																									###				#####
21	2323	Mafaza Ahsanutaqwim																									###				#####
22	2256	Muhammad Abi Lukito																									###				#####
23	2258	Mutiara Diah Noviana																									###				#####
24	2327	Nabila Ramadhina Zahir																									###				#####
25	2328	Nur Hakiki																									###				#####
26	2329	Nurma Fiqi Arida																									###				#####
27	2330	Nurul Anif Khusna Chanda																									###				#####
28	2337	Repo Nursaputra																									###				#####
29	2340	Suciana Nur Aulia																									###				#####
30	2344	Vika Aprilia Nurfadila																									###				#####
31	2345	Wahyuni Rachmawati																									###				#####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran :
Kelas/Program : XI / IPS-2

Semester : 1 / 2
Tahun Pelajaran : 2015/2016
KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor			
Urut	Induk		Ulangan Harian														Nilai Tugas						NH	TS	AS				
																	Terstruktur				Mandiri						60	20	20
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5		
1	2287	Ade Fitri Arwidya Dewi																								###			#####
2	2294	Angela Maharani																								###			#####
3	2302	Celica Nissa Tita Altezza																								###			#####
4	2303	Diah Putri Puspita Sari																								###			#####
5	2307	Dita Fauzia																								###			#####
6	2237	Emilly Resta Alam																								###			#####
7	2309	Fathureza Muhammad Haqi																								###			#####
8	2311	Fatkhul Isnaini																								###			#####
9	2312	Febri Yoga Ananta																								###			#####
10	2315	Gabriel Ranifatdama																								###			#####
11	2316	Gabriella Yovita Marlasari																								###			#####
12	2317	Glorizka Srinda Nurchasanah																								###			#####
13	2250	Ivan Sayyid Adimukti																								###			#####
14	2260	Nabila Nur Izzah																								###			#####
15	2263	Nur Uswatun Khasanah																								###			#####
16	2331	Oxsintya Nugraheni																								###			#####
17	2332	Panji Saputro Hadi																								###			#####
18	2333	Pratista Anindya Siwi																								###			#####
19	2334	Prihantina Anggit Setyaningrum																								###			#####
20	2335	Raphael Ardhana Krismahera																								###			#####
21	2338	Saka Adjie Cakrawala Timur																								###			#####
22	2339	Shafiy Puspa Wahyu Naufal																								###			#####
23	2341	Syaefuddin Zuhri																								###			#####
24	2343	Tri Arafat Wicaksono																								###			#####
25	2283	Vincensia Kartika Cahyaningsih																								###			#####
26	2346	Yasminda Nurkumala																								###			#####

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati Semester : 1 / 2
Mata Pelajaran : Tahun Pelajaran : 2015/2016
Kelas/Program : XII / IPA-1 KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

####	#REF!	#REF!																											###			####
####	#REF!	#REF!																											###			####
####	#REF!	#REF!																											###			####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran :

Kelas/Program : XII / IPA-2

Semester : 1 / 2

Tahun Pelajaran : 2015/2016

KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																									Rrt	Ulangan		Nilai Rapor
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas										NH	TS	AS	
																		Terstruktur					Mandiri								
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	60	20	20		
1	2479	Aan Kurni Nuryanto																								###			#####		
2	2446	Ageng Nawang Puspa																								###			#####		
3	2417	Ahsan Firdaus																								###			#####		
4	2450	Alfan Rianjana																								###			#####		
5	2452	Ananda Aprilia																								###			#####		
6	2453	Anisa Damayanti																								###			#####		
7	2455	Arifah Asriyanti																								###			#####		
8	2384	Ayu Rina Damaryanti																								###			#####		
9	2424	Della Febriyanti																								###			#####		
10	2355	Denisia Reta Falah Rizka																								###			#####		
11	2388	Diah Ambarwati																								###			#####		
12	2389	Dinda Galuh Anindhita																								###			#####		
13	2357	Dwi Setyawati																								###			#####		
14	2391	Elviana Uswatun Khasanah																								###			#####		
15	2361	Hielda Hanifah																								###			#####		
16	2463	Maghfira Renanda Atiq																								###			#####		
17	2368	Mirza Rasyid Arifin																								###			#####		
18	2396	Muhamad Khoiru Ihsan																								###			#####		
19	2435	Muhammad Rafi																								###			#####		
20	2399	Muhammad Rifki Haikal																								###			#####		
21	2401	Mutia Utami																								###			#####		
22	2466	Nurul Aeni																								###			#####		
23	2374	Pramesti Cicilia																								###			#####		
24	2404	Pratiwi Sudirman																								###			#####		
25	2406	Rizki Dyna Febriastuti																								###			#####		
26	2471	Rurin Nurmitha Suryani																								###			#####		
27	2375	Rusepta Wurya Nugraha																								###			#####		
28	2407	Septiana Arvina																								###			#####		

29	2408	Silvi Ananda Putri Devi																									###			#####
30	2475	Umniyah Salma Fathin																									###			#####
31	2476	Vira Yudha Tama																									###			#####
32	2443	Wahyu Cahya Nugraha																									###			#####
####	#REF!	#REF!																									###			#####
####	#REF!	#REF!																									###			#####

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Mata Pelajaran :

Kelas/Program : XII / IPS-1

Semester : 1 / 2

Tahun Pelajaran : 2015/2016

KKM :

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor				
Urut	Induk		Ulangan Harian															Nilai Tugas					NH	TS	AS					
																		Terstruktur					Mandiri					60	20	20
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	60	20	20
1	2100	Ahmad Nur Vikron Pranata																								###			#####	
2	2104	Ananda Mutiara																									###			#####
3	2107	Andre Okto Kurniawan																									###			#####
4	2112	Anita Wahyu Nur Safitri																									###			#####
5	2113	Annis Hanifah																									###			#####
6	2114	Annisa Rizky Fadilla																									###			#####
7	2116	Antika Ririn Heriyanti																									###			#####
8	2126	Dandy Yoga Utama																									###			#####
9	2129	Deya Leony Putri Nugraheni																									###			#####
10	2133	Dimas Mahardhika Satriawan																									###			#####
11	2134	Dita Putri Ramadhanti																									###			#####
12	2137	Eri Dwi Nugraha																									###			#####
13	2139	Fajar Rastra Aditama																									###			#####
14	2142	Fatmala Nur Ariska																									###			#####
15	2144	Fietro Faizin Kesowosidi																									###			#####
16	2150	Hangga Cahyanto																									###			#####
17	2167	Maiza Dea Nuraini																									###			#####
18	2173	Muhammad Bagus Kuncoro																									###			#####
19	2176	Muliana																									###			#####
20	2177	Nabilla Putri Wijaya																									###			#####
21	2179	Nadiyah Syntia Lestari																									###			#####
22	2181	Novi Sabilla Nurhidayati																									###			#####
23	2182	Novita Wiga Putri																									###			#####
24	2195	Renacha Chairani Bustami Salim																									###			#####
25	2202	Rizka Nur Anisa																									###			#####
26	2205	Satria Budi Nugroho																									###			#####
27	2206	Saumi Anggit Musofi																									###			#####

28	2220	Zhafran Mughofar Alalimi																									###			#####
----	------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	-------

DAFTAR NILAI

Nama Sekolah	: SMA Negeri 1 Mlati	Semester	: 1 / 2	Doc. No.	:	F/Waka-Kur/DN
Mata Pelajaran	:	Tahun Pelajaran	: 2015/2016	Revisi	:	0
Kelas/Program	: XII / IPS-2	KKM	:	Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Nomor		Nama KKM	Nilai Harian																				Rrt	Ulangan		Nilai Rapor			
Urut	Induk		Ulangan Harian												Nilai Tugas								NH	TS	AS				
															Terstruktur				Mandiri				60	20	20				
			1	P	2	P	3	P	4	P	5	P	6	P	7	P	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5		
1	2095	Abdul Rohim																								###			#####
2	2096	Adinda Wahyu Sri Saraswati																								###			#####
3	2099	Afita Kurnia Dewi																								###			#####
4	2103	Alfiyyah Nur Hidayah																								###			#####
5	2106	Andita Dwi Oktaviani																								###			#####
6	2111	Anisatun Chasanah																								###			#####
7	2115	Annisa Syafarina Sari																								###			#####
8	2120	Benidiktus Jati Krisnanto																								###			#####
9	2121	Celo Guntarto Bianeta																								###			#####
10	2123	Chinddhy Lakchita Herawati																								###			#####
11	2127	Desi Nanda Pertiwi																								###			#####
12	2131	Dheta Rangga Ray																								###			#####
13	2140	Farhan Budi Prasetiyo																								###			#####
14	2141	Fatimah Eva Wicitra																								###			#####
15	2149	Fransisca Eka Pratiwi																								###			#####
16	2156	Irfan Fadhila																								###			#####
17	2158	Irma Puspitasari																								###			#####
18	2162	Istiqomah Shinta Philadhelpia																								###			#####
19	2166	Ludhgerus Hervin Etby Saputra																								###			#####

20	2168	Martina Listiani																									###			#####
21	2170	Maulia Rahma Milasari																									###			#####
22	2178	Nada Fatin Febriana																									###			#####
23	2184	Nur Rohmah Kurniawati																									###			#####
24	2186	Paskatikha Kurnia Panandita																									###			#####
25	2187	Prayudha Okta Anan Ardiyansah																									###			#####
26	2199	Rita Iswanti																									###			#####
27	2210	Subekti Nur Widyastiwi																									###			#####
28	2213	Vivi Harnita																									###			#####
29	2214	Wening Krisda Monica																									###			#####
30	2215	Winda Riana Agustina																									###			#####
31	2348	Juroijatu Majuria Umtsa																									###			#####
32	2349	Arrum Nurmalitasari																									###			#####

LAMPIRAN 24
PEMBAGIAN MINGGU
EFEKTIF

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PEMBAGIAN MINGGU EFEKTIF

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Perhitungan Minggu Efektif Semester 1

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	5	-	5	
3	September	4	-	4	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	5	-	
	Jumlah	26	7	19	

2. Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif

19 Minggu x 2 jam pembelajaran = 38 jam pembelajaran.

Mlati, 24 Agustus 2016

Mengetahui :

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PEMBAGIAN MINGGU EFEKTIF

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Perhitungan Minggu Efektif Semester 1

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	4	-	4	
3	September	5	-	5	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	2	3	
	Jumlah	26	4	22	

2. Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif
22 Minggu x 2 jam pembelajaran = 44 jam pembelajaran.

Mlati, 24 Agustus 2016

Mengetahui :

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN 25

SILABUS

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas : X (sepuluh)

Kompetensi Inti :

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------	-----------	---------------	----------------

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
1.1. mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahannNegara 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan	Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara an pemerintahan Negara a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara b. Kedudukan dan Fungsi Kementeria n Negara Republik Indonesia	a. Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara b. Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara c. Siswa mengumpulkan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - mampu menganalisis macam-macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. - Mampu menganalisis konsep pembagian sistem kekuasaan negara. - mengkritisi hasil diskusi tentang macam- 	Tugas: Mencari dan mengumpulkan secara kelompok data dari berbagai sumber tentang pengertian, macam-macam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia serta tugas dan fungsi dari kementerian negara Indonesia dan pengklasifikasian lembaga kementerian Indonesia.	10 x 2 JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>pemerintahan negara</p> <p>4.1 mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi)dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>d. Siswa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>e. Siswa mendemonstrasikan pengambilan keputusan bersama dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara mempresentasikan hasil</p>	<p>macam Sistem Pembagian Kekuasaan Negara.</p> <p>- mengkritisi konsep pembagian sistem kekuasaan negara.</p> <p>- menganalisis Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga</p>	<p>Observasi</p> <p>Mengamati klasifikasi lembaga kementerian setelah reshuffle 2016 dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan susunan organisasi kementerian terbaru.</p> <p>Diskusi :</p> <p>menganalisis terjadinya reshuffle kabinet Jokowi dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
		<p>analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</p>	<p>non kementerian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menganalisis klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Non Kementerian . - mengkritisi tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia 	<p>penyelenggaraan pemerintahan negara.</p> <p>Membuat laporan hasil pengumpulan data</p> <p>Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas</p> <p>Tes</p> <p>digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang praktik penyelenggaraan pemerintrah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			<ul style="list-style-type: none"> - mengkritisi tentang klasifikasi kementerian Negara RI dan non kementerian. - menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan - Menyimpulkan hasil temuan kerangka 			

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai nilai-nilai Pancasila.			

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>1.2. menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik</p>	<p>Warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>c. Kemerdekaan beragama</p>	<ul style="list-style-type: none"> Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan 	<ul style="list-style-type: none"> mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara Indonesia. mampu mengkritisi tentang batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia. 	<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data mengenai batas-batas wilayah di Indonesia dari berbagai literatur. Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan 	10 X 2JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama</p>	<p>dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>	<p>penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan • Siswa menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah 	<p>- mampu mengkritisi Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang Terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Peserta didik mampu mengkritisi nilai-nilai yang terkandung</p>	<p>kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan • Membuat laporan hasil pengamatan • Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas <p>Observasi</p> <p>Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dengan</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>2.3 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.</p>		<p>negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa mempresentasikan hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan 	<p>dalam UUD RI 1945 tentang status warga Negara Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta didik mampu mengkritisi tentang asas-asas menjadi warga negara Indonesia. - Peserta didik mampu mengkritisi syarat-syarat 	<p>pasal-pasal dalam UUD NRI tahun1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamaman</p> <p>Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pasal-pasal dalam</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			<p>untuk menjadi warga negara Indonesia.</p> <p>- Peserta didik mampu mengkritisi Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.</p>	<p>UUD NRI tahun1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>Tes</p> <p>Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
				negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		

Mlati, 24 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

Mahasiswa PPL UNY 2016

Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

SILABUS MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas : XI (sebeleas)

Standar Kompetensi : 1. Menganalisis budaya politik di Indonesia

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
1.1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik 1.4 Menampilkan peran	a. Pengertian umum dan pengertian menurut para ahli mengenai budaya politik b. Komponen-komponen budaya politik c. Tipe-tipe	a. Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku induk, buku LKS, media cetak maupun elektronik) mengenai budaya politik dan tipe-tipe budaya politik b. Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) mengenai	- mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik - Mampu mengidentifikasi pengertian budaya politik menurut	Tugas: Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pengertian, komponen, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi dan partisipasi politik. Observasi Mengamati klasifikasi	3 x 2 JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
serta budaya politik partisipan	budaya politik d. Sosialisasi pengembangan budaya politik e. Peran serta dalam budaya politik partisipan	budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi politik dan partisipasi politik c. Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi) mengenai budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sosialisasi politik dan partisipasi politik d. Siswa menganalisis keterkaitan sosialisasi politik dengan komunikasi politik e. Siswa mendemonstrasikan kegiatan partisipasi politik dengan menghubungkan dalam kegiatan sehari-hari.	para ahli - Mendeskripsikan komponen-komponen budaya politik - Mendeskripsikan tipe budaya politik sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. - Membedakan tipe-tipe budaya politik berdasarkan	perkembangan tipe budaya politik partisipan di Indonesia. Diskusi : menganalisis peran masyarakat dalam setiap pemilu yang mana berhubungan dengan partisipasi politik serta menganalisis peran aktor politik pada saat kampanye menjelang pemilu. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			<p>orientasi politiknya.</p> <p>- Mendeskripsikan pengertian umum mengenai sosialisasi pengembangan politik</p> <p>- Mendeskripsikan pengertian menurut para ahli mengenai sosialisasi pengembangan budaya</p>	<p>secara individu tentang budaya politik di Indonesia.</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			politik - Mengidentifi kasi proses sosialisasi politik - Mendeskrips ikan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang - Memetakan sosialisasi politik dan komunikasi politik - Mendeskrips ikan pengertian			

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			partisipasi politik - Memetakan konsep partisipasi politik - Mengaplikasikan praktik partisipasi politik - Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik			

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
<p>2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.</p> <p>2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.</p> <p>2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi.</p> <p>2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>a. Pengertian dan Prinsip-prinsip Demokrasi.</p> <p>b. Pemikiran tentang Demokrasi.</p> <p>c. Ciri-Ciri Demokrasi.</p> <p>d. Demokratisasi.</p> <p>e. Ciri-Ciri Masyarakat Madani.</p> <p>f. Menuju Masyarakat Madani.</p> <p>g. Pelaksanaan Demokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Siswa mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Siswa mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang masyarakat madani Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Siswa menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang wacana masyarakat madani 	<ul style="list-style-type: none"> mampu mendeskripsikan pengertian Demokrasi. Mengidentifikasi pemikiran tentang Demokrasi. Menganalisis ciri-ciri Demokrasi. Memahami prinsip-prinsip Demokrasi. Mendeskripsikan 	<p>Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang budaya demokrasi menuju masyarakat Madani. Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan dan analisis. Membuat kliping mengenai masyarakat madani. Mempresentasik 	5 X 2JP	

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
	<p>di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.</p> <p>h. Pemilihan Umum sebagai Sarana Demokrasi.</p> <p>i. Perilaku Budaya Demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa mempresentasikan hasil analisis tentang wacana masyarakat madani • Siswa mengumpulkan hasil diskusi dengan bentuk kliping disertai analisis dan kesimpulan. 	<p>Demokratisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan konsepsi masyarakat madani (<i>civil society</i>). - Mengidentifikasi karakteristik masyarakat madani. - Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani. 	<p>an hasil diskusi di depan kelas.</p> <p>Observasi Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab yang di peroleh dari berbagai sumber.</p> <p>Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani.</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi. - Menguraikan pelaksanaan demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan era reformasi. - Menganalisis pemilihan umum 	<p>Tes</p> <p>Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani.</p>		

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Pencapaian Siswa	Penilaian	Alokasi waktu	Sumber belajar
			sebagai sarana demokrasi. - Menerapkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.			

Mlati, 24 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing PPL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ervin', is written over a faint rectangular stamp.

Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY 2016

Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN 26
PROGRAM TAHUNAN

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X
Tahun Pelajaran : 2016/2017

SEMESTER	KD	ALOKASI WAKTU	KET.
GASAL	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa		
	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara		
	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara		
	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara		
	1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil		
	2.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		
	3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

	4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan		
	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.		
	2.3 Menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	3.3 Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	4.3 Menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	1.4 Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil		
	2.4 Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
	3.4 Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	3.5 Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	4.5 menyaji faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		

JUMLAH			
GENAP	1.6 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	2.6 Mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.		
	3.6 Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	4.6 Menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanandalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	1.7 Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil		
	2.7 Mengamalkan nilai-nilai wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		
	3.7 Menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
	4.7 Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		
JUMLAH			

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

--	--	--

Mlati, 21 Juli 2016

Mengetahui :

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI/IPA & IPS
Tahun Pelajaran : 2016/2017

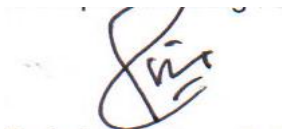
SEMESTER	KD	ALOKASI WAKTU	KET.
GASAL	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik	2 JP	
	1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia	2 JP	
	1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik	2 JP	
	1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan	2 JP	
	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budata demokrasi	4 JP	
	2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani	2 JP	
	2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi	2 JP	
	2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari	2JP	
	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4 JP	
	3.2Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan	2 JP	
	3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2 JP	
JUMLAH		26 JP	
GENAP	4.1Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara	4 JP	
	4.2Menjelaskan tahap-tahap perjanjian Internasional	2 JP	
	4.3 Menganalisis fungsi perwakilan	2 JP	

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PT
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

	diplomati		
	4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional	2 JP	
	4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia	2 JP	
	5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional	2 JP	
	5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional	2 JP	
	5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional	2 JP	
JUMLAH		18 JP	

Mengetahui :

Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mlati, 24 Agustus 2016

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN 27
PROGRAM SEMESTER

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM SEMESTER

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : X
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Perhitungan Minggu Efektif Semester 1

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	5	-	5	
3	September	4	-	4	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	5	-	
	Jumlah	26	7	19	

2. Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif

19 Minggu x 2 jam pembelajaran = 38 jam pembelajaran

B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU

No.	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu (Jam Pelajaran)
1.	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 Mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	8 JP
	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	

	royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	
		4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	
	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab	1.2 menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil.	8 JP
		2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	
		3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	
	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab	4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	

	fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil.	
	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	2.3 Menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
		3.3 Menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
		4.3 Menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	8 JP
2.	Ulangan harian		2 JP
3.	Perbaikan/Pengayaan		2 JP
4.	Ulangan Tengah Semester		2 JP
5.	Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas		2 JP
6.	Cadangan		2 JP
	Jumlah		26 Jam

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

C. PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati

Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kelas/Program : X MIA

Semester : 1 (Satu)

[illegible]

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang Wilayah Negara.</p> <p>2.2.3 Peserta didik mampu menunjukan rasa tanggung jawab dalam berdiskusi dan presentasi sebagai bentuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD RI 1945 tentang batas-batas wilayah Negara Indonesia.</p>																													
<p>3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik</p>	<p>3.2.1 Peserta didik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kedudukan warga negara dan penduduk. 																												

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Mengetahui
Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mlati, 24 Agustus 2016

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

PROGRAM SEMESTER

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Program : XI
Semester : 1 (Satu)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Perhitungan Minggu Efektif Semester 1

NO	Nama Bulan	Jumlah Minggu	Jml. Minggu Yang Tidak Efektif	Jml. Minggu Efektif	Ket.
1	Juli	4	2	2	
2	Agustus	4	-	4	
3	September	5	-	5	
4	Oktober	4	-	4	
5	November	4	-	4	
6	Desember	5	2	3	
	Jumlah	26	4	22	

2. Banyaknya Jam Pembelajaran Yang Efektif
22 Minggu x 2 jam pembelajaran = 44 jam pembelajaran

B. DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU

No.	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu (Jam Pelajaran)
1.	Menganalisis budaya politik di Indonesia	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik.	4 JP
		1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.	
		1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.	4 JP
		1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	2 JP
	Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.	2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.	4 JP
		2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.	2 JP
		2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi.	2 JP
		2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.	2 JP
	Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	4 JP
		3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.	2 JP
		3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa	2 JP

		dan bernegara.	
2.	Ulangan harian	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik. 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik. 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	6 JP
3.	Perbaikan/Pengayaan	1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik. 1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik. 1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan.	6 JP
4.	Ulangan Tengah Semester		
5.	Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas		
6.	Cadangan		
	Jumlah		

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

C. PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Mlati
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kelas/Program : XI
Semester : 1 (Satu)

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

[illegible]

Doc. No.	:	F/Waka-Kur/PS
Revisi	:	0
Tgl Berlaku	:	2 Januari 2016

Mengetahui
Guru Pembimbing PPL



Ervin Iswandayani, S.Pd
NIP. 19711217 199702 2 004

Mlati, 24 Agustus 2016

Mahasiswa PPL UNY 2016



Gista Ceri Aprasnja Paramitha
NIM. 13401241012

LAMPIRAN 28
MEDIA
PEMBELAJARAN
KELAS XI IPA

Budaya Politik di Indonesia

Oleh: Gista Ceri Aprasnja Paramitha

**APA ITU BUDAYA
POLITIK ?**

Pengertian Budaya Politik

- ❖ Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat.
- ❖ Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Budaya Politik menurut Para Ahli

❖ Rusadi Sumintapura

Budya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

❖ Sidney Verba

budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.

❖ Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

❖ Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.

❖ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu pada populasi.

Komponen-Komponen Budaya Politik

- Orientasi Kognitif, berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.
- Orientasi afektif, berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
- Orientasi evaluatif, berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Negara dengan sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk mengintegrasikan modal dan keterampilan. pada kondisi ini, budaya politik cenderung bersifat:

- a. Budaya politik militan, tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang baik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. apabila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya bukan peraturannya yang mungkin salah.
- b. Budaya politik toleransi, yaitu yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. budaya politik ini berusaha mencari konsensus yang wajar.

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:

- a. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut, yaitu yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi..
- b. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif, biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengkasifikasikan budaya politik sebagai berikut:

- a. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif.
- b. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, tetaoi masih bersifat pasif.
- c. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Gista Ceri Aprasnja Paramitha



Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, maupun sistem politik lainnya.

PENGERTIAN MENURUT AHLI

⦿ Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

⦿ Alfian

Adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

SEGI PENTING SOSIALISASI POLITIK

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai), dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja, tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- d. Sosialisasi merupakan prakondisi bagi aktivitas sosial.

PROSES SOSIALISASI POLITIK

⊙ Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Pada usia anak-anak dan remaja merupakan periode paling penting dalam sosialisasi. Easton dan Dennis mengutarakan empat tahap dalam proses sosialisasi politik anak, yaitu:

- a. pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua dan anak.
- b. perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- c. pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung dan pemungutan suara (pemilu).
- d. perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan institusi-institusi.

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik . Adapun sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik:

- a. Keluarga (*family*)
- b. Sekolah
- c. Partai Politik

SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

Menurut Robert Le Vine, terdapat tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu

- a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita erat terikat nilai-nilai tradisional.
- c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK

- ⦿ Sosialisasi politik menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi.
- ⦿ Proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik modern, institusi seperti kelompok sebaya, komunitas, sekolah, kelompok kerja, media komunikasi, partai-partai politik, dll dapat berperan dalam sosialisasi politik.

PARTISIPASI POLITIK

- ◎ **Partisipasi politik** adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

KONSEP PARTISIPASI POLITIK

- ◉ Adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana partisipasi politik itu.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tsb.	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat interaksi anantara warga negara dengan pemerintah• Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang/sekelompok org untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan individu atau kelompok • Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa

Michael Rush dan
Philip Althoft

Partisipasi politik
adalah keterlibatan
individu sampai pada
bermacam-macam
tingkatan di dalam
sistem politik

- Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik
- Memiliki tingkatan-tingkatan partisipas

PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK

- ⦿ Berdasarkan riset-riset ttentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik:
 - a. Kegiatan pemilihan
 - b. Lobbying
 - c. Kegiatan organisasi
 - d. Mencari koneksi (*contacting*)
 - e. Tindakan kekerasan (*violence*)

PADA TINGKAT INDIVIDU, MILBRATH M.L. GOEL MENGIDENTIFIKASI PARTISIPASI POLITIK INDIVIDUAL:

1. *Aphatetic inactives*
2. *Passive supporters*
3. *Contract specialist*
4. *Communicators*
5. *Party and campaign workers*
6. *Community activists*
7. *Protesters*

TINGKATAN PARTISIPASI POLITIK

- Tingkat partisipasi politik dibagi menjadi dua:
 - Aktivis
 - Partisipan
- Tingkat partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson:
 - Kategori Pengamat
 - Kategori Aktivis

Rush dan Althoff menyatakan bahwa hirarki yang terjadi dalam partisipasi politik sangat bergantung pada akibat yang disebabkanya terhadap sistem politik. Tingkatan partisipasi politik:

- ⊙ Menduduki jabatan politik atau administratif
- ⊙ Mencari jabatan politik atau administratif
- ⊙ Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- ⊙ Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- ⊙ Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- ⊙ Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- ⊙ Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- ⊙ Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
- ⊙ Voting (pemberian suara)



SOSIALISASI POLITIK

Oleh : Gista Ceri Aprasnja Paramitha

PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK

- Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku dinegara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator maupun sistem politik lainnya.
- Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi pada anggota masyarakat.



**MENGAPA SOSIALISASI
PENTING???**



TIGA SIFAT DASAR PERLUNYA SOSIALISASI

- Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
- “Secara ekstrim” manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidupnya harus dipelajari.
- Manusia belajar mengendalikan hubungan dengan sesamanya, yaitu hidup menurut nilai-nilai dan membina peranan bersama.



PENTINGNYA SOSIALISASI POLITIK

- Secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
- Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja, tetapi berlangsung seumur hidup.
- Merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial.



SOSIALISASI POLITIK MENURUT AHLI

- Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

- Denis Kavanagh

Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.



FUNGSI SOSIALISASI MENURUT RUSH DAN ALTHOFF

- Melatih Individu, dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik.
- Memelihara sistem politik, bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi.



SOSIALISASI POLITIK DILIHAT DARI METODE PENYAMPAIAN PESAN (RAMLAN SURBAKTI)

- Pendidikan politik yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.
- Indoktrinasi politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobiliasasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol-simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.



SARANA SOSIALISASI POLITIK

Keluarga?

Sekolah?

Partai Politik?



SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

Menurut Robert Le Vine, terdapat tiga faktor masalah penting dalam sosialisasi politik:

- Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk memodernisasi keluarga tradisional lewat industrialisasi pendidikan.
- Terdapat perbedaan besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional.
- Pengaruh urbanisasi.



SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK

menurut Hyman sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang menunjukkan peranan besar komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat.

Apa korelasi Sosialisasi Politik dengan Komunikasi Politik?

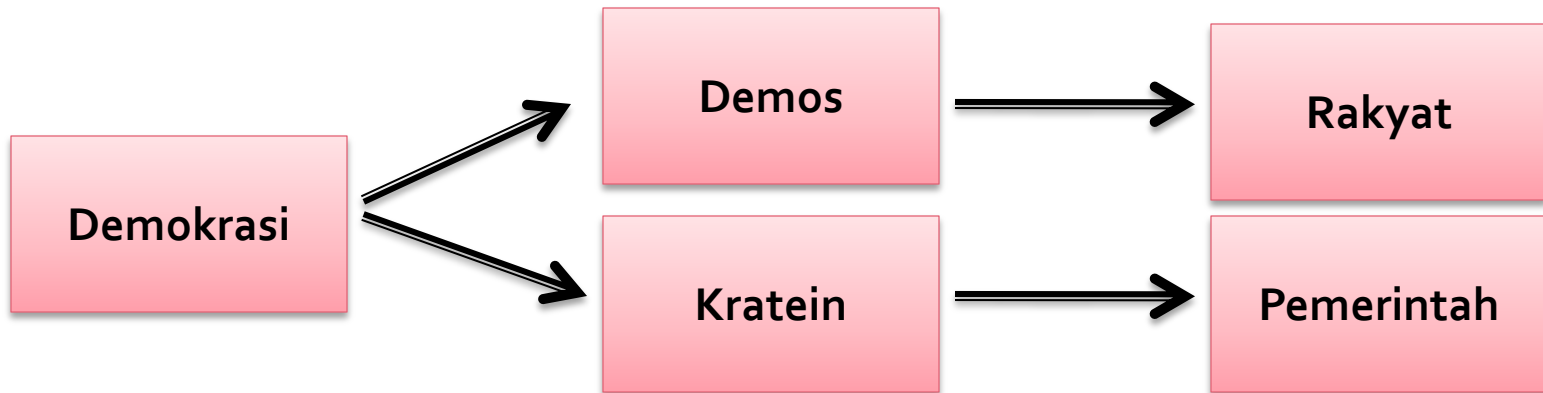


TERIMA KSIH



BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Pengertian Demokrasi



Syarat Pokok Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan (Diamond & Lipset) :

- Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan.
- Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan.
- Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik

Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

Unsur-unsur Budaya Demokrasi

- Kebebasan
- Persamaan
- Solidaritas
- Toleransi
- Menghormati Kejujuran
- Keadaban

Pandangan Demokrasi yang Menekankan ada Pemerintahan Rakyat, Karena Bertolak Dari Suatu Pola Pikir (Pemikiran)

- Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
- Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
- Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
- Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.

Macam-Macam Demokrasi

No.	Dasar Pemikiran	Macamnya
1.	Atas dasar penyaluran kehendak rakyat	Demokrasi Langsung Demokrasi Tidak Langsung
2.	Atas dasar prinsip ideologi	Demokrasi Konstitusional Demokrasi Rakyat
3.	Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya	Demokrasi Formal (negara-negara liberal) Demokrasi Material (negara-negara komunis) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)

Ciri-Ciri Demokrasi

- Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan.
- Perasaan pendapat umum (media massa) yang bebas dan bertanggung jawab.
- Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan.

Demokrasi di negara berkembang, masyarakat masih mencari dan menemukan identitas :

1. Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif)
2. Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
3. Pelaksanaannya cenderung bersifat pelaksanaan “otoriter”.

Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

- Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang di dasarkan pada sila-sila Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

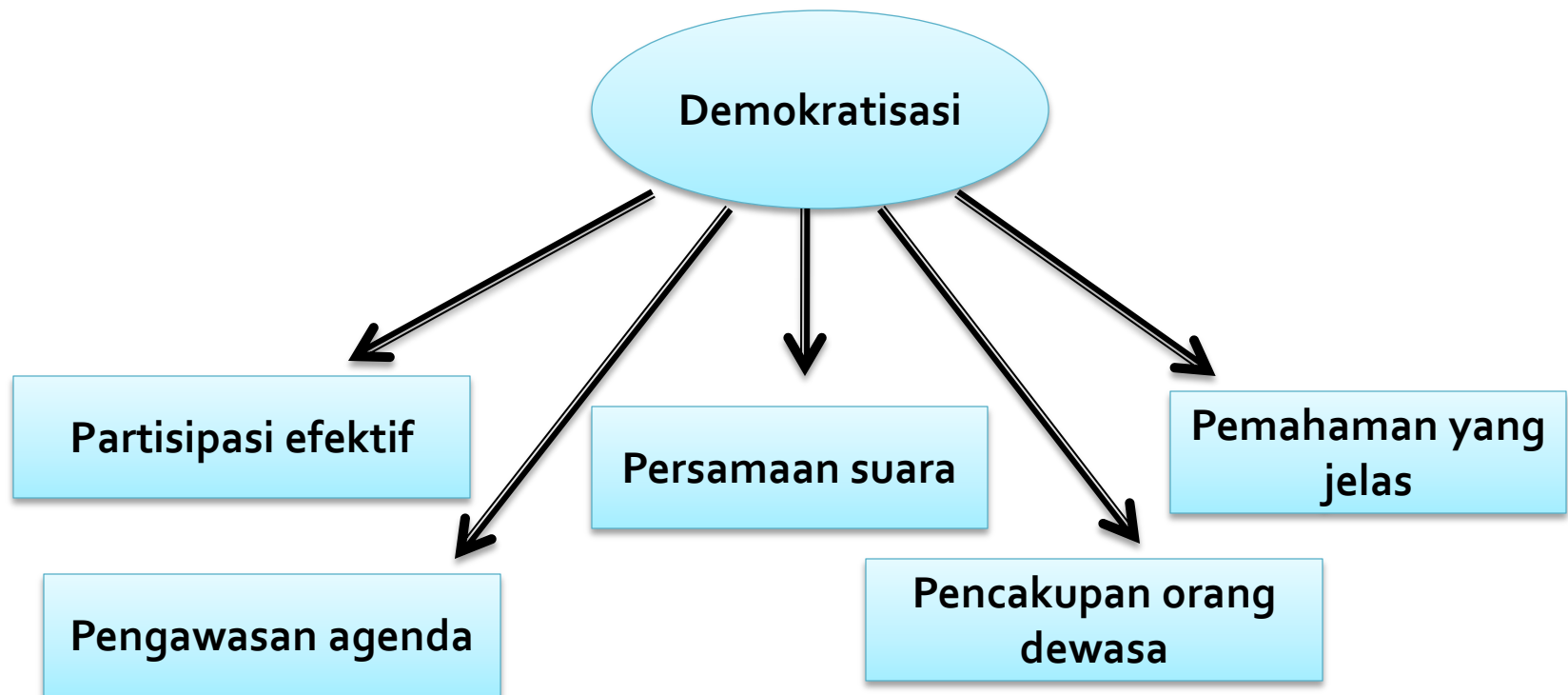
Lyman Tower Sargent, prinsip-prinsip dalam demokrasi :

- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara,
- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
- Suatu sistem perwakilan, dan
- Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, berdasarkan UUD 1945

- Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditunjukkan untuk rakyat.
- Berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta nilai keadilan sosial.
- Badan-badan perwakilan rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Demokratisasi



Masyarakat Madani

- Diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil.
- Diistilahkan dengan istilah masyarakat beradab/peradaban.
- Diterjemahkan sebagai masyarakat warna/kewargaan.
- Jadi masyarakat madani adalah konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi.

Karakteristik Masyarakat Madani

- Free public sphere.
- Demokratis.
- Toleransi.
- Pluralisme.
- Keadilan sosial.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia dalam

Mewujudkan masyarakat Madani

- Tingkat pendidikan;
- Pendapatan;
- Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
- Adanya budaya/kultur masyarakat yang belum selesai dengan demokrasi.

LAMPIRAN 29
MEDIA
PEMBELAJARAN
KELAS XI IPS 1

Budaya Politik di Indonesia

Oleh: Gista Ceri Aprasnja Paramitha

**APA ITU BUDAYA
POLITIK ?**

Pengertian Budaya Politik

- ❖ Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat.
- ❖ Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Budaya Politik menurut Para Ahli

❖ Rusadi Sumintapura

Budya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

❖ Sidney Verba

budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.

❖ Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

❖ Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.

❖ Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu pada populasi.

Komponen-Komponen Budaya Politik

- Orientasi Kognitif, berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.
- Orientasi afektif, berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
- Orientasi evaluatif, berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Negara dengan sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk mengintegrasikan modal dan keterampilan. pada kondisi ini, budaya politik cenderung bersifat:

- a. Budaya politik militan, tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang baik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. apabila terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya bukan peraturannya yang mungkin salah.
- b. Budaya politik toleransi, yaitu yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai. budaya politik ini berusaha mencari konsensus yang wajar.

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik terbagi atas:

- a. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut, yaitu yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi..
- b. Budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif, biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:

- a. Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif.
- b. Budaya politik kaula, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, tetapi masih bersifat pasif.
- c. Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Gista Ceri Aprasnja Paramitha



Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, maupun sistem politik lainnya.

PENGERTIAN MENURUT AHLI

⦿ Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

⦿ Alfian

Adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

SEGI PENTING SOSIALISASI POLITIK

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai), dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja, tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- d. Sosialisasi merupakan prakondisi bagi aktivitas sosial.

PROSES SOSIALISASI POLITIK

⦿ Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Pada usia anak-anak dan remaja merupakan periode paling penting dalam sosialisasi. Easton dan Dennis mengutarakan empat tahap dalam proses sosialisasi politik anak, yaitu:

- a. pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua dan anak.
- b. perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- c. pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung dan pemungutan suara (pemilu).
- d. perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan institusi-institusi.

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik . Adapun sarana yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik:

- a. Keluarga (*family*)
- b. Sekolah
- c. Partai Politik

SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

Menurut Robert Le Vine, terdapat tiga faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu

- a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.
- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita erat terikat nilai-nilai tradisional.
- c. Pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional.

SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK

- ⦿ Sosialisasi politik menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinu yang melibatkan baik belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi.
- ⦿ Proses sosialisasi politik dalam kaitannya dengan fungsi komunikasi politik berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik modern, institusi seperti kelompok sebaya, komunitas, sekolah, kelompok kerja, media komunikasi, partai-partai politik, dll dapat berperan dalam sosialisasi politik.

PARTISIPASI POLITIK

- ◎ **Partisipasi politik** adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

KONSEP PARTISIPASI POLITIK

- ◉ Adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana partisipasi politik itu.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tsb.	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat interaksi anantara warga negara dengan pemerintah• Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang/sekelompok org untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan individu atau kelompok • Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa

Michael Rush dan
Philip Althoft

Partisipasi politik
adalah keterlibatan
individu sampai pada
bermacam-macam
tingkatan di dalam
sistem politik

- Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik
- Memiliki tingkatan-tingkatan partisipas

PRAKTIK PARTISIPASI POLITIK

- ⦿ Berdasarkan riset-riset ttentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik:
 - a. Kegiatan pemilihan
 - b. Lobbying
 - c. Kegiatan organisasi
 - d. Mencari koneksi (*contacting*)
 - e. Tindakan kekerasan (*violence*)

PADA TINGKAT INDIVIDU, MILBRATH M.L. GOEL MENGIDENTIFIKASI PARTISIPASI POLITIK INDIVIDUAL:

1. *Apathetic inactives*
2. *Passive supporters*
3. *Contract specialist*
4. *Communicators*
5. *Party and campaign workers*
6. *Community activists*
7. *Protesters*

TINGKATAN PARTISIPASI POLITIK

- Tingkat partisipasi politik dibagi menjadi dua:
 - Aktivis
 - Partisipan
- Tingkat partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson:
 - Kategori Pengamat
 - Kategori Aktivis

Rush dan Althoff menyatakan bahwa hirarki yang terjadi dalam partisipasi politik sangat bergantung pada akibat yang disebabkan terhadap sistem politik. Tingkatan partisipasi politik:

- ⊙ Menduduki jabatan politik atau administratif
- ⊙ Mencari jabatan politik atau administratif
- ⊙ Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- ⊙ Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- ⊙ Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- ⊙ Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- ⊙ Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- ⊙ Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
- ⊙ Voting (pemberian suara)



SOSIALISASI POLITIK

Oleh : Gista Ceri Aprasnja Paramitha

PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK

- Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku dinegara manapun baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator maupun sistem politik lainnya.
- Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi pada anggota masyarakat.



MENGAPA SOSIALISASI PENTING???



TIGA SIFAT DASAR PERLUNYA SOSIALISASI

- Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
- “Secara ekstrim” manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidupnya harus dipelajari.
- Manusia belajar mengendalikan hubungan dengan sesamanya, yaitu hidup menurut nilai-nilai dan membina peranan bersama.



PENTINGNYA SOSIALISASI POLITIK

- Secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
- Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja, tetapi berlangsung seumur hidup.
- Merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial.



SOSIALISASI POLITIK MENURUT AHLI

- Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

- Denis Kavanagh

Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.



FUNGSI SOSIALISASI MENURUT RUSH DAN ALTHOFF

- Melatih Individu, dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik.
- Memelihara sistem politik, bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi.



SOSIALISASI POLITIK DILIHAT DARI METODE PENYAMPAIAN PESAN (RAMLAN SURBAKTI)

- Pendidikan politik yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.
- Indoktrinasi politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobiliasasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol-simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.



SARANA SOSIALISASI POLITIK

Keluarga?

Sekolah?

Partai Politik?



SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

Menurut Robert Le Vine, terdapat tiga faktor masalah penting dalam sosialisasi politik:

- Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk memodernisasi keluarga tradisional lewat industrialisasi pendidikan.
- Terdapat perbedaan besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional.
- Pengaruh urbanisasi.



SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK

menurut Hyman sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang menunjukkan peranan besar komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat.

Apa korelasi Sosialisasi Politik dengan Komunikasi Politik?

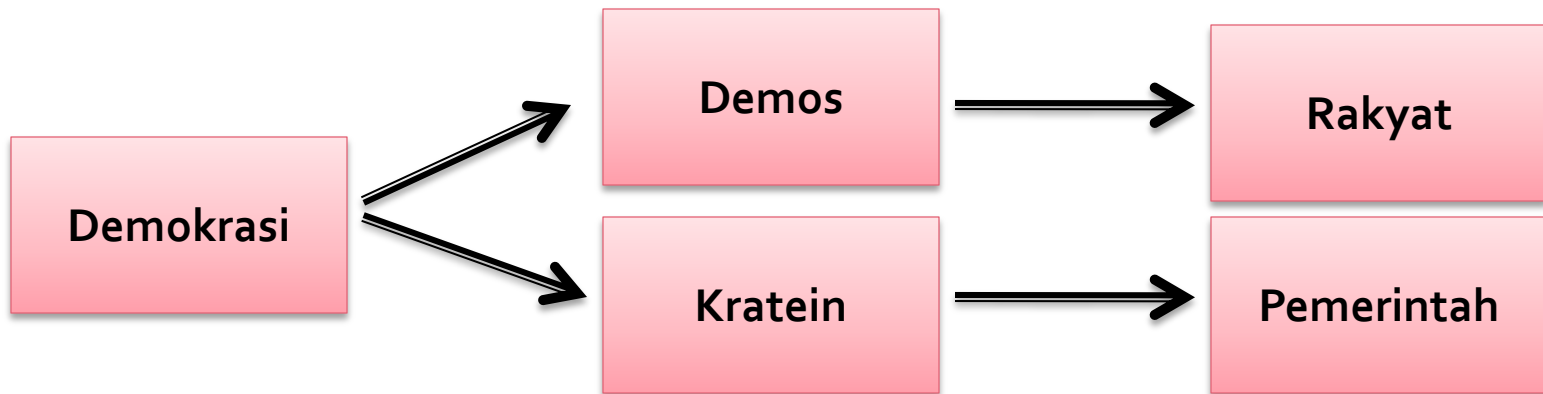


TERIMA KSIH



BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Pengertian Demokrasi



Syarat Pokok Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan (Diamond & Lipset) :

- Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan.
- Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan.
- Suatu tingkat kebebasan sipil dan politik

Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi adalah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.

Unsur-unsur Budaya Demokrasi

- Kebebasan
- Persamaan
- Solidaritas
- Toleransi
- Menghormati Kejujuran
- Keadaban

Pandangan Demokrasi yang Menekankan ada Pemerintahan Rakyat, Karena Bertolak Dari Suatu Pola Pikir (Pemikiran)

- Manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
- Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengejar kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan.
- Sesuatu yang diputuskan bersama akan memiliki kadar ketepatan dan kebenaran yang lebih menjamin dan lebih baik.
- Didalam kehidupan masyarakat pasti akan timbul selisih paham dan kepentingan antar individu, sehingga perlu suatu cara untuk mengatur bagaimana mengatasinya.

Macam-Macam Demokrasi

No.	Dasar Pemikiran	Macamnya
1.	Atas dasar penyaluran kehendak rakyat	Demokrasi Langsung Demokrasi Tidak Langsung
2.	Atas dasar prinsip ideologi	Demokrasi Konstitusional Demokrasi Rakyat
3.	Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya	Demokrasi Formal (negara-negara liberal) Demokrasi Material (negara-negara komunis) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)

Ciri-Ciri Demokrasi

- Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintahan.
- Perasaan pendapat umum (media massa) yang bebas dan bertanggung jawab.
- Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan.

Demokrasi di negara berkembang, masyarakat masih mencari dan menemukan identitas :

1. Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif)
2. Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
3. Pelaksanaannya cenderung bersifat pelaksanaan “otoriter”.

Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

- Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang di dasarkan pada sila-sila Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

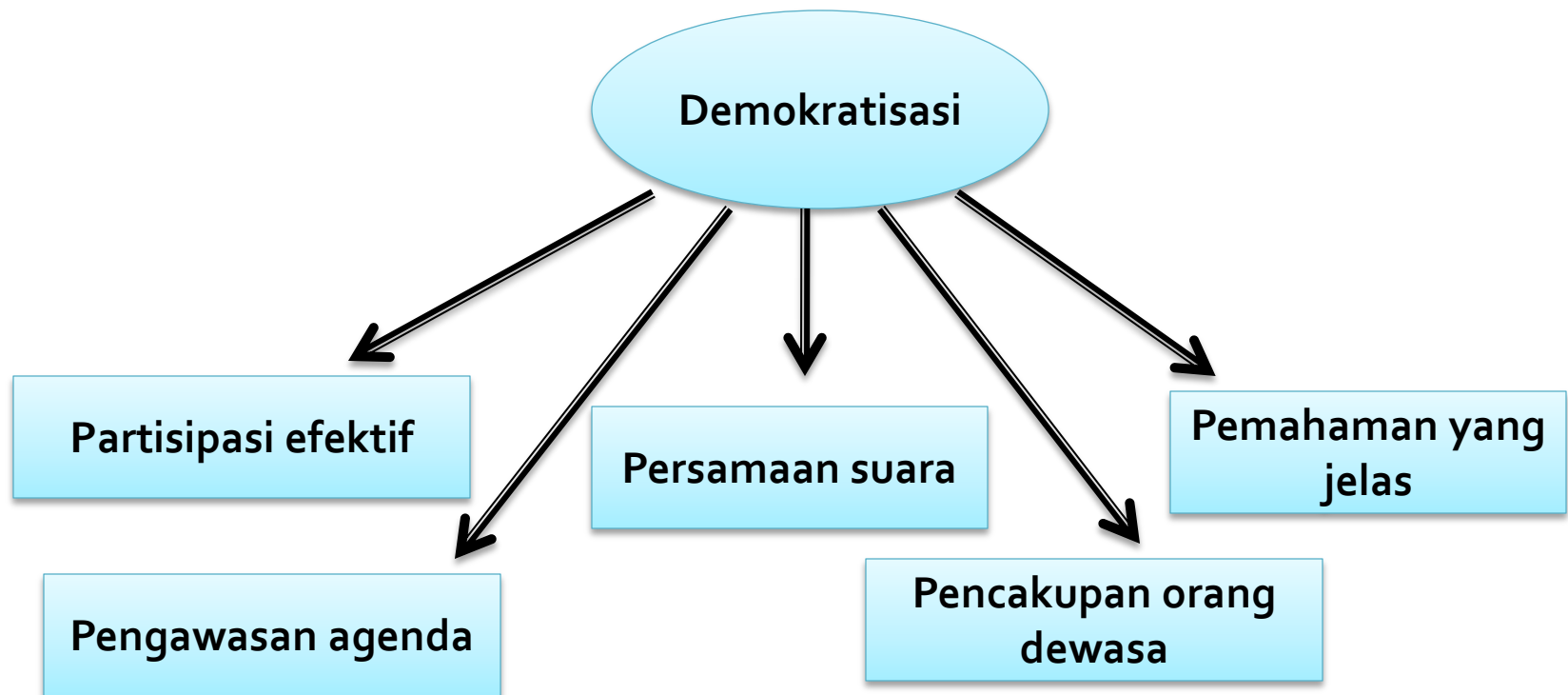
Lyman Tower Sargent, prinsip-prinsip dalam demokrasi :

- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara,
- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
- Suatu sistem perwakilan, dan
- Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, berdasarkan UUD 1945

- Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditunjukkan untuk rakyat.
- Berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta nilai keadilan sosial.
- Badan-badan perwakilan rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Demokratisasi



Masyarakat Madani

- Diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil.
- Diistilahkan dengan istilah masyarakat beradab/peradaban.
- Diterjemahkan sebagai masyarakat warna/kewargaan.
- Jadi masyarakat madani adalah konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi.

Karakteristik Masyarakat Madani

- Free public sphere.
- Demokratis.
- Toleransi.
- Pluralisme.
- Keadilan sosial.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia dalam

Mewujudkan masyarakat Madani

- Tingkat pendidikan;
- Pendapatan;
- Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;
- Adanya budaya/kultur masyarakat yang belum selesai dengan demokrasi.

LAMPIRAN 30

MEDIA

PEMBELAJARAN

KELAS X IIS 1

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Gista Ceri Aprasnja Paramitha

**TAU GAK SIH
PEMBAGIAN KEKUASAAN ITU APA ?**

Kekuasaan ?

Macam-macam kekuasaan negara

Konsep Pembagian Kekuasaan di
Indonesia

Tugas Kementrian Negara Republik
Inonesia

Klasifikasi Kementrian Negara
Republik Indonesia

KEKUASAAN?

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya.

1. Apa contohnya?

2. Apakah negara mempunyai kekuasaan?



Macam-Macam Kekuasaan Negara

Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
- b. Kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang
- c. Kekuasaan federatif, merupakan kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.





Montesquieu, membagi kekuasaan menjadi tiga (Trias Politica):

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia?

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdairi atas dua bagian, yaitu:

- a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan di negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Terdiri dari enam kekuasaan negara yaitu:
 - kekuasaan konstitutif (MPR)
 - Kekuasaan eksekutif (Presiden)
 - Kekuasaan legislatif (DPR)





- Kekuasaan yudikatif (MA, Badan Peradilan, MK)
- Kekuasaan eksaminatif/inspektif (Badan Pemeriksa Keuangan)
- Kekuasaan moneter (Bank Indonesia)

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal

merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Diantaranya yaitu:

- Pemerintah Pusat/Kekuasaan Eksekutif (Presiden)
- Pemerintahan Provinsi (Gubernur)
- Pemerintahan Kab/Kota (Bupati/walikota)



Kementrian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawan kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu:

- Penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungnya (merupakan teknis pelaksanaan dari pusat ke daerah)
- Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dibidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawabnya (merupakan teknis yang bersakala nasional)
- Perumusan dan penetapan kebijakan dibidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya.

Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementrian negara

- Urusan pemerintahan yang nomenklatur, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan.
- Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan, meliputi perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, BUMN, dll.



Kementrian Negara Republik Indonesia diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerinthan yang ditanganinya, yaitu:

- A. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945:
- Kementrian dalam Negeri
 - Kementrian Luar Negeri
 - Kementrian Pertahanan



B. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945:

- Kementrian Hukum dan HAM
- Kementrian Keuangan
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementrian Perindustrian
- Kementrian Perdagangan
- Kementrian Pertanian
- Kementrian Perhutanan
- Kementrian Perhubungan
- Kementrian Kelautan dan Perikanan
- Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementrian Pekerjaan Umum
- Kementrian Kesehatan
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementrian Sosial
- Kementrian Agama
- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementrian Komunikasi dan Informatika



C. Kementrian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu:

- Kementrian Sekretariat Negara
- Kementrian Riset dan Teknologi
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementrian Lingkungan Hidup
- Kementrian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementrian Badan Usaha Milik Negara
- Kementrian Perumahan Rakyat
- Kementrian Pemuda dan Olah Raga



D. Kementrian bidang koordinator, yaitu:

- Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat



Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

- Arsip Nasional RI (dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
- Badan Informasi Geospasial
- Badan Intelijen Negara
- Badan Kepegawaian Negara (dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (dibawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Urusan Logistik (dibawah koordinasi menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
- Dan lain-lain



Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Oleh : Gista Ceri Aprasnja Paramitha

A. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan RI

- Diatur dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang.
- Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan lautan seluas 3.257.438 km².

- Wilayah laut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

Maka wilayah laut dibedakan menjadi tiga,

a. Zona Laut Teritorial

ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.

b. Zona Landas Kontinen

ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter, Indonesia terletak pada dua kontinen yaitu Asia dan Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, paling jauh 200 mil laut.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

merupakan jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis besar.

- Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau keidaman warga negara atau penduduk Indonesia.
- Wilayah Udara adalah ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan lautan RI.

Batas-Batas Wilayah

- Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

- Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

- Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

- Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara

Kesimpulan

Jadi, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km², yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km² dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km².

Karena luas wilayah lautan lebih besar dari pada luas wilayah daratan, maka wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Yang kemudian sesuai Hukum Laut Internasional disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut di bedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Zona Laut Teritorial
- b. Zona Landas Kontinen
- c. Zona Ekonomi Eksklusif

Kemudian, untuk batas-batas wilayah dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Batas wilayah Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan lima laut wilayah negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina.

- b. Batas wilayah Indonesia sebelah barat
berbatasan dengan samudera hindia dan laut andaman.
- c. Batas wilayah Indonesia sebelah timur
berbatasan dengan Provinsi papuayaitu papua nugini barat dan provinsi barat yaitu provinsi sepik barat.
- d. Batas wilayah Indonesia sebelah selatan
berbatasan dengan timor leste, perairan australia dan samudera hindia.

Kedudukan WN dan Penduduk Indonesia



OLEH : GISTA CERI APRASNJA PARAMITHA



WARGA NEGARA ?

PENDUDUK ?

RAKYAT ?

Syarat WNI ?



Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni :

- Penduduk dan bukan penduduk
- Warga negara dan bukan warga negara



Apakah setiap penduduk adalah Warga Negara Indonesia?

JAWABANNYA ...



- Tentu saja tidak.
- Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia.

ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA



Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuktidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua,yaitu :

- Asas Ius Sanguinis(asas Keturunan)
- Asas Ius Soli (Asas Kedaerahan)

Negara yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu :



- Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyaikewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
- Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu :



- Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
- Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa) Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai :
 - Hak opsi; yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
 - Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Kewarganegaraan Indonesia menurut UU RI NO 12/2006



- Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.



SYARAT WNI ?

Permohonan pewarganegaraan dibedakan menjadi dua :



1. Naturalisasi biasa, Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa.
2. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 12/2006



- memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
- dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan:
 - 1) telah berusia 18 tahun ;
 - 2) bertempat tinggal di luar negeri;
- masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden;
- masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatandalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga NegaraIndonesia;



- mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri;
- turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya;
- mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;



- bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama limatahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.



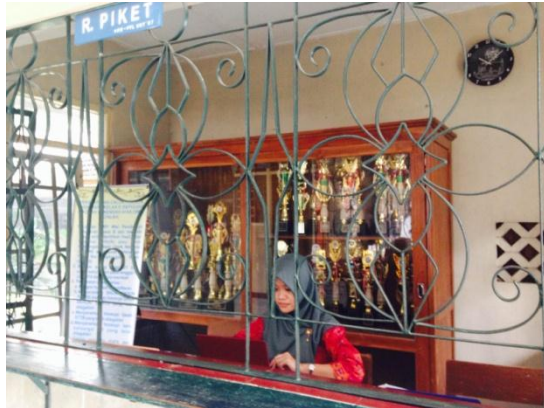
TRMKSH 😊

LAMPIRAN 31

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI

A. Piket Depan (Ruang Picket)



(Jaga Picket di Ruang Picket)

B. Picket Perpustakaan



(Mendata Nomor Buku)

C. Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas XI IPA 1



(KBM di Kelas XI IPA 1)

D. Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas XI IPS 1



(Mengkontrol diskusi yang dilakukan siswa)



(Mengkontrol diskusi siswa)

E. Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas X IIS 1



(Kegiatan mencatat pokok pembahasan)



(Foto bersama setelah pelajaran selesai)